

TESIS

# KASTA DAN BANJAR DI BALI

Studi Tentang Perubahan Simbol-simbol pada Warga Kasta  
Berbeda di dalam melakukan Interelasi di Lingkungan  
Banjar Adat dan Banjar Dinas



Oleh :

**SOBALI SUSWANDY**  
099411607M

**PROGRAM STUDI ILMU ILMU SOSIAL**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**1998**

# **KASTA DAN BANJAR DI BALI**

**Studi Tentang Perubahan Simbol-simbol pada Warga Kasta  
Berbeda di dalam melakukan Interelasi di Lingkungan  
Banjar Adat dan Banjar Dinas**

**Diajukan untuk disetujui sebagai Tesis  
guna memenuhi persyaratan pendidikan  
Pascasarjana Program Magister  
Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial**

Oleh :

**Sobali Suswandy  
099411607M**

**Menyetujui  
Pembimbing**

  
**Prof. DR. A. Ramlan Surbakti, MA**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial  
Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

  
**Prof. DR. A. Ramlan Surbakti, MA  
NIP : 130 701 133**

**Lembaran Pengesahan**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

Tanggal : 8 Oktober 1998

Oleh

**Pembimbing**



**Prof. DR. A. Ramlan Surbakti, MA**  
**NIP: 130 701 133**

Mengetahui

**Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial**  
**Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



**Prof. DR. A. Ramlan Surbakti, MA**  
**NIP: 130 701 133**

Tesis diuji pada

tanggal : 23 Oktober 1998

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua : 1. Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Anggota : 2. Prof. DR. A. Ramlan Surbakti, MA.

3. Dede Oetomo, Ph.D.

4. Nyoman Naya Sujana, Drs., M.A.

5. I.B. Wirawan, Drs., M.S.

**“Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak,  
karib-kerabat. Anak-anak yatim, orang-orang miskin,  
tetangga yang dekat, tetangga yang jauh serta teman sejawat”  
(QS. 4:36)**

**“Tiada yang lebih berarti bagi seorang anak manusia  
di dalam hidupnya, apabila ilmu yang dituntutnya tidak  
diamalkan bagi kesejahteraan umat”  
(Sobali Suswandy)**

kepada Hidayat almarhum ayahandaku tercinta  
Kt. Sari Sweny ibundaku tercinta  
Lukluk'atul Magfurah almarhumah istriku tercinta  
Ramdhani Lukmanusyifa anakku tercinta  
Sekecil apapun karya ini, namun dengan bangga  
**KUPERSEMBAHKAN** kepada kalian orang-orang yang kucintai.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini yang berjudul **KASTA DAN BANJAR DI BALI**, studi tentang *Perubahan Simbol-Symbol pada Warga Kasta Berbeda Di Dalam Melakukan Interelasi di Lingkungan Banjar Adat dan Banjar Dinas* dapat diselesaikan.

Tesis ini ditulis dengan segala kendala, keterbatasan pengetahuan, kurangnya kegigihan, keuletan berpikir, rasa tidak percaya diri, maupun keberanian pribadi. Banyak faktor yang membuat kendala itu memerangkap penulis hingga sampai pada tahap yang hampir-hampir "jenuh" atau bahkan "apatis". Sehingga di dalam menyelesaikan tesis ini mengalami keterlambatan, sampai memakan waktu sekitar empat semester. Namun terlepas dari semua itu, tanpa jasa banyak orang yang selama ini tiada henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan. Baik berupa material maupun spiritual, studi ini tentu saja tidak akan selesai dalam bentuknya seperti sekarang. Untuk itu, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik individu maupun lembaga dan pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam membantu dan mendorong penyelesaian studi ini.

Kendati demikian, tanpa mengurangi rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semuanya, saya ingin secara khusus menyebutkan beberapa pihak dan nama.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. DR. A. Ramlan Surbakti, MA, baik selaku dosen dan pembimbing, maupun selaku Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial. Beliau yang betul-betul tahu dan memahami akan keberadaan dan kemampuan penulis, sehingga dengan penuh rasa bijaksana telah mendorong penulis untuk setahap demi setahap, mulai dari rencana penelitian, sampai tesis ini selesai. Tanpa dorongan, bimbingan dan korektifnya, kemungkinan studi ini tidak akan selesai tepat pada waktunya.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Bapak Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, yang di dalam segala kesempatan tidak pernah mengenal ruang dan waktu selalu memberikan masukan yang sangat berharga kepada saya demi kelancaran penyelesaian tesis ini. Demikian pula, penghargaan yang sama juga disampaikan kepada Bapak Drs. Nyoman Naya Sujana, MA., yang dengan penuh semangat dan dengan caranya sendiri telah banyak membantu penulis di dalam memberikan berbagai bahan kajian dan juga memberikan komentar dan koreksi pada tulisan tesis ini. Kepada Bapak Drs. I B. Wirawan, M.S. yang penuh dengan pengertian disertai keramah-tamahannya yang khas telah memberikan petunjuk-petunjuk yang

bermanfaat di dalam penyelesaian tulisan ini. Kepada Bapak DR. Dede Oetomo juga saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, yang dengan kesibukannya telah banyak menyempatkan untuk membantu memberikan komentar-komentarnya kepada penulis.

Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dijabat oleh Prof. Dr. H. Soediyono, dr. Atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. H. Fasich, dr. Apt. yang dengan kebijaksanaan telah membantu penulis dengan limpahan TMPD selama lima bulan. Hal tersebut sangat mendorong penulis di dalam menyelesaikan tulisan ini. Disamping itu juga ucapan terima kasih ini disampaikan kepada petugas Perpustakaan Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah banyak membantu sehingga memudahkan saya untuk mendapatkan bahan informasi yang dibutuhkan.

Di dalam melakukan penelitian lapangan saya telah sangat dibantu terutama oleh Bapak Klian Adat Banjar Belong. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada Bapak Klian Banjar Adat Belong yaitu Bapak Ir. Brandi beserta istri, dengan penuh perhatian dan pengorbanan yang tidak sedikit kepada penulis. Bantuannya sangat tidak terbatas, baik sebagai subyek penelitian dan juga menunjukkan siapa yang harus dituju untuk dijadikan subyek

penelitian. Informasinya tidak terbatas ruang dan waktu. Ada yang ingin saya sampaikan kepada anda Bapak Klian : Anda layak jadi bintang dalam tesis saya ini, karena tanpa batuan sekaligus dorongannya, saya mungkin tidak akan dapat menyelesaikan tulisan ini. Atas nama pribadi ucapan terima kasih inipun saya sampaikan kepada seluruh warga/krama desa Sanur Kaja khususnya banjar Belong yang saat penelitian ini berlangsung telah mengilhami bangun logika pemikiran saya. Tetapi, semua yang tertulis dalam tesis ini kekuatan dan kelemahannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Kepada seluruh civitas akademika Program Pascasarjana, teman-teman satu angkatan maupun di atas dan di bawah yang dalam kesempatan tegur sapa tidak pernah lepas ikut mendorong memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan tesis ini. Khususnya kepada teman saya Drs. T.M. Jamil, Msi. Yang penuh perhatian telah banyak membantu dan mendorong serta menanamkan rasa optimisme saya di dalam menyelesaikan tesis ini.

Kepada Bapak Prof. Dr. Syafiq A. Mugni, MA. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang penuh dengan pengertian telah membantu dan mendorong saya di dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Bapak memaklumi akan langkah saya ini dan hanya Allah SWT. Yang mengetahui tujuan saya. Sementara ucapan terima kasih ini juga disampaikan kepada Dra. Farida Agoes, yang tidak banyak perhitungan dan komentar serta dorongannya telah banyak membantu penulis di dalam

menyelesaikan tesis ini. Demikian juga ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ir. Sri Retno Wulandari, bantuannya sangat tidak terbatas baik berupa material maupun spiritual, bahkan di dalam penulis melakukan penelitian yang pada waktu itu faktor "apatisme" sedang merengguh penulis karena "napas" yang ada sudah tidak lagi dapat menyanggah langkah. Penghargaan yang sama saya sampaikan kepada Nur Choliz, yang pada setiap kesempatan saya berada diujung tanduk, bahkan semua mata yang ada pada jiwa dan raga saya ini gelap tidak bisa melihat apa-apa, engkau muncul bak pelita yang menghantarkan saya kembali kepada jalan perjuangan. Mungkin khusus untuk anda ucapan terima kasih saja tidak cukup, karena pada dirimu nilai keikhlasan itu bagaikan kekayaan yang berlimpah. Semoga Allah SWT. membalas dengan segala karunia-Nya ..... Amin.

Kepada Ibunda Kt. Sari Sweny serta Ibunda Nur Soleiman, Tresna Widya (Dawied), M'bak Wiewiek dan Mas Sugito, saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas do'a dan dorongannya. Kepada paman dan bibiku Bapak/Ibu Bukit Purwatha dan adik-adikku 'dek Yudi dan Mangwi, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan do'anya. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada rekan-rekan yang berada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Universitas Wijaya Putra Surabaya atas dorongan di dalam menyelesaikan studi ini. Khususnya kepada 'mbak Dra. Aminah dan mas Drs. Budi terimalah rasa simpatik saya kepada kalian.

Kepada istri tercinta , Dra. Lukluk Magfurah almarhumah, yang ketidak-beradaannya membuat saya hampir-hampir "apatis", walau ritme langkah perjuangan telah dipertinggi frekuensinya, sampai-sampai gambaran untuk dapat menyelesaikan studi ini sempat menjadi angan-angan belaka. Namun, untunghlah waktu dengan cepat menegur bahwa kepergianmu adalah harus dijadikan momentum dalam memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Senyummu yang bermakna "dorongan" manakala saya ucapkan kata-kata untuk menuntut ilmu lagi adalah merupakan generator kekuatan, semoga engkau istriku lebih tenang lagi di sisi-Nya, terima kasih atas do'anya, terima kasih atas dorongannya walaupun saat itu tidak dapat engkau ungkapkan lewat kata-kata. Do'aku selalu mnyertaimu semoga engkau bahagia di "sana" dan saya beserta buah hati kita bahagia di sini ..... Amin.

Dan akhirnya kepada anakku Ramdhani Lukmanusyifa, dengan caranya sendiri yang penuh dengan keluguan dan tidak pernah dilupakan dalam awal kata yang diucapkannya semenjak dia mengenal kata-kata apa yang harus diucapkan. Apabila ditanya : Papa kemana ?, jawabmu singkat tetapi benar "ke Kampus". Dan itu pulalah didalam perkembangannya selalu menjadi pertanyaan manakala saya akan pergi ke kampus ataupun ke lain tempat. Semoga perkenalan pertamamu dengan kata kampus akan membawamu menjadi manusia yang mengenal makna kampus di dalam hidupmu. Terima kasih papa atas kesabaranmu untuk tidak bertingkah yang aneh-aneh, keberadaanmu adalah merupakan

kekuatan yang tiada terhingga di dalam memicu menyelesaikan jargon-jargon kehidupan ini.

Akhirnya, walaupun saya sudah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak baik individu maupun lembaga, bukan berarti tesis ini ada hubungan dengan tanggung jawab mereka. Dengan kata lain, hal tersebut berarti bahwa seluruh isi tesis ini dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, tanggung jawab sepenuhnya tetap berada di tangan saya. Namun, selaku manusia biasa yang diwarnai oleh berbagai kekurangan dan kepentingan, sudah pasti kedua hal itu langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kadar kemurnian tesis ini. Oleh karena itu, bila menurut pandangan "pembaca" dirasakan biasanya terlalu mengganggu dan sangat mencolok, kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat saya hargai dan saya ucapkan terima kasih. Hanya kepada Allah Yang Maha Kuasa, saya mohon petunjuk dan bimbingan-Nya ..... Amin.

Surabaya, 8 Oktober 1998

Penulis,

Sobali Suswandy

## RINGKASAN

**Kata Kunci :** Perubahan Simbol-Symbol pada warga kasta berbeda di dalam memelakukan interelasi di lingkungan Banjar Adat dan Banjar Dinas

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kasta dan Banjar di Bali. Fokus kajiannya adalah tentang perubahan simbol-simbol perilaku pada warga kasta berbeda di dalam mengadakan interelasi di lingkungan banjar adat dan banjar dinas. Dan yang menjadi rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah : 1) Perubahan simbol-simbol yang bagaimana terdapat pada warga kasta berbeda di dalam lingkungan banjar adat dan banjar dinas ? dan 2) Mengapa perubahan itu terjadi ?.

Subyek penelitian (sampel penelitian) adalah warga kasta berbeda atau anggota krama yang terdapat di Banjar Belong baik adat maupun dinas, Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan studi tentang perubahan simbol-simbol perilaku pada warga kasta berbeda di dalam mengadakan interelasi di lingkungan banjar telah diamati secara langsung pada subyek penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang merupakan penelitian kualitatif, maka jumlah subyek penelitian bukan merupakan syarat utama, tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari sumber data dan informasi yang dikumpulkan.

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data observasi dan interview. Hal ini sesuai dengan tradisi penelitian kualitatif yang lebih mementingkan kedua metode pengumpulan data tersebut. Observasi ini orientasi penekanannya ditujukan pada : lokasi/tempat suatu situasi sosial itu berlangsung, manusia pelaku atau aktor yang menduduki status sosial tertentu dan memainkan peran tertentu, dan kegiatan para pelaku pada tempat/lokasi berlangsung sesuatu situasi sosial. Sedang dengan metode pengumpulan data interview didasari oleh alasan : peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek penelitian, tetapi dapat juga jauh di dalam diri subyek penelitian, apa yang ditanyakan kepada subyek penelitian bisa mencakup hal-hal lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perubahan simbol-simbol pada perilaku warga kasta berbeda di dalam mengadakan interelasi terjadi karena berkaitan dengan kepentingan diantara kedua fungsi banjar berbeda tersebut. Simbol-simbol yang berlaku pada kepentingan adat menempatkan sistem kasta bersifat "inherited status", sementara simbol-simbol yang berlaku pada kepentingan kedinasan atau negara menempatkan warga kasta berbeda bersifat "achieved status". Dengan demikian, perubahan simbol-simbol perilaku yang terjadi pada warga kasta berbeda di lingkungan

banjar di dalam mengadakan interelasi sangat tergantung dalam konteks apa warga kasta berbeda tersebut mempunyai kepentingan. Sementara mengapa perubahan itu terjadi adalah disebabkan karena masih terdapat beberapa faktor : 1) Nilai-nilai Kepercayaan yang masih melekat pada masyarakat, 2) Sistem Kasta dan Status Quo, 3) Kedudukan lembaga adat yang otonomus, dan 4) Patronase dan Kepemimpinan adat.

## ABSTRACT

**Key Word :** The Changing of the Symbols in different caste people in order to make interrelation in Banjar Adat and Banjar Dinas.

This observation is to describe caste and Banjar in Bali. The focus of observation is about the changing of different caste people attitude in order to make interrelation in Banjar Adat and Banjar Dinas. The scope of the problem are : 1) What is the changing of the symbols in different caste in Banjar Adat and Banjar Dinas ? and 2) Why do the changing happen ?

The object of the observation is the different caste people or the member of krama in Banjar belong, Adat as well as Dinas, Sanur Kaja, South Denpasar City. The direct observations towards the subjects is doing to collect the data and informations related with the study of the changing of the symbols in different caste people in order to make interrelation in Banjar. This observation is qualitative observation, that is why the subject is not the main qualification, but the quantity of the data source and information is more important.

The method of collecting observation data and interview used in this observation. This fits with the tradition of qualitative observation which stresses to the two methods. This observation stresses to : location of the social situation, the subject or the actor who owns specific social status and plays specific role, and the action of the actors in the location of the social situation. While, collecting data with interview is used based on the reason that the observer can explore not only what is known and experienced by the subject but also deeper in the subject itself. The questions asked to the subject may related with past time, recent time and future time.

The result of the observation shown that the changing of the symbols of the different caste people attitude in order to make interrelation is happened because the need between the function the different banjar. Symbols that is used in the sake of other hand, different caste as "inherited status" on the other hand, different caste people is "achived status". So, the changing of attitude symbols of the different caste in Banjar in order to make interrelation depend on the context of the motivation of the Banjar people. The changing is happened because some factors : 1) The beliefs values of the people still strength , 2) Caste system and status quo, 3) Autonomous of the Adat boards, and 4) Patronase and Adat leadership.

## DAFTAR ISI

	halaman
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
RINGKASAN .....	xii
ABSTRAKCT .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR DIAGRAM .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Kerangka Konseptual .....	17
1. Sistem Kasta dan Kelas pada Masyarakat .....	17
2. Kasta dan Sistem Sosial di Bali .....	21
3. Kasta dan Status Kelas di Lingkungan Banjar .....	26
4. Interelasi .....	34
5. Perubahan Simbol-Simbol .....	37
F. Metode Penelitian .....	39
- Pemilihan Tempat/Lokasi Penelitian .....	39
- Strategi Pendekatan di Lapangan .....	42
- Tahap-Tahap Penelitian .....	44
- Instrumen Penelitian .....	45
- Metode Pengumpulan Data .....	45
- Metode Analisa Data .....	47
<b>BAB II : POLA PERILAKU WARGA DI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BANJAR DI BALI .....</b>	<b>49</b>
A. Kedudukan dan Fungsi Banjar Bagi Masya - rakat Bali .....	49
1. Kedudukan dan Fungsi Banjar .....	49
1. a. Pengertian dan Kedudukan Banjar .....	50
1. b. Fungsi Banjar .....	52
2. Sistem Aturan dan Keanggotaan pada Banjar .....	54
a. Sistem Aturan Dalam Banjar .....	54
b. Keanggotaan pada Banjar .....	56
b. 1. Kewajiban dan Hak Anggota Krama Banjar .....	61
b. 2. Pemberhentian Keanggotaan krama Banjar .....	63

B. Sistem Upacara pada Banjar .....	68
C. Struktur Administrasi Banjar dan Desa .....	77
D. Kasta dan Status didalam Kehidupan Masyarakat Hindu Bali .....	83
E. Pola Perilaku Warga Kasta Berbeda pada Banjar Adat dan Banjar Dinas .....	89
1. Pada Banjar Adat .....	89
2. Pada Banjar Dinas .....	95
F. Kepemimpinan dan Sistem Pemilihan Klian pada Banjar .....	102
 <b>BAB III : PERUBAHAN SIMBOL-SIMBOL PERILAKU PADA WARGA KASTA BERBEDA DI DALAM MELAKUKAN INTERELASI DI LINGKUNGAN BANJAR ADAT DAN BANJAR DINAS .....</b>	 <b>110</b>
A. Interelasi di Luar Lingkungan Banjar .....	110
- Interelasi pada Lingkungan Pekerjaan .....	113
- Interelasi pada Lingkungan Sekolah/Kampus ....	117
- Interelasi pada Lingkungan Organisasi Kemasyarakan .....	126
B. Interelasi Warga Kasta Berbeda di Lingkungan Banjar .....	129
- Interelasi dalam Kedudukan Sebagai Warga Adat ..	131
- Interelasi dalam Kedudukan Sebagai Warga Negara (Banjar Dinas) .....	138
 <b>BAB IV : FAKTOR TERJADINYA PERUBAHAN SIMBOL-SIMBOL PADA WARGA KASTA BERBEDA DI DALAM MENGA-DAKAN INTERELASI LINGKUNGAN BANJAR DI BALI .....</b>	 <b>147</b>
A. Nilai-Nilai Kepercayaan yang masih melekat pada masyarakat .....	147
B. Sistem Kasta dan Status Quo .....	153
C. Kedudukan Lembaga Adat yang Otonomus .....	158
D. Patronase dan Kepemimpinan Adat .....	162
 <b>BAB V : PENUTUP .....</b>	 <b>166</b>
A. KESIMPULAN .....	168
B. IMPLIKASI TEORITIK .....	172
 DAFTAR PUSTAKA .....	 185
LAMPIRAN - LAMPIRAN .....	180

## DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 1 : Struktur Pemerintahan Desa Sanur Kaja .....	80
Diagram 2 : Struktur Kepemimpinan Banjar Belong .....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu realitas kehidupan yang melekat pada masyarakat Hindu di Bali adalah dengan adanya sistem sosial yang majemuk dan bersifat hirarkis berupa sistem kasta. Sistem ini sudah sangat meresap pada segi kehidupan masyarakat Hindu di Bali, mulai dari mitos yang abstrak sampai pada kehidupan keluarga dan kelompok. Penggolongan kasta pada masyarakat Hindu Bali semula bermakna religi, dimana bahwa setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat bekerja menurut bakat, keahlian dan kemampuannya masing-masing serta harus berlandaskan rasa cinta kasih dalam dharma atau kebenaran. Itu semua karena manusia memiliki bakat kelahiran dan kemampuan berbeda. Dan atas itu pulalah manusia melakukan pengabdian dan melakukan dharma baktinya kepada masyarakat, negara dan umat manusia.

Berdasarkan sifat-sifat di atas, agama Hindu menggolongkannya menjadi empat bagian yang dikenal dengan nama "**Catur Warna**"<sup>1</sup> yaitu : Pertama, **Brahmana** adalah golongan orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat, negara dan umat manusia

---

<sup>1</sup>Wayan Parthiana, dalam kumpulan tulisan "*Kepribadian dan Perubahannya: Beberapa Perubahan dan Pergeseran Nilai-Nilai Sosial-Budaya Dalam Masyarakat Bali*". (Jakarta: Gramedia, 1984), hal. 236.

dengan jalan mengamalkan ilmu dan pengetahuannya dalam bidang kerohanian dan keagamaan. Kedua, **Ksatria** adalah golongan orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat, negara dan kemanusiaan dalam bidang kepemimpinan dan kewibawaan untuk mempertahankan kesejahteraan, kemakmuran dan ketentraman masyarakat, negara dan umat manusia. Ketiga, **Waysia** adalah golongan orang-orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang-bidang kehidupan untuk menyelenggarakan kemakmuran, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, negara dan umat manusia. Keempat, **Sudra/Jaba** adalah golongan orang-orang yang mengabdikan diri kepada masyarakat, negara dan umat manusia dalam bidang-bidang kehidupan yang lebih memerlukan kekuatan fisik dan jasmaniah, demi terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan dan ketentraman.

Keempat warna atau golongan tersebut sama-sama dibutuhkan dan memiliki kedudukan dan peran yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah satu dari pada lainnya. Karenannya keempat golongan tersebut harus saling bekerja sama dan saling mengisi. Dengan demikian, keempat golongan tersebut memiliki sifat *horizontal*, bukan *vertikal*. Perpindahan pengabdian, misalnya dari golongan pertama menjadi kedua, ketiga ataupun keempat maupun sebaliknya, sangat besar kemungkinannya

bisa terjadi karena tidak ada larangan untuk itu. Hal tersebut di samping bersifat **horizontal** juga bersifat **terbuka**.<sup>2</sup>

Catur warna ini dalam perkembangannya kemudian lebih dikenal dengan nama "*kasta*". Isi dan maknanya berubah dan mengalami penyimpangan yang sangat prinsifal, dimana semula bersifat **horizontal terbuka**, sekarang menjadi **vertikal tertutup**. Kasta Brahmana, Ksatria dan Waysia yang biasa disebut dengan Triwangsa menempati status yang lebih terhormat jika dibandingkan dengan kasta Sudra/Jaba. Tingkatannya dapat dilihat sebagai berikut : kasta Brahmana sebagai kasta tertinggi, kemudian kasta Ksatria, Waysia dan yang paling rendah kasta Sudra/Jaba. Golongan orang yang termasuk dalam ketiga kasta yang disebut kaum Triwangsa tersebut dipandang sebagai kaum bangsawan. Sedangkan golongan orang yang termasuk dalam kasta Sudra/Jaba adalah rakyat jelata. Karena sifatnya yang vertikal tertutup, maka penggolongannya juga diwarisi secara turun-temurun dan bahkan disertai dengan hak-hak dan kekebalan tertentu yang melekat padanya. Adapun perpindahan hak yang semula sangat dimungkinkan, sejak zaman pemerintahan raja Gelgel sampai sekarang tidak bisa terjadi, walaupun ada amat jarang terjadi, itupun dengan menimbulkan konflik yang cukup hebat. Begitu kuatnya pengaruh kasta dalam praktek kehidupan dalam masyarakat Hindu di Bali, I Gusti Ngurah Bagus mengatakan bahwa sampai pada tahun 1951, pada legislatif (DPRD) yang anggotanya sebagian besar mantan "pemuda pejuang"

---

<sup>2</sup> Wayan Parthiana, *Nilai* .....237.

mengeluarkan resolusi yang mendapat persetujuan kepala daerah, untuk membatalkan berlakunya hukum yang melarang perkawinan antara kelompok/golongan kasta. Dimana diharapkan dengan keikutsertaan badan/lembaga tersebut proses demokrasi dalam kehidupan masyarakat bernegara di Bali dapat ditegakkan, walau demikian resolusi tersebut dianggap sangat revolusioner dan menimbulkan dampak yang hebat.

Permasalahan kasta saat ini masih dan akan tetap berpengaruh dikalangan pemeluk agama Hindu, dikarenakan aturan adat yang masih mengharuskan hal tersebut berlaku. Dalam adat Hindu di Bali mengharuskan kalangan Sudra/Jaba harus hormat pada kalangan Triwangsa, dalam bertutur kata seorang Sudra/Jaba haruslah sopan dan santun dan memanggilnyapun bila perlu harus memanggil "ratu", sementara sebaliknya kaum Triwangsa bebas atau tidak menjadi keharusan untuk berlaku seperti halnya kaum Sudra/Jaba terhadap kaum Triwangsa, sekalipun kasta Sudra/Jaba dalam hal ini mempunyai kedudukan dan jabatan pada pekerjaan lebih tinggi dari seorang yang berkasta Triwangsa. Hal tersebut terjadi karena kedudukannya memang menempatkannya pada posisi yang rendah, dan hal ini sudah menjadi suatu kesepakatan yang bersifat adat dan spiritual. Kondisi tersebut akan lain halnya apabila keberadaan Triwangsa dan Sudra/Jaba dalam situasi di luar kepentingan adat. Di sini akan berlaku kedudukan yang stara atau bahkan kemungkinan kalangan Sudra/Jaba lebih terhormat. Dalam nuansa di luar adat, panggilanpun tidak lagi harus terikat dengan peraturan seperti yang berlaku

pada situasi adat, namun cukup dengan "Bapak" atau "Ibu" dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan permasalahan di atas, sebetulnya telah nampak perkembangan yang sangat berarti berkaitan dengan perubahan bentuk penghargaan pada masing-masing warga kasta berbeda tersebut. Hal ini terlihat pada perubahan simbol-simbol yang terdapat pada perilaku yang dilakukan warga berbeda kasta, lain yang berlaku saat bernuansa adat dan saat bernuansa dinas/negara. Pada nuansa adat berlaku aturan main yang bersifat tradisional (budaya domestik), sementara dalam nuansa dinas/negara bersifat modern (kosmopolitik atau publik). Dengan demikian, simbol-simbol yang berlaku pada adat tidak berlaku pada dinas/adat.

Upaya reformatif juga diarahkan untuk menghapuskan sistem kasta. Penghapusan ini diawali dengan menghilangkan tradisi *Asu Amundung* dan *Anglang Kahin Karang Ulu*, yaitu bagian dari hukum adat perkawinan yang sangat bercorak diskriminatif. Namun, walaupun usaha reformatif kearah penghapusan sistem kasta sudah dilakukan cukup gencar, akan tetapi sampai saat ini masyarakat Hindu Bali masih tetap terbagi dalam kelas-kelas tradisional (Brahmana, Ksatria, Waysia, dan Sudra). Nama-nama kasta seperti Ida Bagus, Cokorda, Anak Agung, Wayan, Made dan sebagainya masih tetap diberikan kepada bayi-bayi yang lahir untuk disandangkannya. Hanya saja dalam pemahaman terhadap sistem kasta di

Bali, orang tidak lagi bergayut seluruhnya pada konsepsi tentang sistem kasta yang sebelumnya sangat ketat, diskriminatif, dan dominan.<sup>3</sup>

Sistem kasta di Bali, seperti yang dikatakan oleh Hildred Geertz yang dikutip oleh Jean Couteau<sup>4</sup> bukanlah suatu sistem feodal yang terdiri dari pada tuan tanah di satu pihak, dan para budak di pihak lain. Memang benar bahwa ada larangan bagi perkawinan antar kasta, namun larangan itu dalam prakteknya dapat tembus lewat adat kawin lari (*merangkat, ngerorod*). Kawin lari dalam hukum adat Bali bisa diinterpretasikan sebagai pintu keluar bagi peraturan perkawinan yang berat sebelah, yang dalam perjalanan waktu mendapat "social acceptance". Perubahan politik, sosial-budaya dan ekonomi yang terjadi, terutama sejak kemerdekaan menyebabkan pengaburan fungsi original kelas tradisional tersebut, hal ini telah menjadikan kenyataan bahwa setiap orang apapun kelasnya mempunyai persamaan hak yang sama.

Seirama dengan beberapa fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini akan disebutkan beberapa tulisan dan penelitian yang menyinggung masalah kasta yang pernah dilakukan. Masyhuri misalnya didalam penelitian yang berjudul "Dinamika Masyarakat Pedesaan : Pejaten Tahun 1950-1988", dalam kajiannya dikemukakan pada tahun 1950an pernah muncul konflik pada kalangan Triwangsa sendiri, dimana

---

<sup>3</sup> I Gusti Ngurah Gorda. "Nilai-Nilai Agama Hindu dan Etika Ekonomi dan Wirausahawan Bali". Disertasi, Pascasarjana Airlangga Surabaya. 1995.

<sup>4</sup> Jean Couteau. "Bali di Persimpangan Jalan : Transformasi Struktural Masyarakat Bali". (Denpasar: Nusa Data IndoBudaya. 1995). hal. 48.

kasta Brahmana merasa tidak puas dengan praktek kepemimpinan kasta Ksatria yang ingin mempertahankan "status quo" yang mana golongan ini mengklaim bahwa merekalah keturunan asli Pejaten dan selalu harus tampil dalam kepemimpinan desa. Sementara itu golongan Brahmana dan golongan Sudra/Jaba ingin mengubah "status quo" yang ada, untuk itu mereka membentuk semacam aliansi dan kemudian menuntut diadakannya perubahan-perubahan. Kemudian peneliti melihat kasta dalam status sosial yang tinggi muncul pada masyarakat bersamaan dengan munculnya ide-ide baru tentang pembangunan desa. Mereka cenderung memperolehnya melalui jalur di luar kekastaan, yakni melalui jalur pendidikan modern, dimana diharapkan nantinya dapat membentuk kekuatan dan menjadi agen modernisasi.<sup>5</sup>

Walaupun fokus dari penelitiannya tidak menggambarkan permasalahan kasta secara panjang lebar, namun demikian pada kasus tersebut memberikan gambaran bahwa konflik intern kasta bisa saja terjadi apabila ada hal-hal yang tidak memberikan kepuasan kepada semua pihak (tak terkecuali kasta apapun). Sebagaimana yang digambarkan Masyhuri bahwa pada tahun 1950an terjadi konflik kasta dalam rangka menuntut kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan demokrasi yakni tuntutan semua golongan. Dimana Kasta Ksatria dianggap tidak pernah bisa berbuat apa-apa karena kepemimpinan mereka semata-mata atas dasar dukungan

---

<sup>5</sup> Masyhuri. *Journal Sejarah*. "Dinamika Masyarakat Pedesaan : Pejaten Tahun 1950/1988", (Kakarta:Gramedia, 1992), hal. 16.

kolonial dan warisan saja. Ditambahkan pula penelitian Masyhuri ini gambaran yang kebetulan terjadi pada masa-masa revolusi di tahun 1950an, yang saat itu orientasi dan sasarannya pada permasalahan politik belaka.

Sementara I Gusti Ngurah Bagus dalam "Bali in The 1950s: The Role of The Pemuda Pejuang in Balinese Political Proseses"<sup>6</sup> ada terungkap permasalahan kasta yang cukup menjadi perhatian para pemuda pejuang yang pada saat itu sedang berjuang dalam rangka menegakkan pemerintahan yang demokratik. Karena permasalahan kasta menjadi perhatian pokok dalam proses menuju demokratisasi, hal tersebut menyebabkan diajukannya resolusi yang berisi diharuskannya pembatalan perkawinan antar golongan / kelompok kasta. Namun demikian, permasalahan kasta yang muncul saat itu tidak diungkap kepermukaan, karena yang sering terjadi hanyalah permasalahan perkawinan. Tulisan I Gusti Ngurah Bagus ini tidak berfokus pada permasalahan kasta, namun permasalahan ini muncul berkaitan dengan perjuangan para pemuda tahun 1950an yang pada saat itu sedang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Walaupun demikian, dapat diketahui bahwa permasalahan kasta juga merupakan sesuatu hal pokok bagi proses demokrasi yang diperjuangkan oleh para pemuda pejuang saat itu.

---

<sup>6</sup> I Gusti Ngurah Bagus, *Bali in The 1950s : Role The Pemuda Pejuang in Bali Political Process*, Dalam Hildred Geertz Ed), *State and Society in Bah*, Leiden : KITLV Press, 1991, Hal. 202.

Hal lain yang diungkap oleh Jean Couteau<sup>7</sup> pada tulisannya "Bali di Persimpangan Jalan : Transformasi Struktural Masyarakat Bali" dimana status kasta dan warga kini menyelubungkan kenyataan bahwa stratifikasi sosial Bali sedang bergeser dari stratifikasi yang berdasarkan "*inherited status*" (kasta, peringkat/warga) ke stratifikasi yang berdasarkan "*achieved status*" (kelas). Keanggotaan di dalam stratifikasi lama telah menjadi alat di dalam pertarungan kelas modern. Dan ditambahkan pula bahwa stratifikasi tersebut turut mewarnai tatanan politik secara variabel. Untuk lebih jauhnya fokus tulisan Jean Couteau ini memang tidak mempermasalahkan kasta, namun setidaknya dapat dilihat bahwa dalam perkembangan sekarang ini terjadi pula perubahan dalam fungsi kasta pada masyarakat Hindu di Bali. Nada lain datangnya dari tulisan Clifford Geertz dalam "Tafsir Kebudayaan" diungkapkan seperti di India, sistem Varna terdiri atas empat kategori besar, masing-masing adalah Brahmana, Ksatria, Waysia dan Sudra. Keempatnya diperingkatkan dalam susunan prestise yang berjenjang ke bawah, tiga yang pertama (di Bali disebut Triwangsa) mendefinisikan kehormatan spiritual yang melampaui kategori keempat yang kasar. Tetapi di Bali sistem warna tidak pada dirinya, melainkan sebuah sarana kultural untuk membuat deskriminasi-deskriminasi yang dibuat oleh sistem gelar.<sup>8</sup> Tulisan Geertz menggambarkan pada perbedaan

---

<sup>7</sup> Jean Couteau, ..... hal. 48

<sup>8</sup> Clifford Geertz, "Tafsir Kebudayaan". (Yogyakarta : Kanisus, 1992), hal. 111.

fungsi warna (India : varna) yang berlaku di India dan di Bali, sungguhpun demikian fokus tulisannya tidak mempermasalahkan kasta lebih lanjut.

Tulisan lain dari Raka Santeri dalam "Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad : Kesalahpahaman Kasta di Bali"<sup>9</sup> mengungkapkan pada tahun 1925 golongan Sudra yang menamakan diri mereka 'Jaba', membuat buletin sebagai reaksi kepada apa yang telah diperbuat golongan Triwangsa dengan buletinnya yang bertujuan untuk mempertahankan status sosial mereka di masyarakat. Tujuan dari golongan Sudra untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat sesuai dengan kemajuan zaman. Pembaharuan tersebut membuat persamaan hak yang sama antara golongan Triwangsa dan golongan Sudra/Jaba dalam bidang perlakuan hukum, golongan ini tidak ingin dianggap warga kelas dua yang selalu rendah kedudukannya dalam masyarakat dan hukum. Selain dari itu, golongan Sudra/Jaba juga menuntut agar pemerintah mengadakan penilaian yang adil terhadap calon pegawai tanpa memandang kasta mereka, akan tetapi berdasarkan kepandaian dan pendidikan yang mereka peroleh. Fokus tulisan Raka Santeri ini banyak mempermasalahkan kasta, mulai dari gambaran struktur masyarakat Bali sampai pada lapisan sosialnya.

---

<sup>9</sup> Raka Santeri, "Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad : Kesalahpahaman Kasta di Bali", (Denpasar : Yayasan Dharma Narada, 1993), hal. 110-111.

Sementara Ketut Wiana dalam "Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad : Catur Warna Dalam Agama Hindu" mengulas ungkapan dari I Gusti Agung Gde Putra yang mana ditegaskan bahwa kasta-kasta dengan segala macam titelnya yang dijumpai sekarang di Bali adalah suatu anugerah kehormatan yang diberikan oleh "Dalem" (Penguasa Daerah Bali) karena jasa-jasanya dan kedudukannya dalam bidang pemerintahan atau negara maupun di masyarakat. Dan hal ini diwarisi secara turun-temurun oleh anak cucunya yang dianggap sebagai hak, walaupun tidak lagi memegang jabatan tersebut. Untuk ini jangan dicampur adukan soal titel ini dengan agama, karena titel ini persoalan masyarakat, persoalan jasa, persoalan jabatan yang dianugerahkan oleh raja pada zaman dahulu. Dalam agama, bukan kasta yang dikenal, melainkan warna atau lebih dikenal dengan "catur warna" yang membagi manusia atas tugas-tugas (fungsi) yang sesuai dengan bakatnya. Dan pembagian ini berlangsung sepanjang zaman.<sup>10</sup> Fokus tulisan Ketut Wiana ini juga mempermasalahkan kasta, mulai dari pengertian warna menurut Hindu, kaburnya warna dengan kasta sampai pada gambaran catur warna dan profesionalisme.

Selanjutnya Nyoman Naya Sujana pada dua tulisannya, yang pertama dengan judul "Bali di Persimpangan Jalan : Orang-orang Bali di Luar Bali Beserta Kebudayaannya" menjelaskan bahwa kasta itu

---

<sup>10</sup> Ketut Wiana, "Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad : Catur Warna Dalam Agama Hindu", (Denpasar : Yayasan Dharma Naradha, 1993), hal. 32.

menimbulkan fenomena jarak sosial dan pemisahan (*social distance and segregation*), hirarki (*jarak vertikal*), penghindaran (*avoidance*), dan bahkan eksploitasi (*social exploitation*). Gambaran yang dikemukakan oleh Naya Sujana tersebut tidak banyak mengungkap permasalahan kasta, karena fokus dari tulisannya lebih jauh menggambarkan bagaimana sikap dan perilaku orang-orang Bali di luar Bali.<sup>11</sup> Sementara dalam tulisannya yang kedua dengan judul "Memahami Potensi Konflik Dalam Masyarakat Bali" diungkapkan bahwa potensi konflik yang telah bermakna klasik adalah yang berakar dari masyarakat Bali atau Hindu yang mengenal kasta, dalam arti golongan sosial yang tertutup. Kesenjangan antar kasta dan kesombongan diri atas kelompok lain telah menjadi sumber konflik laten dalam masyarakat Bali. Diakui atau tidak, potensi konflik terjadi antara kelompok Triwangsa dengan kelompok Sudra.<sup>12</sup> Dan nada lain dari hasil penelitian Suastawa Dharmayuda, SH. Staf pengajar Universitas Udayana yang diungkapkan pada suatu seminar dengan thema "Eksistensi Beberapa Lembaga Adat Dalam Hubungannya Dengan Perkembangan Masyarakat Dewasa Ini", dalam makalah berjudul "Perkawinan Berbeda Wangsa" dijelaskan bagaimana legitimasi negara dalam hal ini lembaga pengadilan dan lembaga adat yang sama-sama dapat memberikan keputusan atau melegitimasi pada perkawinan berlainan kasta yang istilah Bali disebut

<sup>11</sup> Nyoman Naya Sujana, "*Bali di Persimpangan Jalan - Orang-orang Bali di Luar Bali Beserta Kebudayaannya*", (Denpasar : NusaData IndoBudaya, 1995), hal. 76.

<sup>12</sup> Nyoman Naya Sujana, "Memahami Potensi Konflik Dalam Masyarakat Bali", Bali Post, Edisi 14 Januari 1997.

"nyeburin" sekaligus mensyahkan pula kepada keberadaan anak turunannya kepada siapa anak tersebut berstatus hukumnya. Karena dalam penelitian ini, permasalahan yang timbul adalah karena "nyeburin" berstatus hukum laki-laki (*sentana rajeg*).<sup>13</sup>

Bertolak dari hasil penelitian dan beberapa tulisan mengenai permasalahan kasta, kajian-kajian yang lebih mendekati pada rencana penelitian adalah tulisan dari Ketut Wiana, Raka Santeri, dan Nyoman Naya Sujana. Kajian-kajian ketiga penulis tersebut memberikan gambaran tentang interaksi antara golongan kasta, namun tidak secara khusus mengangkat permasalahan perubahan simbol-simbol pada warga kasta berbeda di dalam mengadakan interelasi. Untuk itu diperkirakan penelitian yang menekankan pada perubahan simbol-simbol di dalam berinterelasi antara warga kasta berbeda di lingkungan banjar di Bali, nampaknya belum pernah ada yang melakukan. Dengan pertimbangan ini pulalah yang mendorong untuk mengadakan penelitian guna mengungkap berbagai masalah yang berkaitan dengan perubahan simbol-simbol perilaku pada warga kasta berbeda di dalam mengadakan interelasi di lingkungan banjar di Bali. Selain itu yang menjadi daya tarik dari berbagai permasalahan yang menyangkut kasta di Bali tersebut adalah tidak menjadikannya sebagai pengganggu atas kestabilan, keamanan, dan ketertiban daerah setempat,

---

<sup>13</sup> Suwastawa Dharmayuda, SH., "Perkawinan Berbeda Wangsa". Bali Post Edisi 30 Desember 1992. Denpasar.

padahal dari berbagai fenomena yang ada nampaknya persoalan tersebut cukup serius untuk ditangani berbagai pihak termasuk tentunya penanganan oleh negara. Dan selama ini belum pernah ada persoalan tersebut yang muncul ke permukaan setelah periode 1950an, dimana saat itu persoalan yang menyangkut golongan kasta sempat diangkat menjadi persoalan pokok pada badan legislatif. Sementara di kalangan masyarakat yang berbeda golongan tersebut kerap kali terjadi persoalan, entah itu yang menyangkut berbagai kepentingan kehidupan sosial dalam keseharian atau bahkan melingkup pada persoalan politik yang menjurus deskriminatif. Karena disinyalir, bahwa ada sebagian dari kaum Triwangsa ternyata masih "tidak menghendaki" kaum Sudra/Jaba menjadi pemimpin di berbagai instansi pemerintahan, apalagi sebagai pemimpin yang menguasai daerah seperti gubernur misalnya. Untuk itu sampai saat ini memang belum ada yang menjabat gubernur dari kalangan Sudra/Jaba.

Kajian tentang interelasi antar warga kasta berbeda di lingkungan banjar baik adat maupun dinas di Bali menarik untuk dilakukan, karena bukan saja berkait dengan masalah politik, sosial, budaya dan agama akan tetapi juga permasalahan ekonomi. Apabila menyimak slogan pemerintah negara Republik Indonesia akan kesatuan dan persatuan bangsa sangat ditekankan untuk tetap menjaga negara aman dan stabil dari berbagai rongrongan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Hal tersebut tidak terkecuali permasalahan dalam intern etnis, karena bagi negara yang paling ditakutkan adalah akan merembet pada hal-hal yang

akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Untuk itu dalam penelitian yang dilakukan disini, peneliti akan melihat secara jelas bagaimana perubahan simbol-simbol yang terdapat pada warga kasta berbeda di dalam berinterelasi dalam komunitas kecil seperti banjar, karena selama ini penelitian maupun tulisan yang ada hanya memberikan gambaran sepintas tentang hal tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dalam penelitian yang dirancang menggunakan analisis kualitatif ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan utama secara empiris sebagai berikut :

1. Perubahan simbol-simbol yang bagaimana terdapat pada warga kasta berbeda di lingkungan Banjar Adat dan Banjar Dinas tersebut ?
2. Mengapa perubahan itu terjadi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan simbol-simbol antar warga kasta berbeda di lingkungan Banjar Adat dan Banjar Dinas di dalam mengadakan interelasi. Dengan melakukan eksplorasi, deskripsi, serta mencari keterkaitan masing-masing peristiwa yang berhubungan dengan situasi sosial, politik dan agama. Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk dapat mendeskripsikan perubahan simbol-simbol yang terjadi pada warga kasta berbeda di lingkungan Banjar tersebut di dalam berinterelasi.
2. Untuk dapat mendeskripsikan faktor apa yang menjadikan perubahan simbol-simbol tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka melalui penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan teoritis berupa tambahan khasanah keilmuan dalam studi ilmu-ilmu sosial, khususnya politik lokal di daerah Bali.
2. Bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyangkut warga kasta di lingkungan banjar di Bali, baik Banjar Adat maupun Banjar Dinas.
3. Dapat dijadikan sarana dalam rangka memberikan masukan kepada masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan mengenai interelasi antara warga kasta berbeda pada banjar di Bali yang di dalamnya terdapat serangkaian hubungan antara sosial, politik dan agama.

Sementara bagi peneliti sendiri, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengadakan pengkajian lebih lanjut sebagai pengabdian dan pengembang ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu-ilmu sosial di masa yang akan datang.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Sistem Kasta dan Kelas Pada Masyarakat

Istilah kasta tidak terlepas dari kedudukan dan peran seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Kasta menurut Josephs Roucek dan Roland L. Waren<sup>14</sup> adalah kelas sosial yang keanggotaannya ditentukan hanya melalui kelahiran dan tidak pernah mengenal mobilitas sosial vertikal. Dan ditambahkannya bahwa sistem kasta tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) Seseorang berada terus tetap dalam kasta di mana ia dilahirkan; (2) Seseorang hanya dapat kawin dengan orang-orang dari kalangan kastanya; dan (3) Peraturan yang ketat mengenai hubungan membatasi interaksi di kalangan orang-orang dalam kasta-kasta sosial yang berlainan. Sementara menurut Koentjaraningrat<sup>15</sup> mengemukakan didalam mengomentari sistem kasta di India, bahwa menurut para sarjana sistem kasta itu merupakan suatu sistem pelapisan sosial yang mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut : (1) keanggotaan dalam kasta berdasarkan kelahiran; (2) perkawinan dengan orang luar kasta dilarang dengan pantangan yang berdasarkan hukum dan agama; (3) pergaulan dengan kasta-kasta lebih rendah terlarang keras dengan pantangan-pantangan yang berdasarkan hukum atau agama. Terutama ciri-ciri yang termaktub

---

<sup>14</sup> Joseph S. Roucek dan Roland L. Waren, *"Pengantar Sosiologi"*. (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hal. 83-84.

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *"Beberapa Pokok Antropologi Sosial"*. (Jakarta : Dian Rakyat, 1992), al. 191.

dalam point (3) amat tampak dalam kenyataan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ditambahkan oleh Koentjaraningrat pembatasan paham serupa tidak hanya masyarakat India mempunyai sistem kasta, tetapi juga masyarakat di negara Amerika Serikat, tempat adanya pemisahan keras (*segregation*) antara lapisan orang kulit putih (*whites*) dan lapisan warga negara keturunan Afrika (*negroes atau coloreds*), sedangkan sistem pemisahan keras (*apartheid*) antara lapisan orang kulit putih dan lapisan penduduk pribumi dalam negara masyarakat Uni Afrika Selatan itu juga dapat disebut sistem kasta. Yang mana sifat dari sistem lapisan masyarakat tersebut merupakan sistem masyarakat tertutup (*closed social stratification*) yakni tidak memungkinkan seseorang pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam kelompoknya adalah kelahiran.

Gambaran sistem kasta yang sangat kompleks di dalam kehidupan masyarakatnya yang selalu menjadi bahasan para sarjana manakala membicarakan tentang perbedaan lapisan yang berlaku pada masyarakat adalah sistem kasta yang terdapat di India. Hal ini terjadi karena sistem kasta di India sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, istilah untuk kasta dalam bahasa di India adalah *jati*. Menurut masyarakat India Kuno terdapat empat kasta atau lebih dikenal dengan istilah *varna* yang tersusun berlapis dari atas ke bawah sebagai berikut : Brahmana,

Ksatriya, Vaicya dan Cudra. Kasta *Brahmana* adalah kasta dari orang-orang pendeta, dan di pandang sebagai lapisan tertinggi; kasta *Ksatriya* adalah kasta dari orang-orang bangsawan dan tentara, dan di pandang sebagai lapisan kedua; kasta *Vaicya* adalah kasta orang-orang pedagang, dan merupakan lapisan menengah; sedangkan kasta *Cudra* sebagai kasta dari rakyat jelata, merupakan kasta bawahan; akhirnya orang *Paria* adalah lapisan orang najis yang tidak berkasta samasekali, oleh karena itu tidak termasuk sistem *varna*.

Berlakunya faham kasta yang berbeda pada masyarakat yang terdapat di negara seperti India, Amerika Serikat, Afrika Selatan (saat apartheid masih berlaku), dan negara lainnya yang menganut faham sejenis, adalah merupakan gambaran lapisan masyarakat yang di dalam kehidupan sehari-harinya dibatasi oleh pagar status atau kelas yang berlaku pada masyarakat lingkungannya. Di mana kedudukan sosial seseorang sangat menentukan kapasitasnya sebagai seorang yang memiliki kelas tertentu sebagaimana disampaikan oleh Joseph Schumpeter<sup>16</sup> yang disadur Soerjono Soekanto dalam Sosiologi Suatu Pengantar bahwa terbentuknya kelas dalam masyarakat karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata, akan tetapi makna kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar" (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 286.

Kelas sosial (*social class*) adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedang kedudukan mereka tersebut diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Adalah Kurt. B. Mayer<sup>17</sup> yang disadur oleh Soerjono Soekanto dalam Sosiologi Suatu Pengantar berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang bersandarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan (*status group*). Selanjutnya dikatakan bahwa harus diadakan pembedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan tersebut. Sedangkan Max Weber mengadakan pembedaan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial, akan tetapi dia tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis dibaginya lagi dalam kelas yang bersandarkan atas pemilikan tanah dan benda-benda, serta kelas yang bergerak dalam ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Di samping itu Max Weber masih menyebutkan adanya golongan yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat dan dinamakannya *stand*.

Apabila menyimak permasalahan kasta hubungannya dengan kelas yang terdapat pada masyarakat, memang tidak dapat dipungkiri apabila faham kasta dilihat dari kacamata adat-istiadat (secara tradisional) yang berlaku adalah merupakan kedudukan yang menentukan seseorang di

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, "Sosiologi ..... hal. 285-286.

tengah masyarakatnya. Soerjono Soekanto<sup>18</sup> memberikan pengertian kelas apabila ditinjau lebih mendalam maka akan muncul beberapa kriteria sebagai berikut : (1) besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya; (2) kebudayaan yang sama, yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya; (3) kelanggengan; (4) tanda-tanda/lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri khas; (5) batas-batas yang tegas (bagi kelompok itu terhadap kelompok lain); dan (6) antagonisme tertentu. Sementara mengikuti pandangan ekonomi sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ahli, kasta tidak secara absolut menentukan kelas seseorang, karena pandangan ini lebih berorientasi pada nilai kepemilikan (kekayaan, kebendaan). Tegasnya pandangan ekonomi menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat sekaligus kelas sosialnya.

## 2. Kasta dan Sistem Sosial di Bali

Masyarakat Bali, khususnya masyarakat yang beragama Hindu tidak dapat terlepas dari sistem sosial yang bersifat hirarkhis berupa sistem kasta, walaupun istilah kasta yang dimaksud tidak lagi seirama dengan pengertian yang harus dipahami sesuai maksud dan tujuan agama Hindu. Dalam perkembangannya sistem kasta ini menciptakan perbedaan lapisan sosial pada masyarakat Bali. Kasta memiliki konsepsi dasar yang amat berbeda dengan warna, kasta yang dimaksud adalah berasal dari bahasa

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, "Sosiologi ..... hal. 286.

Portugis yaitu "Caste" yang artinya tingkatan-tingkatan. Kasta adalah stratifikasi masyarakat India yang merupakan produk sosial historis pada zaman lampau. Kasta membagi masyarakat menjadi empat golongan secara vertikal genealogis, kasta Brahmana tertinggi, Ksatria golongan kedua, Waisya dan Sudra kasta yang paling rendah. Bahkan di India dikenal ada satu kasta lain yakni kasta Paria sebagai kasta Candala, artinya orang cacat (anak haram - anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak menikah sah).<sup>19</sup>

Sampai pada abad ke dua puluh ini masyarakat India boleh dikatakan masih ada yang berpandangan tradisional, menjadikan kasta sebagai pegangan hidupnya di tengah masyarakatnya. Jika wanita kasta Brahmana dikawin oleh laki-laki kasta Sudra, diapun dapat dikucilkan dari masyarakat, bahkan di desa-desa konon sampai dikenai hukuman jasmani. Tetapi mereka-mereka yang sudah berpikir modern, tidak lagi memandang kasta itu sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam perilaku sosial. Di India pergeseran antara pandangan yang tradisional dan modern amat kabur, lebih bersifat kasuistis. Hal ini mungkin disebabkan karena India adalah negara sekuler dimana kehidupan beragama sama sekali lepas dari urusan negara, sehingga pandangan-pandangan mengenai agama benar-benar amat liberal dan keberadaannya amat tergantung pada peranan tokoh-tokoh masing-masing. Di kalangan masyarakat Hindu yang modern, telah terjadi

---

<sup>19</sup> Ketut Wiana, *Kasta* ..... hal. 18

iklim yang bebas dalam mendalami Weda. Weda tidak lagi dipelajari oleh kalangan Brahmana saja melainkan sudah banyak dipelajari oleh golongan Sudra bahkan diantaranya sudah menjadi para ahli.

Kebangkitan untuk kembali kepada konsep Catur Warna sebagaimana dimaksudkan oleh kitab suci Hindu sudah sejak lama berlangsung di India. Misalnya pada tahun 1825 gerakan seorang Brahmana Agung yang bernama Swami Dayananda,<sup>20</sup> telah mengembangkan pandangan dan pemikiran untuk kembali kepada Weda. Seseorang baru diberikan tali *upawita* atau *tali suci* lambang kebrahmanaan setelah orang tersebut benar-benar mempelajari dan melaksanakan Weda.

Di Bali sistem pelapisan sosial mengalami sejarah pertumbuhannya sendiri. Sistem pelapisan sosial masyarakat Bali yang beragama Hindu disebut *Wamsa*, yang oleh masyarakat luas lebih dikenal dengan *Wangsa*. Walaupun *wangsa* dan *kasta* itu sama-sama bukan ajaran Hindu, namun di Bali *wangsa* pada kenyataannya tidak setajam *kasta* di India. Ada persamaan dengan India, bahwa *wangsa* di Bali membedakan masyarakat berdasarkan keturunannya. Dalam sistem *wangsa* ada satu keturunan yang dipandang lebih rendah. Demikian pula ada kelompok keturunan yang secara tradisional mendapatkan hak-hak istimewa terutama dalam pergaulan adat.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Ketut Wiana, *Kasta* ..... hal. 20.

<sup>21</sup> Ketut Wiana, *Kasta* ..... hal. 21.



Kaburnya *Warna* dan *Kasta* terjadi karena perkembangan sedemikian rupa dalam masyarakat, terutama karena telah banyak dipergunjingkan masyarakat khususnya masyarakat non-Hindu. Dimana sistem warna dikaburkan dengan sistem kasta, mereka umumnya hanya melihat kenyataan-kenyataan pahit yang dialami oleh umat Hindu dalam sejarah sosialnya, dan bukan meneliti ajaran Hindu itu sendiri, bahkan tidak sedikit ada buku-buku yang ditulis oleh para cendekiawan baik orang Hindu maupun yang non-Hindu memberikan pandangan yang menyedihkan mengenai *warna* dan *kasta* ini.

Ketut Wiana mengungkapkan bahwa pengertian Catur Warna dalam kitab-kitab sejarah sering dicampur- adukkan dengan pengertian kasta,<sup>22</sup> ini diakibatkan karena istilah-istilah dalam Catur Warna hampir sama dengan istilah-istilah dalam kasta. Kemudian ketaatan warna Sudra kepada warna Brahmana, misalnya seolah-olah terjadi karena perbedaan kelas, tidak dilihat dari fungsi sosialnya di masyarakat Hindu. Dalam berbagai hal untuk mengetahui lebih jauh tentang sistem wangsa ini, kemungkinan harus dilihat dulu Bali di masa pertengahan yakni tahun 1350 Masehi dimana ketika itu Sri Kresna Kepakisan yang diangkat oleh Mahapatih Gajahmada menjadi raja Bali bersama para Arya Majapahit yang memerintah menciptakan wangsa-wangsa, yang kemudian dikelompokkan sebagai "Ksatria" dan "Wesya" dalam sistem kasta. Sedang

---

<sup>22</sup> Ketut Wiana, *Kasta* ..... hal. 30.

Danghyang Nirartha (kemudian bergelar Pedanda Sakti Wawu Rawuh) dan Danghyang Astapaka, menurunkan wangsa Brahmana, yang kemudian juga dikelompokkan ke dalam "kasta Brahmana". Sementara keturunan raja dan Ksatria Bali Aga yang dikalahkan, nyaris tidak berhak menyandang ke tiga "kasta" tersebut, kecuali mereka yang diperlukan wibawanya dalam menegakkan stabilitas pemerintahan yang baru. Tetapi mungkin juga seperti masyarakat Bali Aga pada umumnya, keturunan raja dan ksatria Bali Aga itu tetap menolak sistem "kasta". Mereka dikelompokkan sebagai "Sudra" yang kemudian menyebut diri mereka sendiri sebagai "Jaba" (*luar*), yang berarti golongan di luar "kasta" Brahmana, Ksatria, dan Wesya.<sup>23</sup>

Dalam kenyataannya, masyarakat Bali hanya mengenal tiga jenis pelapisan sosial secara vertikal-tradisional, yaitu : Brahmana, Ksatria, dan Jaba. Tetapi mungkin untuk menyesuaikan dengan pembagian sistem warna, ada yang menyebut para "Ksatria" di luar "Satria Dalem" (keturunan raja-raja dinasti Kresna Kepakisan) sebagai kasta Wesya.<sup>24</sup> Selain ada penguatan dari hukum adat, ada kemungkinan sistem wangsa tercipta sebagai wujud percampuran budaya antara tradisi Majapahit yang otokratis dengan tradisi Bali Aga yang lebih demokratis-paternalistis, serta memiliki kepercayaan kuat terhadap penyembahan leluhur. Ikatan warga-warga ke dalam satu Pura Kawitan sebagai pusat penyembahan leluhur. Dikatakan oleh Fred Eisman yang disadur oleh Ketut Wiana dimana ia membedakan

---

<sup>23</sup> Ketut Wiana, *Kasta* ..... hal. 98.

<sup>24</sup> Ketut Wiana, *Kasta* ..... hal. 99-100.

wangsa dengan warga. Wangsa adalah keturunan, atau garis silsilah. Sedang warga berarti "keluarga" atau "clan". Dari keterangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wangsa dan warga sesungguhnya memiliki pengertian yang hampir sama. Namun dalam konteks sosial di Bali, wangsa lebih mengacu pada kelompok "kasta". Sedang warga pada kelompok "keturunan". Kemudian ditambahkan pula oleh Wiana, bahwa memang benar sistem wangsa berangsur-angsur tumbuh menjadi semacam sistem kasta, seperti berubahnya sistem warna di India. Hanya jika di India bangsa bangsa pendatang Arya yang memonopoli kasta-kasta lebih tinggi, maka di Bali kaum pendatang elite Majapahit-lah yang memonopoli kasta-kasta lebih tinggi itu. Di sini berlaku teori bahwa kaum penguasa cenderung tetap mempertahankan kekuasaannya (status quo) dengan segala cara yang bisa mereka lakukan. Biasanya cara-cara mempertahankan kekuasaan seperti itu dibungkus atau dikaitkan dengan nilai-nilai kebenaran yang bersifat umum. Dalam hal wangsa, kaitannya dibungkus dengan sistem warna yang telah diterima umat Hindu sebagai suatu kebenaran bersifat umum.<sup>25</sup>

### **3. Kasta dan Status Kelas di Lingkungan Banjar**

Kedudukan atau status menciptakan perbedaan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Secara vertikal adalah bahwa perbedaan menekankan pada aspek tinggi rendahnya kedudukan sehingga tercipta adanya tingkatan dalam kedudukan, akan mewujudkan gejala stratifikasi

---

<sup>25</sup> Ketut Wiana, *Kasta* ..... hal. 101.

sosial atau pelapisan sosial. Dalam gejala seperti ini ada kecenderungan bahwa orang-orang yang tergolong ke dalam lapisan tertentu memiliki pola hidup tertentu yang berbeda dengan lapisan lainnya, baik menurut persepsi orang-orang dari dalam lapisan yang bersangkutan maupun menurut pandangan warga suatu komunitas. Sementara perbedaan horizontal adalah perbedaan yang menekankan pada aspek jenis kedudukan satu terhadap yang lain sehingga menciptakan defrensiasi sosial.

Menurut Sorokin,<sup>26</sup> pada umumnya pelapisan sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari : (1) Pemilikan atas kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran; artinya strata dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari nilai kekayaan seseorang dalam masyarakat; (2) Status atas dasar fungsi dalam pekerjaan, misalnya sebagai dokter, dosen, buruh atau pekerja teknis dan sebagainya semua ini sangat menentukan status seseorang dalam masyarakat; (3) Kebolehan seseorang dalam beragama, jika seseorang sungguh-sungguh penuh dengan ketulusan dalam menjalankan agamanya, maka statu seseorang tadi akan dipandang lebih tinggi oleh masyarakat; (4) Status atas dasar keturunan, artinya keturunan dari orang yang dianggap terhormat (bangsawan) merupakan ciri seseorang yang memiliki status tinggi dalam masyarakat; (5) Latar belakang rasial dan lamanya seseorang atau sekelompok orang tinggal pada suatu tempat. Pada umumnya seseorang

---

<sup>26</sup>Abdul Syani. "*Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*". (Jakarta : Pustaka Jaya, 1995). hal 73-74.

sebagai pendiri suatu kampung, biasanya dianggap masyarakat sebagai orang yang berstatus tinggi, terhormat dan disegani; dan (6) Status atas dasar jenis kelamin dan umur seseorang. Pada umumnya seseorang yang lebih tua umurnya lebih dihormati dan dipandang tinggi statusnya dalam masyarakat. Begitu juga jenis kelamin; laki-laki pada umumnya dianggap lebih tinggi statusnya dalam keluarga dan masyarakat.

Masyarakat menurut Soetandyo yang seiring dengan Soerjono Soekanto<sup>27</sup> pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu : *Ascribed status*, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. *Achieved status*, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Di tambahan oleh Soerjono Soekanto, kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan yaitu *assigned-status*, yang merupakan kedudukan yang diberikan. *Assigned-status* tersebut sering mempunyai hubungan yang erat dengan *Achieved-status* dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa,

---

<sup>27</sup> Soejono Soekanto. "Sosiologi ..... hal. 288.

yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Eksistensi sistem pelapisan dalam suatu masyarakat dapat terwujud secara tegas dan dapat pula terwujud secara samar. Pelapisan sosial yang tegas dalam suatu masyarakat adalah suatu sistem pelapisan yang sudah jelas, dimana warga dari suatu lapisan tersebut mendapat sejumlah hak dan kewajiban yang terkemas kedalam adat dan yang dilindungi oleh hukum adat atau hukum lain yang berlaku. Pelapisan sosial tersamar adalah sistem pelapisan yang biasanya baru merupakan anggapan yang lahir dalam suatu masyarakat, belum diikuti oleh hal-hal yang mewarnainya secara jelas dan konkret dan karena itu belum terkemas kedalam adat. Stratifikasi sosial pada masa lalu dalam kehidupan komunitas-komunitas di Bali rupanya juga mengandung ciri-ciri yang dapat dikategorikan sebagai sistem stratifikasi yang tegas dan yang samar tersebut.

Dasar keturunan sebagai dasar stratifikasi sosial pada masyarakat Bali tampak pada sistem pelapisan menurut kasta. Dasar ini adalah merupakan hasil proses akulturasi antara sistem kasta yang berakar pada agama dan kebudayaan Hindu dengan sistem kekerabatan orang Bali yang berdasarkan prinsip keturunan patrilineal. Atas dasar seperti itu, kedudukan orang Bali dalam suatu kasta tertentu, ditentukan dan diturunkan melalui kasta ayahnya, bila ayahnya Brahmana, maka anaknya

berkasta Brahmana, Ksatria anaknya Ksatria, Weisya anaknya Weisya, demikian pula dengan Sudra/Jaba anaknya adalah Sudra/Jaba.

Masyarakat Bali sebagaimana dijelaskan oleh Clifford Geertz dalam tulisannya *Tafsir dan Kebudayaan*<sup>28</sup> mendefinisikan masyarakat Bali dengan enam macam label yang dapat dikenakan seseorang sebagai individu yang unik. Keenam label tersebut : (1) nama-nama pribadi; (2) nama-nama urutan kelahiran; (3) istilah-istilah kekerabatan; (4) teknonim-teknonim/*teknonyms*; (5) gelar-gelar status (biasanya disebut dengan nama kasta dalam kepustakaan tentang Bali); (6) gelar-gelar publik, yang maksudnya gelar-gelar kuasi-konseptual yang dikenakan oleh para pemimpin, para penguasa, para pedanda, dan dewa-dewa. Ditambahkan budi bahasa masyarakat Bali diperkembangkan sangat tinggi dan secara ketat mengatur permukaan luar tingkah laku sosial sungguh melampaui seluruh bidang kehidupan sehari-hari. Gaya tutur, postur, pakaian, makan, perkawinan, bahkan konstruksi bangunan, pekuburan, dan cara pembakaran mayat dipolakan menurut tingkah laku yang ada yang berlaku pada kehidupan masyarakat Bali.

Sementara Pathiana menyebutkan bahwa masyarakat Bali terikat dalam kerabat-kerabat atau klen (*clan*) yang disebut *dadia*. Didalam *dadia* ini mereka merasakan bahwa mereka berasal dari satu asal-usul atau keturunan, dengan ditandai oleh adanya satu tempat pemujaan leluhur yang

---

<sup>28</sup> Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 156

disebut kawitan, sanggah pemugeran, yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh anggota *dadia* tersebut.<sup>29</sup> Secara utuh kehidupan tersebut dapat dilihat dalam lingkungan banjar, baik yang berkaitan dengan masalah kedudukan warga dengan kastanya yang masih melekat maupun dengan pola perkawinan yang berlaku di kalangan warga kasta tersebut. Ditambahkan pula oleh Pathiana bahwa untuk mempertahankan *dadia*-nya mereka melakukan perkawinan endogami atau perkawinan ke dalam yang maksudnya untuk tetap menjaga keutuhan ruang lingkup *dadia*-nya sehingga kelangsungan *dadia* tersebut bisa lebih terjamin. Di samping itu menjaga untuk tidak anggota keluarganya terutama pihak perempuan terjebak kedalam perkawinan dengan kalangan kasta yang lebih rendah, apabila hal tersebut terjadi di kalangan kasta Triwangsa. Namun demikian, meskipun di Bali dianut perkawinan endogami, bukan berarti perkawinan eksogami dilarang. Bahkan perkawinan antar kasta pun saat ini kerap kali terjadi walau tidak ada istilah "diperbolehkan".

Dalam perkembangannya pada masyarakat dan kebudayaan Bali masa kini yang tengah berada dalam kondisi modern, mereka yang termasuk dalam golongan Triwangsa masih sulit untuk menerima keberadaan wangsa Sudra apabila terjadi pertalian perkawinan diantara mereka, terutama apabila yang berkasta Sudra tersebut adalah pihak lelakinya. Walaupun ada, penyesuaiannya membutuhkan proses dan

---

<sup>29</sup> Wayan Parthiana. *Kepribadian* ..... Hal. 238-239.

penyelesaian yang cukup panjang. Perkawinan antar kasta atau yang di Bali sering disebut dengan *Alangkahi Karang Hulu dan Asu Pundung*<sup>30</sup> yang mengandung arti bahwa perkawinan tersebut si wanita berasal dari Triwangsa, sedangkan yang laki-laki dari wangsa Sudra/Jaba.

Pada masa sebelumnya di beberapa desa dan banjar di Bali, orang-orang dari kasta yang tergolong dari kalangan kasta Triwangsa mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang tidak bisa diganggu gugat dan bersifat turun-temurun. Misalnya, mereka boleh tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan banjar yang bersifat gotong-royong baik yang hanya bersifat kemasyarakatan biasa, maupun ada hubungannya dengan keagamaan. Kini orang Bali menyadari bahwa manusia itu adalah sama dan sederajat. Anggota banjar yang sekaligus juga anggota desa dari golongan Sudra menghendaki dan menuntut supaya orang-orang dari kalangan Triwangsa pun harus juga turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dahulu merupakan hak istimewa dan kekebalan bagi mereka. Walau demikian, di beberapa desa atau banjar terutama di daerah Kabupaten Buleleng banyak orang-orang dari golongan kasta Triwangsa dengan sukarela untuk melepaskan hak-hak istimewa dan kekebalan yang dahulu menjadi miliknya. Tetapi pada beberapa banjar/desa yang ada di kawasan Bali Selatan, masih ada sebagian orang dari golongan Triwangsa tidak mau melepaskan hak-hak istimewa dan kekebalan yang telah diwarisinya secara

---

<sup>30</sup> I Gede Pitana, ..... hal. 155

turun-temurun. Mereka masih mau mempertahankan dengan alasan bahwa hal itu telah diterimanya secara turun-temurun.

Bagi masyarakat Bali golongan kasta juga menentukan kedudukan mereka di lingkungan dimana mereka berada, seperti halnya di banjar. Kedudukan dengan kasta yang lebih tinggi, bagi mereka yang masih berpegang teguh pada prinsip turunannya akan tetap menuntut kekebalan dan hak-hak sebagaimana yang diterimanya oleh turunan sebelumnya, dengan tidak memperdulikan tuntutan zaman yang sudah mengarah kepada kesetaraan. Tidak jarang orang-orang dari golongan kasta Sudra sering menuntut kebersamaan hak didalam kehidupan bermasyarakat baik secara langsung melalui para klian banjarnya maupun tidak langsung. Dalam hal ini pula sering menjadi kesulitan bagi para klian banjar adat di dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persoalan kasta, apalagi apabila klian banjarnya juga dari kalangan kasta Sudra/Jaba. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menyulut konflik antar warga berbeda kasta. Sebagaimana diketahui bahwa banjar sebagai sub komunitas dari desa tidak terlepas dari kondisi yang melingkupi berbagai masalah berkaitan dengan warga kasta yang berbeda, karena banjar sarat dengan muatan adat dan keagamaan sudah barang tentu tidak terlepas dari konsep hidup yang berlaku pada masyarakat Hindu. Dalam hal ini, kondisi perbedaan kasta pada warga atau krama adalah merupakan permasalahan klasik yang belum sepenuhnya mengalami perubahan yang jelas. Bahkan

pada banjar rawan akan terjadinya konflik-konflik yang menyangkut hubungan antar kasta.

Dalam melihat masalah kasta di lingkungan banjar, selintas tidak terjadi adanya gejala apabila hanya dilihat secara tersamar dari kedudukan atau mungkin kekayaan. Karena apabila itu yang dilihat, golongan Sudra untuk saat ini akan lebih banyak di posisi tersebut, beberapa dari mereka sudah banyak yang berhasil, baik dilihat segi kekayaannya maupun kedudukan dan pangkat mereka di tempat pekerjaannya seperti di kantor pemerintahan. Namun, terlepas dari itu bahwa orientasi masyarakat banjar di Bali pada umumnya lebih pada nilai adat dan keagamaan, maka dengan tegas kedudukan mereka yang Sudra tersebut tetap termasuk lapisan yang ada di bawah golongan Triwangsa.

#### 4. Interelasi

Interelasi menurut kamus bahasa Indonesia<sup>31</sup> mempunyai arti hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dari pengertian tersebut, definisi konsep yang melatar belakangi pengertian yang ada dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan antara warga kasta berbeda pada lingkungan banjar, baik pada banjar adat maupun pada banjar dinas/administrasi. Apabila di dalam kelompok tersebut tersusun anggota

---

<sup>31</sup> Kamus Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka. Jakarta. 1996.

atau lebih dikenal dengan nama krama terdiri dari berbagai kalangan/kasta, maka hubungan antara anggota/krama yang ada tersebut di dalam mengadakan berbagai aktivitasnya akan sangat ditentukan oleh adanya interelasi antara anggota warga kasta berbeda satu dengan yang lainnya dalam kapasitas sebagai anggota/krama banjar yang menaunginya.

Interelasi warga kasta berbeda, mengurai hubungan antara kalangan kasta-kasta yang terbagi antara Triwangsa dan Sudra/Jaba yang terdapat pada lingkungan banjar, baik banjar adat maupun banjar dinas. Sementara interelasi dimaksud adalah dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh warga/krama yang ada dalam satu lingkungan banjar. Pada umumnya proses interelasi berjalan sebagaimana mestinya, dimulai dengan kesadaran akan keberadaan masing-masing status kasta apa yang disandangnya, sampai pada apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga/krama banjar dan sekaligus sebagai warga negara. Dalam hal ini aktivitas warga kasta yang berbeda

Di dalam melakukan interelasi antar warga berbeda kasta, tampak nilai kepatuhan pada norma-norma adat dan agama yang berlaku, walau keberadaan antara warga/krama satu dengan yang lainnya terikat oleh peraturan-peraturan dan aturan main masing-masing kelompok/golongan yang di dalam melakukan berbagai aktivitasnya sangat membatasi ruang lingkup hubungan yang ada. Secara umum nilai hubungan yang berlaku di dalam bermasyarakat warga kasta yang berbeda tersebut tidak dipisahkan oleh jargon-jargon yang berlaku, namun pada hal yang

prinsip dalam hal ini nilai-nilai adat yang berlaku pada masing-masing golongan/kasta menyebabkan perbedaan-perbedaan menyolok sehingga memisahkan kepentingan yang dinilai pada kehidupan bermasyarakat di lingkungan banjar, di mana nilai kebersamaan itu biasanya terlihat jelas, karena sebagaimana diketahui kehidupan di dalam lingkungan lembaga ini masyarakat sebagai warga/krama baik warga adat maupun warga dinas dihadapkan kepada kepentingan yang saling bertautan. Perbedaan faham/prinsip yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Bali khususnya pada komunitas banjar mempengaruhi nilai kehidupan bermasyarakat, untuk itu dampaknya pada proses interelasi juga sangat besar. Hal ini menggambarkan betapa nilai komunikasi diantara warga perlu dibangun lewat pendekatan antar kepentingan yang dikemas dalam jargon-jargon baru yang pada intinya perbedaan yang ada tidak menghalangi sosialisasi antar warga di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga apa yang menjadi keputusan bersama akan menjadi pedoman di dalam menjalankan pola kehidupan di lingkungan banjar.

Di samping hal yang disebutkan di atas, tidak terlepas pula dari kondisi berkembangnya pola pikir yang di pandang lebih maju di dalam menyesuaikan perkembangan zaman yang banyak menuntut pada pola-pola kehidupan yang demokratis, di mana pandangan tersebut menekankan pada nilai kebersamaan tanpa ada perbedaan yang prinsip, karena menurut pandangan ini interelasi antar warga tidak akan berjalan mulus tanpa kebersamaan yang hakiki. Dengan demikian, pola interelasi yang telah

berjalan selama ini dengan menekankan pada kondisi eksistensi kelompok atau golongan harus berusaha merubah sikap untuk tercapainya nilai kebersamaan yang menjadi cita-cita seluruh warga yang merasa selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan nilai yang ada.

Dengan demikian interelasi warga kasta berbeda di sini dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan aktivitas baik yang berkaitan dengan masalah adat dan keagamaan yang ada di bawah komando banjar adat atau berkaitan dengan masalah kedinasan/administratif yang berada dalam komando banjar dinas. Hal mana dilakukan oleh warga kasta berbeda dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

## 5. Perubahan Simbol-Simbol

Simbol-Simbol yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu tindakan yang diekspresikan lewat perilaku-perilaku yang memiliki makna-makna tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Blumer<sup>32</sup> bahwa seseorang akan bertindak berdasarkan penggunaan simbol-simbol yang dapat ditafsirkan. Sementara McCall dan Simon berpendapat bahwa dalam melaksanakan serangkaian tindakan, sipelaku memperhatikan sesuatu dalam situasi ketika situasi itu tampak dihadapannya. Serangkaian tindakan bisa membawa arah baru, putaran baru dalam pengertian apa yang dinyatakan individu pada dirinya sendiri dalam situasi itu. Obyek-obyek

---

<sup>32</sup> Margareth M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 68

yang diperhatikan individu kembali kepada serangkaian tindakan yang sedang dilakukan. Serangkaian tindakan yang dikehendaki individu adalah penting dalam menentukan jenis obyek yang dipilihnya dari obyek-obyek yang menghadangnya.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, perubahan simbol-simbol yang terjadi pada warga kasta berbeda di dalam mengadakan interelasi baik pada lingkungan Banjar Adat maupun pada Banjar Dinas akan mempunyai makna yang berlainan. Simbol-Simbol yang berlaku di lingkungan Banjar Adat tidak berlaku lagi di lingkungan Banjar Dinas, hal tersebut terjadi karena pemberlakuan simbol-simbol yang ada akan mempunyai makna dan kepentingan yang berbeda. Pada Banjar Adat simbol-simbol yang berlaku menempatkan sistem kasta bersifat "Inherited Status" sedangkan pada Banjar Dinas menempatkan sistem kasta bersifat "Achieved Status".

Dengan demikian, interelasi warga kasta berbeda yang ada dalam lingkungan banjar, baik banjar adat maupun banjar dinas akan digambarkan secara berbeda karena tindakan-tindakan mereka akan menggunakan simbol-simbol yang berbeda pula. Pemberlakuan simbol-simbol berbeda tersebut berkaitan dengan sistem adat yang berlaku yang sudah menjadi kesepakatan bersama secara turun temurun, dan nilai-nilai kesetaraan yang sudah berlaku pada masyarakat Bali.

---

<sup>33</sup> Joel M. Charon, *Symbolic Interaction. An Introduction, An Interpretation, An Integration* (New Jersey : Prentice Hall, 1989), hal.120.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan perubahan simbol-simbol pada warga kasta berbeda di dalam mengadakan interelasi di lingkungan banjar adat dan banjar dinas di Bali dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Guba dan Lincoln,<sup>34</sup> penelitian kualitatif disebut dengan nama *Naturalistik Inquiry* atau *Inquiry Ilmiah*. Sedangkan menurut David D William yang dikutip oleh Sanafiah Faisal, penelitian kualitatif sifatnya *Naturalistik*. Dan yang akan diuraikan adalah sebagai berikut : Pemilihan tempat/lokasi penelitian, strategi pendekatan di lapangan, tahap-tahap penelitian, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### Pemilihan Tempat/Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di propinsi Bali dengan lokasi penelitian sebagai penelaahan makronya di desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Dengan konsentrasi tempat penelitian sebagai penelaahan mikronya di banjar Belong. Banjar Belong adalah merupakan salah satu dari delapan banjar yang terdapat di desa Sanur Kaja.

---

<sup>34</sup> Lexy J. Molcong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990), hal.17.

Ditetapkannya lokasi tersebut sebagai obyek penelitian mengingat bahwa kota Denpasar selain sebagai ibukota propinsi, juga merupakan daerah yang banyak dikelilingi oleh tempat-tempat pariwisata yang sering menjadi obyek kunjungan para turis baik dari mancanegara maupun domestik. Kota ini memiliki luas wilayah 123.98 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 364.419 orang yang terdiri dari laki-laki 188.209 orang dan perempuan 176.210 orang. Sementara jumlah warga Asing berjumlah 1.108 orang yang terdiri dari jumlah laki-laki 578 orang dan perempuan 530 orang. Dan apabila dilihat dari jumlah penduduk kota Denpasar menurut agama yang dianut hasil sensus tahun 1995 adalah sebagai berikut : Islam 41844 orang, Hindu 304.294 orang, Budha 6.600 orang, Protestan 2.290 orang, dan Katolik 6391 orang. Di dalam kota tersebut terdapat tiga kecamatan 43 desa swasembada dan 202 banjar dinas, dengan jumlah rumah tangga 74.082 dengan kepadatan/km<sup>2</sup> 2.2939 jiwa dan rata-rata jumlah jiwa/rumah tangga berbanding 5.

Sementara itu, untuk kepentingan penelitian ini dipilihnya Kecamatan Denpasar Selatan, secara *purposive* dengan dasar pertimbangan bahwa kecamatan ini selain daerahnya merupakan bentangan wilayah pariwisata sepanjang alur mulai dari Gianyar, Sanur, Kuta, dan Nusa Dua adalah juga merupakan daerah yang berada di pusat pemerintahan, dimana paling tidak pengaruhnya terhadap keberadaan banjar baik mengenai banjar sebagai lembaganya, maupun warga atau kerama banjar tersebut sebagai aktor-aktor yang berkepentingan dengan

banjar tersebut akan sangat terlihat. Permasalahan yang akan diteliti merupakan masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat setempat, apalagi bila diperhatikan lokasi yang menjadi sasaran penelitian adalah lokasi yang sedang mengalami transisi. Dengan demikian, diharapkan banyak hal yang menarik bisa muncul dan berkembang di lapangan. Untuk itu diperlukan pendekatan yang menyeluruh dari berbagai sasaran penelitian dalam ruang lingkup tentang interelasi antara warga kasta berbeda pada lingkungan banjar di Bali.

Dalam pengumpulan data dan informasi dipusatkan pada sebuah banjar yang berada pada wilayah desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan, kotamadya Denpasar. Penentuan hanya satu banjar sebagai lokasi penelitian, karena selain keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, juga oleh karena diharapkan mampu mengungkapkan informasi secara terperinci dan mendalam tentang masalah yang diteliti. Adapun kriteria banjar yang dipilih adalah : pertama, banjar yang didalam terdiri dari wangsa-wangsa yang ada (Brahmana, Ksatria, Waysia, dan Sudra / Tri Wangsa dan Sudra); kedua, keberadaan banjar tersebut masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya; dan ketiga, dominansi banjar terhadap warga/kerama masih besar, terutama banjar adatnya.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut, maka menurut peneliti tepat, karena mewakili permasalahan yang menjadi bahan penelitian berkaitan dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Banjar Belong yang berpenduduk 149 KK, dengan jumlah KK Tri Wangsa sebanyak 10 KK, Tri

Wangsa pendatang 4 KK, non-Bali 2 KK. dan sisanya adalah 133 KK kasta Sudra. Banjar ini pernah mewakili desa adat Sanur di dalam mengikuti perlombaan antar desa adat yang diikuti oleh desa-desa adat yang ada di propinsi Bali. Dan yang menjadi daya tarik lain mengapa banjar Belong ini menjadi lokasi penelitian yakni keberadaannya bersama-sama dengan banjar-banjar lain yang ada di dalam wilayah desa adat/dinas Sanur Kaja (banjar Batan Poh, banjar Pekandelan, banjar Anggar Kasih, banjar Buruan, banjar Tegal Asah, banjar Wirasana/ Langon, dan banjar Tangtu) adalah wilayah/daerah yang secara politis tidak pernah dapat ditembus oleh komitmen GOLKAR, karena sudah dua pemilu GOLKAR tidak pernah menang di wilayah ini. Dan pengumpul suara terbanyak (dia atas 62%) adalah PDI. Apalagi saat penelitian ini dilaksanakan sedang berlangsung persiapan-persiapan pemilu, yang dalam hal ini GOLKAR mengadakan 'Gebyar Banjar' yaitu salah satu program GOLKAR didalam mengambil simpatik para warga khususnya warga banjar dimana diharapkan nantinya dapat tertarik dan sekaligus mendukungnya. Namun program ini gagal dilakukan di banjar yang ada di desa Sanur Kaja, termasuk banjar Belong.

### **Strategi Pendekatan di Lapangan**

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah anggota/kerama yang ada di banjar Belong desa Sanur Kaja, kecamatan Denpasar Selatan kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Data dan informasi yang diperlukan, berkenaan dengan studi tentang interelasi

antara warga berbeda kasta pada banjar di Bali telah diamati secara langsung pada subyek penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang merupakan penelitian kualitatif, maka jumlah subyek penelitian bukan merupakan syarat utama. Tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari sumber data dan informasi yang dikumpulkan.

Untuk mendapatkan berbagai keterangan yang menyangkut tentang kepentingan penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan observasi yang bersifat umum daerah obyek penelitian. Dari hasil observasi tersebut dilakukan pemilihan pokok permasalahan yang menyangkut kepentingan penelitian ini. Penggolongan permasalahan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengklasifikasikan pokok masalah di lapangan. Setelah itu ditentukan pemilihan subyek penelitian yang diperkirakan menguasai permasalahan yang ingin digali. Sebelum peneliti menggali keterangan di lapangan terlebih dahulu disiapkan pedoman wawancara/interview yang diterapkan dalam penelitian ini.

Strategi yang diterapkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan individu sebagai sasaran. Strategi ini memerlukan kreatifitas peneliti untuk bertanya dan melakukan observasi di lapangan. Dalam melakukan interview, peneliti mendekati subyek penelitian sebagai "*nara sumber*". Dan untuk aktifitas semua itu peneliti menggunakan pendekatan "*human aproach*" yang menjadikan individu sebagai "*guru*" dan sejawat peneliti.

Proses penelitian itu sendiri berlangsung dengan memperhatikan masalah yang berkembang di lapangan, sehingga penelitian ini akan berlangsung "*ulang-alik*" sesuai dengan tuntutan penelitian. Demikian juga halnya dengan pengumpulan datanya berkembang di lapangan sesuai dengan urutan penelitian. Selanjutnya diharapkan semua data yang diperoleh dapat disusun berurutan sesuai urutan penelitian kualitatif yang diawali dengan membahas permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan khusus.

### **Tahap - Tahap Penelitian**

Penelitian ini meliputi beberapa tahap yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Sesuai dengan yang ditawarkan oleh Sanafiah Faisal<sup>35</sup> bahwa tahap penelitian kualitatif meliputi : pertama, tahap eksplorasi yang meluas atau menyeluruh, biasanya masih bergerak di tingkat permukaan; kedua, tahap ekspolarasi secara terfokus atau terseleksi guna mencapai tingkat kedalaman dan kerincian tertentu; ketiga, tahap mengecek dan mengkonfirmasi hasil temuan penelitian.

Tahapan penelitian yang ditawarkan oleh Sanafiah Faisal tersebut senada dengan yang ditawarkan oleh Lexy D. Moleong dalam bukunya Penelitian Kualitatif, dimana tahapan tersebut masih merupakan

---

<sup>35</sup> Sanafiah Faisal, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Malang : Y A 3, 1990), hal.45.

garis besarnya saja, tahapan yang lebih terperinci disesuaikan dengan satuan masalah yang di bahas.

### **Instrumen Penelitian**

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai instrumen utamanya, sehingga posisi peneliti dengan pendekatan kualitatif ini selain melacak subyek penelitian, sekaligus melakukan refleksi secara simultan. Selain itu harus menggunakan pola berpikir "*konvergen*" yang berarti menyatukan pendapat dari berbagai pihak. Dan berpikir "*divergen*" yang menerima pendapat dari berbagai pihak. Data yang diperoleh dengan kedua pemikiran tersebut kemudian dirakit sesuai dengan fakta dan informasi ke dalam konsep hipotesis atau teori.

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data observasi dan interview. Hal ini sesuai dengan tradisi penelitian kualitatif yang lebih mementingkan kedua metode pengumpulan data tersebut. Observasi ini orientasi penekanannya ditujukan pada : pertama, lokasi/tempat suatu situasi sosial itu berlangsung; kedua, manusia pelaku atau aktor yang menduduki status sosial tertentu dan memainkan peranan

penting tertentu; ketiga, kegiatan para pelaku pada lokasi/tempat berlangsung sesuatu situasi sosial.<sup>36</sup>

Kegiatan observasi ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai interelasi yang terjadi pada warga yang berbeda kasta yang tidak terekam dalam interview. Dengan observasi masyarakat dapat dilihat secara konkrit oleh peneliti yang dalam hal ini merupakan instrumennya.

Sedangkan metode pengumpulan data dengan interview/wawancara didasari oleh alasan sebagai berikut : pertama, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek penelitian, tetapi dapat juga jauh didalam diri subyek penelitian; kedua, apa yang ditanyakan kepada subyek penelitian (informan) bisa mencakup hal-hal lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti di sini, ditujukan kepada warga masyarakat yang dipilih sebagai subyek penelitian yang mengerti tentang interelasi antara warga berbeda kasta di lingkungan banjar. Mereka yang di pilih adalah subyek penelitian yang betul-betul mengerti dan memahami dengan masalah tersebut. Sehingga sampel di sini bersifat "*logical sampling*", sedangkan wawancaranya bersifat tidak terikat dengan format yang ada. Dalam hal ini dipergunakan hanya apabila

---

<sup>36</sup> Sanafiah Faisal. .... Hal. 77.

peneliti mendapatkan permasalahan dari hasil pengamatan/observasi di lapangan. Penerapan model wawancara tersebut juga tidak terikat oleh waktu maupun oleh jenis wawancara peneliti, sepanjang peneliti masih mendapatkan "*varian baru*" wawancara terus dilakukan.

Untuk itu langkah penentuan subyek penelitian dilakukan menurut konsepnya Spradley, yaitu : pertama, subyek penelitian yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses akultursi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati; kedua, subyek penelitian yang masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti; ketiga, subyek penelitian yang mempunyai kesempatan/waktu yang memadai untuk dimintai informasi; keempat subyek penelitian yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri; kelima, subyek penelitian yang cukup asing akan peneliti, sehingga akan lebih menggairahkan untuk dijadikan sebagai "*guru*" atau "*nara sumber*". Dengan karakteristik tersebut para subyek penelitian itu dipilih dengan harapan dapat memberikan informasi yang mendalam sehubungan dengan tema penelitian.<sup>37</sup>

### **Metode Analisis Data**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mampu mengungkap pokok permasalahan yang menjadi bahasan penelitian ini, perlu sekali

---

<sup>37</sup> Sanafiah Faisal, ..... Hal. 44-45.

data-data yang diperoleh tersebut dianalisa. Cara menganalisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat cara yaitu : analisa domain, taksonomis, komponensial, dan tema kultural. *Analisa Domain* ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sifatnya umum dan menyeluruh terhadap pokok-pokok masalah penelitian. Domain (bidang) tersebut dikategorikan menurut hubungan sematis yang menyangkut tema penelitian. Setelah itu untuk memperdalam pembahasan penelitian menggunakan analisa *Taksonomis*, yang lebih memerinci domain-domain yang menjadi bahasan penelitian. Perincian tersebut menurut kategorinya masing-masing pokok bahasan. Pembahasan yang menitik beratkan pada rincian ke dalam informasi tersebut perlu diperluas dengan *Komponensial*. Dalam analisa ini dikontraskan antar elemen dalam domain untuk mendapatkan pembahasan yang mempunyai rentangan lebih luas. Analisa ini dapat dilakukan dengan mengadakan wawancara terseleksi terhadap subyek penelitian yang terpilih. Sedangkan untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai pokok permasalahan yang diteliti, dilakukan analisa *Tema Kultural*. Dalam analisa ini peneliti mengintegrasikan antar lintas domain untuk mendapatkan bahasan holistik.

## BAB II

### POLA PERILAKU WARGA DI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BANJAR DI BALI

#### A. Kedudukan dan Fungsi Banjar Bagi Masyarakat Bali

##### 1. Kedudukan dan Fungsi Banjar

Sebelum lebih jauh membicarakan kedudukan dan fungsi banjar, terlebih dahulu melihat pengertian banjar. Menurut Wojowasito<sup>38</sup> yang tersadur dalam MPLA mengemukakan bahwa dalam bahasa Jawa kuno terdapat kata banjar yang berarti garis atau lingkungan, kata banjar dapat pula berarti atau berderet ke samping misalnya dalam istilah barisan berbanjar. Dari kata jajar itulah muncul kata jajaran, misalnya jajaran ABRI yang artinya di lingkungan ABRI. Kata banjar dapat pula berarti kelompok, seperti kata mabanjar yang artinya masuk kelompok suatu unit sosial yang di Bali disebut Banjar. Kata banjar dapat berubah menjadi kata banjah yang dalam bahasa Bali berarti membentang, misalnya : *Manjahang banten* artinya membentangkan sesajen atau mengatur letak sesajen secara membentang. Contoh lain adalah : *bale banjar* artinya balai tempat membentangkan sesuatu masalah yang dihadapi oleh *warga/krama* atau tempat rapat.

---

<sup>38</sup> Anak Agung Ngurah Gde Agung dan Ida Bagus Putu Purwita, ... hal. 18

### 1. a. Pengertian dan Kedudukan Banjar.

Pengertian daripada banjar dalam kaitannya dengan desa adat di Bali atau dengan kata lain apakah dfinisi dari banjar tersebut. Banjar adalah kelompok masyarakat yang lebih kecil dari desa adat dan menjadi bagian dari desa adat serta merupakan persekutuan hidup sosial, baik dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan susah. Apabila ditelusuri lebih seksama, maka akan didapati kelompok-kelompok sosial yang hidup di lingkungan masyarakat Bali, di mana terjadinya kelompok-kelompok sosial berdasarkan faktor-faktor yang akan menentukan corak serta kepentingan dari kelompok-kelompok sosial itu sendiri. Berdasarkan hal itu, maka banjar adalah pengelompokan sosial yang berdasarkan persekutuan hidup setempat atau kesatuan wilayah.<sup>39</sup>

Dalam pandangan masyarakat Bali konsep banjar memiliki dua pengertian yaitu : pertama, banjar sebagai kesatuan wilayah tempat tinggal para warganya secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara dan berbagai kegiatan sosial yang ditata oleh suatu sistem budaya dengan nama banjar adat dan kedua, banjar sebagai kesatuan wilayah administrasi dengan nama banjar dinas. Banjar adat dalam rangka sistem pemerintahan tidak terjalin secara struktural dan juga dalam kaitannya terhadap banjar dinas, banjar adat hanya terjalin secara

---

<sup>39</sup> Anak Agung Ngurah Gde Agung dan Ida Bagus Putu Purwita, ..... hal.19.

fungsional dan tidak secara struktural. Dalam hal ini kedudukan atau posisi banjar berada di bawah pengawasan desa.

Bahwa banjar merupakan bagian dari desa, di mana secara struktural dan fungsional banjar merupakan bagian dari sebuah desa. Ada kemungkinan satu desa dinas yang terdiri atas beberapa banjar dinas yang berada pada lingkungan satu atau lebih desa adat. Karena legitimasi dari masing-masing desa tersebut berbeda-beda maka memang agak sulit untuk mengetahui apakah desa adat yang lebih besar ataukah desa dinas. Hal tersebut bisa terjadi karena pengaruh perluasan wilayah kota administratif serta pemekaran beberapa desa dinas yang memungkinkan kedua struktur itu bisa terjadi.

Pada hubungan yang struktural sudah jelas dan dapat dipastikan bahwa banjar adalah bagian dari sebuah desa, dan perangkat dari sebuah banjar disesuaikan dengan perangkat pemerintahan desa dengan beberapa penyesuaian menurut keperluannya. Akan tetapi pada hubungan yang fungsional kadang-kadang agak sulit untuk mengetahui apakah kedudukan banjar pada desa tetap sama sebagai bagian dari desa?. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitiannya Ketut Sudhana Astika dan kawan-kawan<sup>40</sup> dimana dinyatakan bahwa ternyata kedudukan banjar memperlihatkan adanya perbedaan, dan yang memberikan ciri kedudukan banjar pada desa bisa sama, lebih tinggi atau lebih rendah, dan itupun

---

<sup>40</sup> Ketut Sudhana Astika, dkk. .... Hal. 33.

bervariasi pada beberapa aspek kehidupan atau fungsinya. Pada desa yang mempunyai tata aturan adat yang kuat atau desa-desa tradisional.

#### 1. b. Fungsi Banjar.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa banjar merupakan kelompok masyarakat yang lebih kecil dari desa dinas/adat dan menjadi bagian dari desa dinas/adat tersebut serta merupakan persekutuan hidup sosial baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka/susah. Azas yang melandasi persekutuan hidup sosial dalam krama banjar adalah azas kebersamaan dan azas kekeluargaan yang tercermin dalam istilah *nyama banjar* yaitu suatu istilah yang lazim dipakai dalam rapat anggota kerama banjar bersangkutan. Azas kebersamaan dan azas kekeluargaan tersebut mendorong munculnya jiwa dan semangat gotong royong di kalangan warga krama banjar itu sendiri. Dengan demikian maka dapatlah dipahami bahwa fungsi pokok daripada banjar adalah mewujudkan gotong royong dalam persekutuan hidup bersama di kalangan warga krama banjanya, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Istilah lain yang lazim dipakai untuk mewujudkan gotong royong itu adalah *selulung sabayantaka* yang artinya bersama-sama dalam keadaan senang dan berasama-sama pula dalam menghadapi bahaya terutama bahaya maut.

Apabila ditelusuri lebih dalam, bahwa jiwa dan semangat gotong royong yang berazaskan kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan

---

krama banjar, memberikan dorongan kepada warga banjar bersangkutan untuk mengharmoniskan serta menyelaraskan hidupnya di dalam lingkungan banjarnya. Azas kebersamaan dan azas kekeluargaan yang memberikan motivasi kepada jiwa dan semangat gotong royong, secara konsepsional dilandasi oleh *Tat Twan Asi* dalam ajaran agama Hindu. Dengan pengertian ini maka gotong royong dalam kehidupan krama banjar, bukan sekedar bersifat tolong menolong saja melainkan lebih tinggi dari pada itu karena menurut *Tat Twan Asi*, bahwa menolong orang itu berarti menolong dirinya sendiri.

Melakukan sesuatu pekerjaan secara gotong royong juga mengandung arti terjadinya suatu proses pendidikan non-formal. Demikian aktivitas yang dilakukan oleh krama banjar, pada hakekatnya memberikan arti pendidikan non formal bagi warga banjar itu sendiri. Dalam mengerjakan sesuatu secara bersama-sama terjadilah suatu proses belajar dan mengajar antar sesamanya, di mana anggota yang tahu tentang sesuatu pekerjaan akan memberi tahu anggota yang kurang mengetahui sesuatu pekerjaan itu. Demikian pula anggota yang lebih tua dan lebih banyak pengalaman dalam membina kehidupan krama banjar, memberi petunjuk serta bimbingan kepada anggota yang lebih muda yang belum banyak pengalaman tentang hal tersebut. Dan dalam hubungan proses belajar mengajar secara non formal ini, maka munculah sekeha teruna dan sekeha banjar yaitu perkumpulan pemuda-pemudi dalam banjar itu sendiri

yang merupakan suatu kelompok generasi muda dalam banjar yang pada saatnya nanti akan menjadi krama banjar.

Dari kenyataan-kenyataan yang dipaparkan di atas, maka secara singkat dapat dirumuskan bahwa fungsi daripada banjar adalah sebagai suatu lembaga sosial yang mengatur hubungan antara dan semangat kekeluargaan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan kewajiban dengan hak, hubungan jasa dengan sanksi sosial, hubungan belajar dengan mengajar dalam proses berlangsungnya pendidikan non formal dan hubungan mental dengan prilaku.

## **2. Sistem Aturan dan Keanggotaan pada Banjar**

### **2. a. Sistem Aturan Dalam Banjar**

Dalam suatu komunitas seperti banjar atau desa/kelurahan, aturan dan adat istiadat berkembang bagi segenap warganya. Sistem aturan dan adat istiadat ada beberapa diantaranya mempunyai akibat hukum yang disebut hukum adat. Sulit kiranya membedakan mana adat yang mempunyai sanksi hukum dan mana yang hanya mempunyai sanksi adat dari suatu komunitas. Ada kebiasaan atau adat yang mempunyai sanksi secara bertingkat yaitu sanksi peringatan adat, kemudian menjadi denda dan akhirnya sampai pada pemecatan. Aturan adat bisa mempunyai sanksi hukum apabila tingkat pelanggaran sudah semakin tinggi dalam artian bila pelanggaran terhadap aturan adat istiadat itu dilakukan secara

berulang-ulang, maka suatu sanksi hukum akan dikenakan kepada pelanggarnya.

Sebagai anggota banjar tidak saja taat akan aturan-aturan yang bersifat adat, namun yang bersifat dinas-pun harus mendapat perhatian dari warga banjar. Demikian halnya dengan warga banjar Belong sendiri, bila akan mengadakan acara bepergian ke luar kota/lingkungan diwajibkan untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi saat-saat sekarang ini (saat penelitian ini dilakukan) semua warga tidak terkecuali banjar di seluruh Bali diharuskan tertib diri diantaranya pemilikan identitas yang jelas karena dalam rangka menghadapi pemilihan umum. Selain itu karena banyaknya terjadi kasus penduduk liar yang tidak memiliki identitas secara pasti, sehingga sering dilakukan penertiban tentang KTP. Akan tetapi apabila tidak memiliki KTP dan berkehendak bepergian ke luar kota, anggota banjar wajib melapor pada kelian/kelihan banjar untuk minta surat keterangan jalan.

Demikian juga apabila kedatangan tamu dari tempat lain dan lebih dari 24 jam, maka anggota banjar wajib melapor kepada kelian/kelihan banjar karena itu sudah dianggap menginap. Banjar merupakan organisasi sosial yang secara struktural berada di bawah desa, yang mempunyai suatu ikatan wilayah, sebagai anggota banjar juga otomatis sebagai anggota desa. Dan sebagai anggota desa dinas setiap anggota akan dihadapkan berbagai kewajiban-kewajiban desa yang seharusnya dilaksanakan, kewajiban-kewajiban tersebut antara lain meliputi mentaati aturan-aturan

desa dinas (administrasi dan pemerintah), melaksanakan kegiatan secara gotong-royong dengan warga lainnya. Begitu pula halnya sebagai anggota desa suka duka (adat) akan dihadapkan dengan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seperti dalam kegiatan kematian dan sembahyang di pura desa, taat pada awig-awig desa adat dan melakukan tugas-tugas adat maupun agama, dan kegiatan suka duka lainnya. Dan untuk memudahkan pengaturan tugas-tugas kedinasan di wilayah banjar biasanya tugas-tugas dikontribusikan pada tempekan-tempekan yang ada yang dipakai sebagai dasar pembagian wilayah adat.

Banjar merupakan organisasi terendah yang berada di bawah desa dengan berbagai kemudahan dalam pengerahan tenaga. Sifat keanggotaan banjar tidak tertutup dan terbatas kepada orang-orang asli yang lahir di dalam lingkungan banjar itu saja. Namun ada orang-orang dari wilayah lain atau yang lahir di banjar lain, yang kebetulan tinggal di sekitar wilayah banjar yang bersangkutan, dan menginginkan menjadi warga banjar, hal ini bisa saja. Pusat dari banjar adalah bale banjar di mana para warganya bisa saling bertemu dan mengadakan rapat pada hari-hari tertentu.

## 2. b. Keanggotaan pada Banjar

Kelompok sosial terkecil dalam masyarakat disebut keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya. Di Bali keluarga disebut *kuren* yang berasal dari kata *keren* artinya dapur. Orang yang sudah membentuk

rumah tangganya sendiri atau berkeluarga disebut *mapakuren* atau *makurenan*. Berdasarkan sistem kemasyarakatan di Bali, bahwa mereka yang telah kawin disebutlah *mapakuren*<sup>41</sup>. Orang yang telah *mapakuren*, barulah status kehidupannya dalam masyarakat yaitu tidak lagi berstatus *teruna* atau *daa* (bujangan), melainkan telah berstatus tua, atau dengan kata lain mereka digolongkan dalam golongan tua. Karena itulah perkawinan di Bali disebut *nganten* berasal dari kata *ganti*. *Nganten* berarti berganti status hidup dari *Brahmacari* (masa muda) ke *Grhastha* (masa berumah tangga).

Sementara kata *krama* berasal dari kata *ram* yang berarti orang tua, lalu menjadi kata *krama* yang artinya kumpulan atau kelompok orang-orang tua, maka dalam istilah *krama banjar* mengandung pengertian kelompok orang-orang tua (tepatnya orang-orang yang telah berkeluarga) yang menghimpun diri dalam suatu kelompok sosial yang didasarkan atas persekutuan hidup bersama, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah dalam suatu kesatuan wilayah. Atas dasar pengertian tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa anggota atau *krama Banjar* adalah orang-orang yang telah berumah tangga dalam suatu kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah desa adat.

Sistem kemasyarakatan di Bali mewajibkan kepada seseorang yang telah berumah tangga dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah

---

<sup>41</sup> Anak Agung Ngurah Gde Agung dan Ida Bagus Putu Purwita, ..... hal. 22

desa adat untuk menjadi krama banjar. Dengan sistem yang demikian itu maka tidaklah ada orang yang sudah berumah tangga tidak masuk krama banjar. Sistem tersebut ditunjang oleh hukum adat yang berlaku di Bali yaitu bagi mereka yang menurut aturan adat wajib krama banjar kemudian tidak menjadi krama banjar, maka kepada mereka dikenakan sanksi sosial antara lain berupa dikucilkan masyarakat, tidak diajak bergaul, tidak dibantu dalam keadaan bahaya, sulit mendapat kuburan bila mereka mempunyai kematian dan lain sebagainya. Untuk itu di dalam menentukan keanggotaan banjar ada sistem yang biasa dipergunakan yaitu sistem *karang ayahan* dan *sistem mapakuren*.<sup>42</sup>

Karang Ayahan merupakan sistem yang mendasarkan pada aturan bahwa tanah yang merupakan wilayah desa di mana krama banjar itu berada adalah berstatus tanah desa atau karang desa. Seseorang yang menempati atau bertempat tinggal di dalam tanah desa itu dikenal ayahan desa yaitu wajib kerja untuk desa dan juga dikenal *papeson* yaitu wajib materi untuk desa. Wajib kerja dan wajib materi untuk desa itu disebut ayahan desa, sebagai akibat dari menempati tanah desa. Tanah desa yang menjadi tempat tinggal seperti itu disebut karang ayahan. Ayahan desa yang pokok adalah memelihara Kahyangan Tiga yaitu : Pura Desa, Pura, Pura Paseh dan Pura Dalem. Di beberapa desa adat ada juga pura lain selain Kahyangan tiga yang merupakan milik desa adat.

---

<sup>42</sup> Anak Agung Ngurah Gde Agung dan Ida Bagus Putu Purwita... Hal 24.

Dalam sistem karang ayahan seperti tersebut krama banjar yang juga berkedudukan sebagai krama desa adalah menempati karang ayahan atau karang desa. Jumlah karang ayahan itu tetap dari sejak semula, kecuali membuka tanah desa baru untuk perumahan. Setiap lajur atau petak tanah karang ayahan, dipikul wajib kerja dan wajib materinya yang disebut ngayahang karang ayahan oleh seseorang kepala keluarga. Bilamana dalam satu petak tanah karang ayahan terdapat lebih dari satu keluarga saja yang ngayahang karang ayahan itu yang disebut *ayahan ngarep*, sedangkan kepala keluarga yang lainnya tidak berstatus ngayahang karang ayahan yang disebut *roban*. Di dalam organisasi desa adat, keluarga yang ngayahang karang ayahan itu disebut krama desa, sedangkan roban itu disebut krama roban. Kewajiban krama-roban adalah membantu krama desa dalam wajib kerja. Oleh karena seseorang krama-banjar, maka anggota banjarnya adalah tetap jumlahnya menurut jumlah lajur tanah karang ayahan untuk banjar itu sendiri. Keluarga yang ngayahang karang ayahan itu menjadi anggota banjar ngarep (inti/pokok), sedangkan roban bersifat membantu krama banjar ngarep di dalam wajib kerja saja, sedangkan mengenai wajib materi tidak dikenai.

Sistem *Mapakuren*, adalah sistem yang tidak didasarkan pada aturan menempati tanah ayahan desa, melainkan didasarkan atas seseorang yang telah mapakuren (berkeluarga). Menurut sistem ini, setiap orang pria yang telah beristri, diwajibkan menjadi anggota krama banjar. Apabila di dalam satu pekarangan terdapat beberapa keluarga, maka

semuanya itu menjadi anggota krama banjar. Dalam hal ini semuanya semuanya dikenai wajib kerja dan wajib materi, baik untuk banjarnya sendiri maupun untuk desa adatnya. Dan untuk sistem ini jumlah anggota krama banjar dapat berubah-ubah.

Keanggotaan banjar, membawa kewajiban-kewajiban, baik terhadap banjarnya sendiri, maupun terhadap desa-adatnya. Mengenai kewajiban-kewajiban ini disebut dengan istilah ayahan banjar dan atau ayahan-desa. Semua anggota krama banjar ngarep menurut sistem karang ayahan dan semua anggota krama banjar menurut sistem mapakuren di atas, dikenai ayahan banjar dan atau ayahan desa (wajib kerja) baik untuk banjarnya maupun untuk desa-adatnya.

Mengenai wajib kerja dan wajib materi untuk banjar atau untuk desa adat, menurut awig-awig (peraturan adat) di Bali ada pengecualiannya yaitu : (1) Bagi para *sulinggih* (pendeta) dibebaskan dari wajib kerja dan wajib materi, baik untuk banjar maupun untuk desa adat, karena kedudukan seorang *sulinggih* adalah dipandang suci dan patut dihormati oleh krama banjar dan krama desa. Di samping itu seorang *sulinggih*, bertugas melakukan *lokaphalasraya* yaitu menyelesaikan upacara keagamaan di masyarakat. Selain itu seorang *sulinggih* berfungsi sebagai guru loka yaitu pemimpin masyarakat di bidang keagamaan dan kerokhanian, (2) Bagi anggota krama banjar yang *janda*, dibebaskan dari wajib kerja pria dan wajib materi dikenai hanya setengah saja. Demikian pula bagi anggota krama banjar yang *duda*, dibebaskan dari wajib kerja wanita dan wajib

materi dikenai hanya setengahnya juga. (3) bagi mereka yang *yatim piatu* dan *belum kawin*, demikian pula bagi mereka yang *tua renta* dan tidak mempunyai siapa-siapa, dibebaskan dari wajib kerja dan wajib materi.

## 2. b.1. Kewajiban dan Hak Anggota Krama Banjar.

Pada hakekatnya kewajiban anggota krama banjar adalah bagian dari kewajiban warga desa adat. Kewajiban dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya merupakan kewajiban sosial yang patut dilaksanakan oleh manusia sebagai makhluk sosial yang menginginkan keserasian serta keselarasan hidup, sebagai landasan dalam mewujudkan ketentraman, keadilan dan kesejahteraan lahir bathin dalam persekutuan hidup bersama yang saling menguntungkan (simbolise mutualistis). Dan secara garis besar kewajiban anggota krama banjar adalah meliputi : (1) Melaksanakan kewajiban yang merupakan tugas krama banjar antara lain : membantu anggota krama banjar dalam menyelenggarakan upacara *Desa Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Manusia Yadnya*, dan *Resi Yadnya*. Menyelenggarakan penguburan jenazah anggota krama banjar, membantu anggota krama banjar dalam keadaan bahaya dan ditimpa musibah. Menyelenggarakan tugas-tugas banjar rutin secara bergiliran misalnya : menjadi *kasinoman*, menyelenggarakan *aci* (upacara kecil seperti *masegeh*, *mabanten sodan*) pada hari-hari tertentu secara periodik yang dilakukan secara bergilir di lingkungan anggota krama banjar dengan sistem *urak*. Melaksanakan kerja bakti dan wajib kerja untuk kepentingan krama

banjar, berkewajiban mengeluarkan *papeson* (wajib materi) untuk kepentingan krama banjar dan melaksanakan tugas-tugas lainnya bagi krama banjar. (2) Setiap anggota krama banjar wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi krama banjar yaitu *awig-awig* baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, *paswara* dan *sima* yang berlaku. Di samping itu anggota krama banjar berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan wilayah banjarnya. Kewajiban yang paling menonjol dalam kehidupan krama banjar adalah melaksanakan gotong royong dalam persekutuan hidup bersama, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. (3) Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang merupakan kewajiban warga desa-adat.

Sementara apa yang menjadi hak anggota/krama banjar dapat dilihat dari mekanisme kehidupan krama banjar memberikan hak-hak tertentu kepada anggotanya sebagai imbalan atas kewajiban-kewajiban yang dipikulnya yaitu : berhak mengeluarkan pendapat dalam *sangkepan* banjar (rapat anggota banjar), berhak dipilih dan memilih prajuru-banjar, berhak menggunakan fasilitas milik banjar dan milik desa adat, berhak minta bantuan tenaga untuk keperluan menyelenggarakan upacara agama, berhak mendapat bantuan/pertolongan dalam keadaan bahaya dan lain sebagainya.

## 2. b.2. Pemberhentian Keanggotaan Krama Banjar.

Pemberhentian keanggotaan krama banjar mencakup tiga hal yaitu : (1) Berhenti karena pindah tempat tinggal. Dalam hal ini yang bersangkutan mohon berhenti dengan hormat karena pindah tempat tinggal ke luar wilayah banjar yang semula dan mereka memasuki anggota krama banjar lain yang mewilayahkan pekarangan tempat tinggalnya yang baru. Untuk kasus ini di banjar Belong pernah terjadi, namun krama tersebut pindah karena melakukan transmigrasi, akan tetapi kepegiannya tersebut dengan perjanjian apabila dia kembali akan masuk sebagai krama banjar Belong kembali, dan hal ini disetujui baik oleh prajuru-banjar maupun oleh Bendesa Adat. (2) Berhenti karena usia lanjut dan diganti oleh anaknya. Di Bali ada dua sistem dalam penggantian anggota krama banjar seperti ini. Ada desa adat yang memakai sistem penggantian, bila anaknya laki-laki tertua telah kawin, maka keanggotaan krama banjarnya diganti oleh anaknya yang tertua itu, seperti di banjar Belong kejadian ini kerap kali terjadi. (3) Berhenti karena diberhentikan dengan tidak hormat oleh krama banjarnya yang disebabkan oleh suatu kesalahan terhadap krama banjarnya. Untuk kasus seperti ini di banjar Belong belum pernah terjadi. Pemberhentian seperti ini diiringi oleh sanksi sosial atau sanksi adat dalam masyarakat. Berhenti secara tidak hormat dari krama banjar secara otomatis berhenti pula menjadi anggota-krama desa. Pemberhentian seperti ini biasanya bersifat sementara dan mereka bisa diterima kembali menjadi anggota krama banjar setelah mereka mengajukan permintaan

maaf kepada krama banjar dan memakai kewajibannya yang dipersyaratkan oleh krama banjar.

Jenis keanggotaan masing-masing banjar bervariasi, beberapa banjar hanya membedakan jenis keanggotaan menjadi dua yaitu *kerama asli* dan *krama nyade*<sup>43</sup>. Krama asli yaitu anggota banjar yang memang asli berasal dari banjar tersebut. Krama nyade yaitu anggota banjar yang juga asli dari banjar tersebut tetapi sudah tidak aktif di banjar. Beberapa banjar menyebut krama nyade sebagai krama putus atau krama pensiun. Seandainya seorang ayah mempunyai anak laki-laki yang sudah kawin maka anak tersebut menggantikan kedudukan ayah sebagai krama banjar, dan ayah kemudian berganti status menjadi krama nyade atau krama pensiun. Krama nyade tidak aktif di banjar karena tidak mempunyai kewajiban, tetapi tetap mempunyai hak untuk diperhatikan jika ia meninggal. Mereka tetap mempunyai hak atas kulkul kematian seperti krama yang lainnya, di mana kulkul harus dibunyikan untuk setiap krama yang meninggal.

Istilah krama *nyade* atau krama *pensiun* tidak dikenal di beberapa banjar terutama banjar baru yang berada di kota. Mereka hanya mengenal satu macam keanggotaan yaitu krama banjar, di mana krama banjar dinyatakan tidak pernah pensiun. Penambahan keanggotaan juga biasanya terbatas; karena seseorang yang mempunyai anak laki-laki sudah

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Kelian adat banjar Belog. pada tanggal 16 Agustus 1998

kawin, maka anak tersebut tidak dengan sendirinya menjadi krama banjar karena keanggotaan banjar masih tetap diwakili oleh ayahnya. Dengan demikian, maka banjar tersebut memiliki anggota yang terdiri dari orang-orang lanjut usia. Sementara keanggotaan pada banjar Belong lebih didominasi oleh anggota yang masih muda, walau ada diantaranya yang berusia lanjut namun dalam hal ini mereka berperan sebagai penisepuh atau penasehat.

Beberapa banjar membedakan jenis keanggotaannya menjadi tiga yaitu *krama asli*, *krama pendatang*, dan *krama nyade*. Krama pendatang yaitu orang yang berasal dari luar banjar atau luar desa adat tetapi kemudian tinggal serta memiliki rumah di daerah banjar tersebut dan kemudian menjadi anggota banjar. Biasanya pendatang yang sudah mempunyai rumah di daerah lingkungan banjar maka diharapkan menjadi anggota banjar serta diharapkan mengikuti adat setempat. Seandainya orang tersebut bertempat tinggal hanya untuk sementara maka orang tersebut dimasukkan sebagai anggota banjar administratif, di mana hanya secara administratif mereka berada di banjar tersebut. Keadaan ini bervariasi untuk beberapa banjar.

Krama pendatang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan kerama asli kecuali haknya untuk menjadi pimpinan banjar. Krama pendatang tidak berhak dipilih menjadi pimpinan banjar, tetapi anaknya berhak mejadi pimpinan banjar, jika anak tersebut lahir dan di besarkan di banjar tersebut, hal ini seperti yang dijumpai di banjar Belong.

Beberapa jenis keanggotaan banjar yang lainnya yaitu krama *balu*, krama *putus* karena sudah sangat tua, dan krama lepas ayah. Krama *balu* yaitu anggota banjar perempuan yang sudah ditinggal suaminya, sehingga tidak seaktif krama lainnya. Krama *putus* karena sudah sangat tua yaitu anggota banjar yang statusnya pensiun karena tidak punya anak tetapi umumnya sudah sangat tua, dan mereka sama statusnya seperti krama pensiun. Krama lepas ayah yaitu anggota banjar yang bebas dari aktivitas banjar karena menjabat suatu jabatan di banjar atau di desa maupun di pura. Hal inipun bervariasi untuk masing-masing banjar.

Anggota banjar menurut istilah lain dapat dibedakan atas dua yaitu anggota banjar *ngarep* dan anggota banjar *romboan*<sup>44</sup>. Anggota *ngarep* yaitu anggota banjar inti yang terdiri dari sepasang suami istri, dan anggota banjar *romboan* yaitu anggota banjar yang salah satu suami dan istri meninggal dunia atau anggota banjar masih kecil dan belum kawin. Istilah keanggotaan semacam ini tidak berlaku pada banjar Belong, karena istilah yang dipakai adalah anggota banjar tetap (*suka duka*) dan anggota banjar dinas (*administrasi*). Sebagai anggota banjar, baik itu anggota banjar dinas maupun anggota banjar *suka duka* secara langsung juga sebagai anggota desa dan akan dihadapkan berbagai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Dalam kegiatan kedinasan seperti gotong royong, semua anggota banjar harus hadir untuk melakukan kegiatan tersebut.

---

<sup>44</sup> Ketut Sudhana Astika. dkk. .... 221

Sedangkan untuk kegiatan kematian, upacara keagamaan dan lain-lain hanya anggota banjar suka duka sajarah yang wajib datang. Di sini terlihat perbedaan antara anggota banjar suka duka dengan anggota banjar dinas dalam melaksanakan tugas-tugas banjar.

Setiap anggota banjar/desa adat di banjar/desanya mempunyai kewajiban untuk ikut mengadakan persiapan dan pelaksanaan upacara kematian. Di banjar-banjar tertentu, kematian merupakan masalah banjar, yang berarti bahwa upacara dilaksanakan (ditangani) oleh semua anggota banjar atau dengan kata lain, semua anggota banjarlah yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara kematian tersebut. Upacara memandikan dan upacara membawanya ke kuburan merupakan kewajiban banjar, termasuk dalam hal ini adalah kewajibannya untuk memberikan sumbangan berupa uang dan beras yang jumlahnya ditentukan oleh suatu rapat di banjar. Kalau dilaksanakan penguburan untuk orang yang meninggal itu, maka semua biaya pada umumnya dapat ditutupi/ditanggulangi dengan sumbangan dari anggota banjar. Sedangkan dalam hal *ngaben*, pada umumnya tidak mungkin tertutup oleh sumbangan yang ada, dalam hal ini tentunya pihak keluarga akan lebih banyak mengeluarkan biaya yang diperlukan, karena yang menentukan untuk di *aben* adalah pihak keluarga yang meninggal.

Anggota banjar dapat kehilangan keanggotaannya di banjar. Tetapi kasus di pecatnya seseorang dari keanggotaan banjar sangat jarang terjadi karena membawa konsekuensi yang sangat berat terutama

menyangkut adat, hal ini tidak pernah terjadi di banjar Belong. Anggota banjar yang terpaksa dipecat dari suatu banjar, dilarang mengikuti kegiatan adat di banjar maupun di desa adat yang bersangkutan. Keputusan pemecatan disampaikan ke seluruh banjar yang ada di desa tersebut agar mereka tidak dapat menerimanya sebagai anggota banjar baru. Anggota banjar yang dipecat tidak diperkenankan menguburkan sanak keluarganya yang meninggal di kuburan desa yang bersangkutan karena hanya anggota banjar yang berhak memanfaatkan kuburan, di mana kuburan adalah milik desa. Hal ini dirasakan merupakan masalah yang pelik sehingga pemecatan anggota banjar merupakan kasus yang sangat luar biasa. Namun demikian, kasus seperti itu tidak pernah terjadi di banjar Belong.

## **B. Sistem Upacara Pada Banjar**

Kepercayaan terhadap Tuhan menurut ajaran agama Hindu tidak saja dilakukan dengan memanjatkan do'a, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan lain terutama kegiatan berupa upacara/upakara keagamaan yang melibatkan individu-individu dalam masyarakat. Upacara/upakara tersebut biasanya berupa material yang terwujud dalam bentuk *bebantenan/sesajen*. Masyarakat Bali yang menganut agama Hindu sangat merasakan fungsi dari agama tersebut dalam kehidupannya. Hal ini terutama terlihat dari sub sistem agama Hindu itu sendiri yaitu sub sistem upacara yang bagi penganutnya sendiri kadang-kadang diartikan sebagai hal yang sangat mutlak. Bahkan tidak jarang ada pengertian agama itu sendiri adalah

upacaranya, sampai pada pengertian apabila tidak melakukan upacara adalah tidak beragama atau tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama.

Bagi umat Hindu di Bali, agama Hindu memiliki tiga kerangka dasar<sup>45</sup>, yaitu: (1) Tatwa, (2) Susila, dan (3) Upacara. Secara sistematis ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling memberi fungsi atas sistem agama secara keseluruhan. Upacara atau ritual sebagai salah satu kerangka dasar dalam agama Hindu tersebut, merupakan rangkaian kegiatan umat dalam upaya berkomunikasi dengan Tuhan-nya (*Sang Hyang Widhi Wasa*), *Atman Leluhur*, *Rsi* atau *Guru*, *Manusia*, dan *Alam Sekitar*. Upacara keagamaan diwujudkan dalam bentuk persembahan atau korban suci (*Yajna*), dan dihayati sebagai manifestasi kongkret agama.

Upacara keagamaan tidak hanya dilakukan di tingkat banjar, tetapi juga dilakukan di tingkat desa. Sebagai warga banjar adat otomatis sebagai warga desa adat dengan berbagai hak dan kewajibannya. Orientasi sebagai banjar adat maupun desa adat lebih terfokus pada masalah adat istiadat dan keagamaan. Dalam hal ini banjar berperan sangat besar untuk mengkonsepsikan dan melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan. Di banjar Belong, sistem upacara yang dilakukan langsung dikoordinir oleh banjar, semua anggota banjar yang beragama Hindu ikut aktif dalam melaksanakan persiapan upacara yang akan diadakan.

---

<sup>45</sup> Ida Bagus Gde Yudha Triguna, *Pergeseran dalam Pelaksanaan Agama : Menuju Tatwa*, (Denpasar : BP, 2994), hal. 73.

Persiapan dilakukan dari mempersiapkan bahan baku sampai pada pembuatan *bebantenan*, hal tersebut dilakukan secara bergotong royong.

Apabila upacara akan dilaksanakan seperti misalnya dalam upacara *odalan*, sebelumnya pimpinan banjar meminta salah satu anggota banjar untuk membunyikan *kulkul gede* (kentongan besar) pertanda upacara akan segera dimulai. Beberapa saat setelah kentongan berbunyi, warga banjar datang memakai pakaian adat Bali dengan membawa *banten sodan* yang kemudian dihaturkan oleh para wanita. Pelaksanaan upacara piodalan tersebut dilangsungkan dan dipimpin oleh *Pedanda* (pendeta) maupun *Pemangku*, yang kemudian diikuti oleh warga banjar dalam melakukan persembahyangan (*muspa*). Setelah upacara piodalan itu selesai, warga banjar disarankan untuk menikmati banten yang tidak dihaturkan (*paridannya*) secara bersama-sama di banjar. Sementara para wanitanya sambil membersihkan perabotan yang telah digunakan dalam upacara, juga mengumpulkan paridan yang nantinya dibagi-bagikan pada anggota banjar yang mau membawanya. Sedangkan tugas para prianya adalah membersihkan halaman dan lingkungan tempat persembahyangan.

Di Bali sebagaimana dikemukakan oleh I Gusti Ngurah Bagus dalam tulisannya "Kebudayaan Bali" bahwa terdapat lima macam upacara (*Panca Yadnya*) yang masing-masing berdasarkan sistem tanggalan Bali/Hindu yaitu sebagai berikut : (1) *Manusia Yadnya*, yang terutama meliputi upacara-upacara siklus hidup dari masa kanak-kanak sampai dewasa; (2) *Pitra Yadnya*, yang merupakan upacara-upacara yang

ditujukan kepada ruh-ruh leluhur dan yang meliputi upacara-upacara kematian sampai pada upacara-upacara penyucian ruh leluhur (*nyekah, memukur*); (3) *Dewa Yadnya*, yang terutama berkenaan dengan upacara-upacara pada kuil-kuil umum dan keluarga; (4) *Resi Yadnya*, yang merupakan upacara-upacara yang berkenaan dengan pentasbihan pendeta (*mediksa*); (5) *Buta Yadnya*, yang merupakan upacara-upacara yang ditujukan kepada *kala* dan *buta* yaitu ruh-ruh yang dapat mengganggu<sup>46</sup>.

Menurut Pustaka Suci *Veda* yang disadur oleh I Gusti Ngurah Gorda menyatakan bahwa ada dua alasan utama yang mewajibkan umat Hindu melaksanakan *Panca Yajna* tersebut, yaitu membayar atau melunasi tiga jenis utang dalam kerangka pencapaian kebahagiaan abadi atau moksa dan penebusan dosa. Ketiga jenis utang yang dimaksud adalah (1) Utang kepada Tuhan (*Dewa Rna*) yang dengan yajna-Nya telah menciptakan (*Upatti*), memelihara, melindungi (*Sthiti*) dan melebur manusia dan seluruh isi jagad raya dan mengembalikan mereka ke asalnya (*pralina*). (2) Utang kepada orang tua dan leluhur (*Pitra Rna*) berkat yajna-nya yang telah melahirkan, memelihara dari sejak dalam kandungan, dan mendidik sejak masa kanak-kanak hingga mencapai kemandirian. Dan (3) Utang kepada *Rsi* atau *Guru* atas yajna-nya di bidang peningkatan mutu manusia melalui proses pendidikan, dalam rangka memahami, menghayati, dan

---

<sup>46</sup> I Gusti Ngurah Bagus dalam Koentjaraningrat, "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia : Kebudayaan Bali", (Jakarta : Djambatan, 1995), hal. 303.

mengamalkan ilmu pengetahuan, baik yang bersifat sakral maupun yang profan.<sup>47</sup>

Kewajiban melunasi ketiga jenis utang tersebut disebut *Tri Rna*, yang mempunyai makna moral-etik-spiritual bagi manusia. Di satu pihak, ketiga utang tersebut merupakan utang yang tidak mungkin dapat dibayar kembali secara penuh oleh manusia, sementara di sisi lain, kebahagiaan abadi (*moksa*) baru akan dicapai bila manusia telah membayar secara tuntas ketiga jenis utang tersebut. Atas dasar itu manusia mempunyai kewajiban berkesinambungan selama hidupnya untuk melaksanakan *Panca Yajna* tanpa rasa sesal dan berkeluh-kesah. Ditambahkan oleh Gorda, makna dari *Panca Yajna* menurut pandangan Hindu adalah (1) sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan status hidup yang paling ideal dan tertinggi, yaitu kebahagiaan abadi atau *moksa*; (2) sebagai bentuk ekspresi kesetiaan manusia untuk memenuhi kewajiban melunasi tiga utang (*Tri Rna*) yang merupakan tahap pendahuluan buat kebahagiaan abadi; (3) sebagai sarana upaya manusia untuk menebus dosa-dosa yang diakibatkan oleh pemakaian lima alat dalam lingkungan rumah tangga sehingga terjadi pembunuhan terhadap makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, baik dilakukan secara sadar maupun tidak.

---

<sup>47</sup> I Gusti Ngurah Gorda. "Nilai-Nilai Agama Hindu dan Etika Ekonomi Wirausahawan Bali", disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga, 1995, hal. 79-80.

Sementara pelaksanaan berbagai upacara yang berkaitan dengan *Panca Yajna* yang selalu dilakukan oleh warga banjar Belong telah tertuang dalam awig-awig banjar. Untuk mengetahui lebih rinci dari jenis-jenis upacara yang termasuk Jenis upacara yang berkaitan dengan *Manusia Yadnya* adalah :

1. *Pegedong-gedongan*, upacara ini ditujukan ke hadapan si bayi yang ada di dalam kandungan dan merupakan upacara yang pertama kali dialami sejak terciptanya sebagai manusia. Upacara ini dilakukan saat bayi berumur 5 bulan (6 bulan kalender), kehamilan yang berumur di bawah 5 bulan dianggap jasmani si bayi belum sempurna, dan tidak boleh diberi upacara manusia yadna.
2. *Bayi lahir*, upacara ini tidaklah mempunyai arti yang istimewa, kecuali merupakan rasa gembira dan angayu bagia atas kelahiran si bayi ke dunia.
3. *Kepus puser*, upacara ini dilakukan apabila puser si bayi sudah lepas (kepus), dibuatkanlah suatu upacara yang bertujuan untuk membersihkan secara rokhaniah tempat-tempat seperti sanggah Kamulan, sumur, dapur, bale dan sebagainya.
4. *Ngelepas Hawon*, upacara ini dilaksanakan setelah bayi berumur 12 hari.
5. *Kambuhan*, setelah si bayi berumur satu bulan tujuh hari (42 hari), diadakan upacara yang sering disebut "*upacara - macolongan*". Dalam upacara ini di samping pembersihan jiwa raga si bayi dari segala noda dan kotoran, juga bertujuan untuk mengembalikan "*Nyamang-Bajang*" si bayi dan pembersihan si ibu agar dapat memasuki tempat-tempat suci seperti Merajan, Pura dan sebagainya.
6. *Tiga Bulan (Nyambutin)*, upacara ini disebut pula upacara "*Nelu-Bulanin*", tujuannya adalah agar jiwa-atma si bayi benar-benar kembali berada pada raganya. Di samping itu upacara ini juga merupakan pembersihan serta penegasan nama si bayi.
7. *Satu Oton (6 bulan)*, yang dimaksud satu oton di sini adalah 210 hari. Upacara ini bertujuan untuk memperingati hari kelahirannya, dan biasanya diikuti dengan upacara pemotongan rambut yang pertama kali (*megundul*), yang bertujuan untuk membersihkan "*siwadwara*" (ubun-ubun).
8. *Tumbuh Gigi*, upacara ini disebut pula "*Ngempugin*" dan sedapat mungkin dilakukan pada waktu matahari mulai terbit. Tujuannya adalah untuk mohon ke hadapan Betara Surya, Betara Brahma,

- dan Dewi Sri agar gigi si bayi tumbuh dengan baik, putih bersih, tidak jamur/cendawan atau dimakan ulat.
9. *Maketus* (lepas gigi), upacara ini disebut juga "*makupak*". Upacara ini dilaksanakan apabila si anak sudah lepas giginya (*maketus* untuk pertama kalinya).
  10. *Meningkat Dewasa* (*munggah Deha/Teruna*), upacara ini sebagai tanda kedewasaan bagi seorang laki-laki adalah suaranya mulai membesar (*ngembakin*), sedangkan tanda kedewasaan bagi seorang wanita adalah untuk pertama kalinya dia mengalami datang bulan (*haid*).
  11. *Potong Gigi* (*Mapandes*), upacara ini dapat dijadikan satu upacara meningkat dewasa, dan mapetik serta penambahan upakaranya tidaklah begitu banyak. Upacara ini bertujuan untuk mengurangi "*Sad Ripu*" dari seseorang, dan sebagai simbolnya akan dipotong 6 buah gigi atas (4 buah gigi dan 2 buah taring).
  12. *Mawinten*, upacara ini bertujuan untuk mohon waranugraha akan mempelajari ilmu pengetahuan seperti kesusilaan, keagamaan, *wedha-wedha* dan sebagainya.
  13. *Perkawinan*, upacara perkawinan adalah merupakan persaksian baik terhadap Ide Sang Hyang Widi Wasa, maupun kepada masyarakat bahwa kedua orang tersebut mengikatkan diri sebagai suami-istri, dan segala akibat perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama.

Jenis upacara yang berkaitan dengan *Pitra Yadnya* antara lain :

*Mageseng*, yang meliputi : *Sawa wedana*, ngeseng sawa secara langsung dengan segala upacara; *Asti wedana*, ngeseng yang dibakar kembali dari bangbang, digeseng dengan segala upacaranya; *Swasta*, upacara atiwa-tiwa terhadap mayat yang tidak mungkin dijumpai lagi, sehingga mayat diwujudkan dengan badan-badan lain, antara lain lalang, air dan lain sebagainya.

Jenis upacara yang berkaitan dengan *Dewa Yadnya* adalah sebagai berikut :

1. Upakara-upakara untuk upakara umum seperti : keliwon, purnama, dan tilem.
2. Upakara Budha Keliwon Pagerwesi (Budha Keliwon, Uku Shinta)
3. Upakar Tupek - Landep
4. Upakara Penampahan Galungan
5. Upakara untuk Hari Raya Galungan
6. Upakara untuk Hari Raya Kuningan

7. Upakara Tumpek Panguduh (Sabtu Keiwon Wariga)
8. Budha Keliwon Pegat Uwakan (Budha Keliwon Wuku Pahang)
9. Piodalan Sang Hyang Haji Saraswati
10. Upakara untuk menyambut Tahun Baru Saka (Hari Rya Nyepi)
11. Upakara-upakara untuk melepas Alit.

Jenis-jenis upacara yang berkaitan dengan *Buta Yadnya* adalah sebagai berikut :

1. *Caru Kesangan*, upacara untuk menyambut tahun baru saka
2. Upacara untuk pembuatan suatu bangunan suci yang besar (*Kahyangan Tiga, Padma, Meru*)
3. *Tumpek Uye (Tumpek Kandang)*, upacara ini bertujuan untuk memohon ke hadapan Sanghyang Rere Angon Siwa sebagai pengembala, agar melindungi serta memberi keselamatan kepada segala hewan/ternak.
4. *Tumpek Penguduh (Tumpek Bubuh -Wariga-Pengatang)*, upacara ini ditujukan pada Dewa Siwa dengan tujuan untuk memohon agar tumbuh-tumbuhan hidup dengan subur, berbuah serta berbunga yang banyak.<sup>48</sup>

Sementara itu orang-orang yang bertugas melaksanakan upacara adalah orang-orang yang telah dilantik menjadi pendeta yang pada umumnya disebut Sulinggih. Ditambahkan oleh I Gusti Ngurah Bagus bahwa para sulinggih tersebut disebut dengan istilah-istilah khusus tergantung dari klen atau kasta mereka. Misalnya istilah pedanda adalah untuk pendeta dari kasta Brahmana, baik yang beraliran Siwa maupun Budha; kemudian istilah Resi adalah untuk pendeta dari kasta Satria dan sebagainya. Walaupun semua pelaku upacara agama tersebut sebagai sulinggih menjadi anggota Majelis Parisada Hindu Dharma (MPHD), namun diantara

<sup>48</sup> AWig-Awig Banjar Bclong, Pasal (pawos) 54 - 56.

banyak orang Bali masih ada pandangan-pandangan tradisional yang membeda-bedakan mereka berdasarkan klen atau kasta.

Kegiatan upacara lain yang ada di banjar terutama di kota adalah upacara-upacara *tawur Agung kasanga*. Dalam kegiatan ini tiap-tiap anggota banjar membuat banten prani (sesajian yang terdiri dari nasi dan buah-buahan), yang hampir menyerupai banten sodan (sesajian dari nasi, buah, dan kue-kue) namun nasi yang diisi dalam banten tersebut hanya satu. Banjar Belong mempunyai kegiatan yang sama seperti banjar di kota. Upacara *tawur Agung kasanga* adalah upacara pelepasan tahun baru yang dilakukan sehari sebelum hari raya Nyepi dan menurut istilah Bali disebut *Pangerupukan*). Dalam upacara ini, ibu-ibu anggota banjar pergi ke banjar dengan membawa *banten prani* pada sore hari. Setelah selesai, mereka pulang dengan membawa *tirta* (air suci) dan sate dari banjar yang kemudian dipakai untuk pecaruan di sanggah cucuk yang ada di tiap-tiap rumah penduduk.

Pada banjar Belong, akhir-akhir ini dalam kegiatan upacara piodalan (odalan) masih melibatkan ibu-ibu di lingkungan banjar. Keperluan bebantenan masih ditanggulangi oleh ibu-ibu tersebut, karena biasanya di banjar yang ada di kota acara membuat banten sudah banyak terganggu oleh kegiatan kerja, sehingga tidak ada waktu untuk mengerjakannya sendiri atau bersama di banjar. Untuk itu mereka membelinya di pasar atau pada salah satu geria (rumah pendeta). Hal ini berdampak pada jarak sosial, yang menjadikan diantara mereka hubungan agak renggang, karena

diantara warga banjar tersebut ada yang lebih mementingkan penghidupan daripada interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula, bila ada upacara odalan di pura desa, di sebagian banjar yang ada di kota, bisa dikatakan hanya sebagian dari anggota banjar saja yang datang ke pura tersebut untuk melakukan persembahyangan. Dan untuk hal ini anggota banjar-banjar yang ada di desa Sanur Kaja-pun termasuk banjar-banjar yang anggota-anggotanya telah tergesek oleh kondisi tersebut.

### **C. Struktur Administrasi Banjar dan Desa**

Banjar Belong secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan Kotamadya Denpasar. Dan secara adat masuk dalam wilayah keadatan Desa Adat Sanur Kaja Denpasar, dengan pusat orientasi kepada tiga pura Kahyangan Tiga di Sanur kotamadya Denpasar, yaitu Pura Desa/Paseh Sanur Kaja dan Pura Dalem/Kahyangan Sanur. Dua struktur ini menyebabkan sistem pemerintahan banjar dan desa juga terwujud dalam sistem pemerintahan desa secara administratif dan sistem pemerintahan desa dan banjar secara adat. Perangkat untuk kedua macam sistem pemerintahan ini juga dibentuk sesuai dengan fungsinya. Di banjar Belong ada seorang Klian Dinas dan ada seorang Klian Adat (suka duka), Klian Dinas mengatur pemerintahan secara administrasi yang dilakukannya sendiri tanpa ada perangkat yang membantunya. Sementara Klian Adat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya keadatannya dibantu oleh perangkat seperti penyarikan (skretaris)

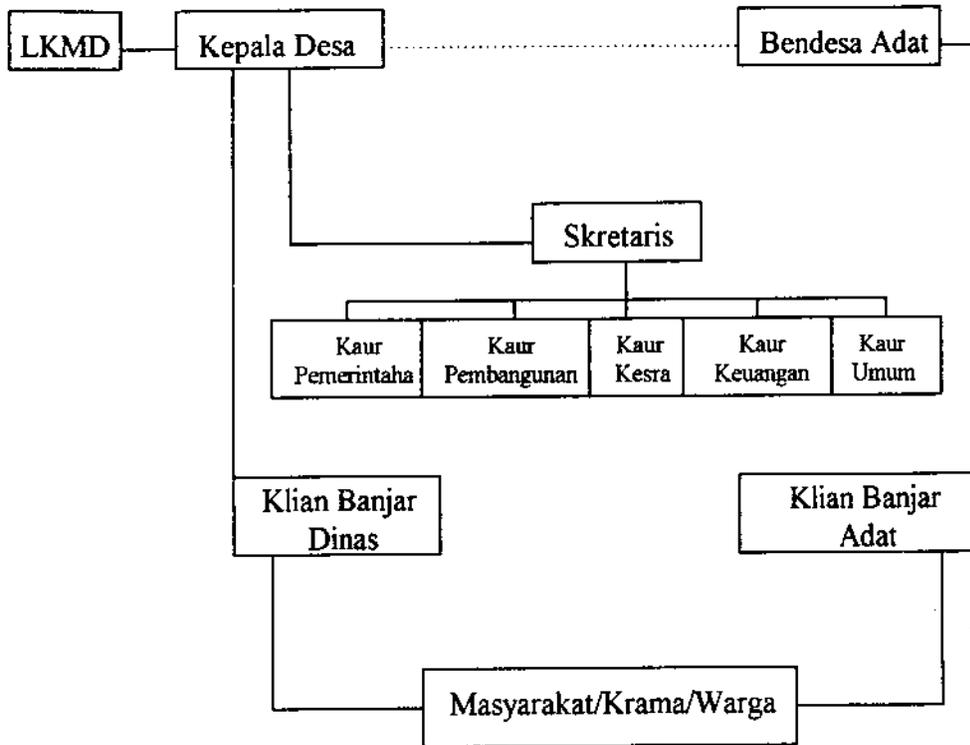
dan seorang bendahara. Di dalam pelaksanaan tugas Klian Adat (suka duka) dibantu juga oleh kesinoman (juru arah) yang dalam hal ini melaksanakan tugas-tugas komunikasi dengan para warga. Masa jabatan Klian Adat dan Klian Dinas dalam satu periode adalah lima tahun sedangkan kesinoman dilakukan secara bergilir selama tiga bulan sekali yang diatur berdasarkan mufakat anggota banjar.

Dalam sistem pemerintahan desa secara administrasi terdapat Kepala Desa /Perbekel yang membawahi beberapa Klian dinas atau Kepala dusun/Kepala Lingkungan, seperti halnya di banjar Belong Klian Dinas adalah juga Kepala Dusun (Kasun) atau Kepala Lingkungan (Kaling). Di tingkat pemerintahan desa sendiri, Kepala Desa/Perbekel dibantu oleh beberapa tenaga administrasi tingkat desa yang mengurus beberapa urusan atau bidang seperti urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan masyarakat (kesra) urusan keuangan, dan urusan yang sifatnya umum. Lembaga musyawarah desa adalah lembaga yang terdiri atas perutusan banjar dan pimpinan desa, lembaga ini merupakan komunikasi antara pimpinan dan perangkat pemerintahan banjar untuk merencanakan atau memutuskan suatu rencana pembangunan. Sementara pada pemerintahan Desa Adat ada Klian Desa Adat atau biasa disebut Bendesa yang membawahi beberapa Klian Adat, dan Bendesa didalam menjalankan fungsi dan tugasnya dibantu langsung oleh para klian adat banjar yang diangkat dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah banjar di lingkungannya.

Di tingkat banjar, khususnya di banjar Belong keputusan tentang sesuatu dicapai dalam keputusan bersama lewat rapat (*sangkepan*) banjar. Dan dalam menjalankan tugasnya, Klian Adat banjar Belong dibantu oleh patajuh yaitu wakil klian, sekretaris dan bendahara dan tidak dibantu oleh tempekan, karena di banjar tersebut tidak dibentuk tempekan-tempekan walaupun wilayahnya cukup luas dan warganya cukup banyak, namun yang ada hanya kesinoman saja atau lebih dikenal dengan sebutan juru arah yang tugasnya sebagai mediator antara yang menghubungkan klian adat dan warga atau krama banjar. Dalam banjar Belong juga para juru arah (kesinoman) tersebut juga sering dimanfaatkan oleh klian dinas untuk sebagai mediator atau unsur komunikasi kedinasan disamping tugasnya sebagai mediator keadatan. Tidak kalah pentingnya peranan Pinisepuh (para penasehat) yang dalam berbagai kesempatan selalu menjadi rujukan parajuru banjar dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada. Karena di banjar ini pelaksanaan kerja dari klian dinas tidak dilengkapi perangkat lain, dia bekerja sendiri. keberadaannya dianggap merupakan staf dari desa dinas dan mendapatkan semacam honorarium setiap bulan dari desa dinas sebesar Rp.125.000,-. Khusus untuk kesinoman di banjar Belong dibagi menjadi dua tempat yakni kesinoman dangin jalan dan kesinoman dauh jalan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dapat diperhatikan pada bagan berikut :

**Bagan 1**

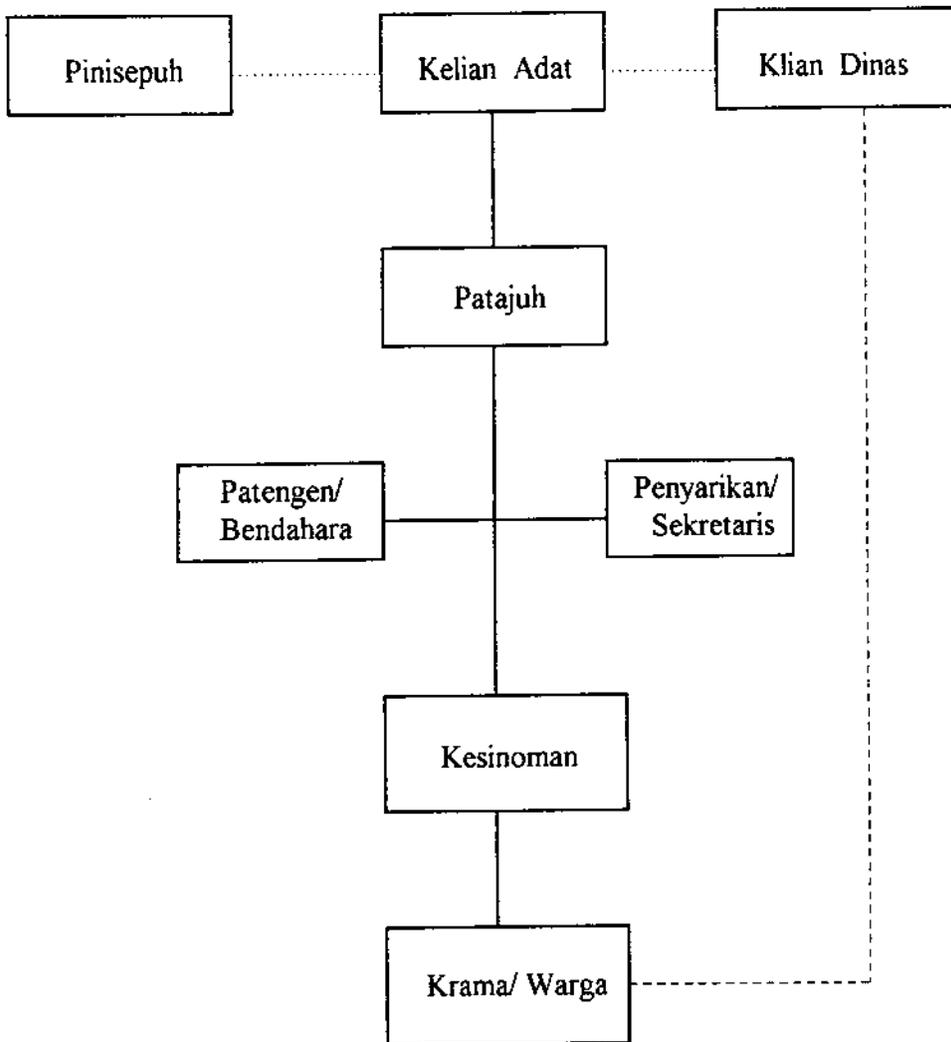
**Struktur Pemerintahan Desa Sanur Kaja**



**Keterangan :**

- ..... = garis kerjasama
- = garis komando
- Kaur = Kepala Urusan
- Kesra = Kesejahteraan Masyarakat

**Bagan 2**  
**Struktur Kepemimpinan Banjar Belong**



**Keterangan :**

- ..... = konsultasi
- = komunikasi kedinasan
- = komunikasi keadatan

Sekretaris, selain tugasnya dalam bidang surat menyurat, juga bertugas menjalankan tugas dan wewenang kepala desa jika kepala desa berhalangan hadir. Sementara tugas para kepala bidang, membantu sepenuhnya kepala desa dalam bidang-bidang yang ditanganinya.

Dalam pemerintahan desa adat Sanur Kaja berlaku pemerintahan tunggal, artinya desa adat yang pejabat puncaknya terdiri dari satu orang saja (seorang Bendesa), seperti yang pada umumnya terdapat pada desa-desa di daerah Bali dataran.<sup>49</sup> Dalam pelaksanaan tugasnya secara khirakhis langsung dibantu oleh para klian adat yang ada di lingkungannya. Pada pemerintahan desa adat di Bali menganut suatu sistem yang tidak memisahkan antara mereka yang diperintah dengan perangkat desa adat yang memerintah. Sistem ini berpegangan pada suatu azas, bahwa yang diperintah adalah juga mereka yang memerintah. Kekuasaan tertinggi terletak pada sangkepan krama desa atau rapat warga desa adat yang menghimpun semua pendapat termasuk pendapat dari kepala desa adatnya itu sendiri. Oleh karenanya kepala Desa Adat yang disebut Bendesa atau Kelihan desa adat tidaklah sebagai pemegang kekuasaan, akan tetapi melaksanakan keputusan-keputusan rapat krama-desa terhadap warga desa-adatnya sendiri.

---

<sup>49</sup> Anak Agung Ngurah Gde Agung dan Ida Bagus Putu Purwita. *Pemantapan Adat Dalam Menunjang Usaha-Usaha Pembangunan*. MPLA : Propinsi Bali, 1983/1984, hal 15.

#### **D. Kasta dan Status di dalam Kehidupan Masyarakat Hindu Bali**

Dalam penelitian ini warga kasta berbeda diartikan sebagai warga yang memiliki kasta berbeda yang ada di dalam kehidupan masyarakat Bali, dimana di dalam berbagai aktivitas pergaulan warga tersebut tidak dapat melepaskan diri dari kebersamaan antara satu dengan lainnya. Namun demikian, perbedaan kasta adalah merupakan momok yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku kehidupan masyarakat Bali pada umumnya. Bertolak dari kenyataan tersebut, pengertian warga berbeda kasta yang dibatasi pada tingkat sikap dan perilaku diantara kasta yang ada di dalam melakukan kegiatan bersama untuk suatu tujuan tertentu, bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk itu di dalam berinterelasinya-pun membutuhkan suatu pengertian dan kesadaran yang menuntut nilai-nilai tertentu.

Warga kasta berbeda yang ada di dalam kehidupan masyarakat Bali terdiri dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra/Jaba. Tiga kasta pertama sampai ketiga menamakan diri sebagai Triwangsa. Konsep kasta dalam masyarakat Bali masa lalu sering berkaitan erat dengan kewajiban profesi tertentu. Kasta Brahmana berkaitan erat dengan kewajiban di bidang keagamaan, kasta Ksatria berkaitan erat dengan kewajiban di bidang pemerintahan, pembelaan dan pertahanan, kasta Waisya berkaitan erat dengan kewajiban di bidang ekonomi seperti pedagang dan kasta Sudra/Jaba berkewajiban di bidang pertanian. Sementara apabila melihat

peran dan fungsi dari masing-masing kasta dalam pandangan warna/wangsa, akan terlihat suatu interelasi yang tidak terputus di dalam rangka menjalankan proses kehidupan manusia baik di alam dunia maupun di alam sesudah mati. Peran dan fungsi warna/wangsa dalam pandangan agama Hindu sebagaimana diungkapkan oleh Ketut Wiana<sup>50</sup> bahwa perbedaan yang ada pada warga berbeda kasta tersebut terletak pada faham tentang pengertian kasta yang selalu dihubungkan dengan kelas-kelas yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, dimana keberadaan kasta yang satu dengan yang lainnya akan menggambarkan kedudukan kelas yang satu akan lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dari yang lain. Dengan demikian, kedudukan kasta yang lebih tinggi akan diasumsikan pada kelas yang lebih tinggi, sedangkan kasta yang rendah menduduki kelas yang rendah.

Hubungan kasta dengan kelas yang terdapat pada masyarakat Hindu di Bali apabila dilihat dari kaca mata adat-istiadat (secara tradisonal) adalah merupakan kedudukan yang menentukan seseorang di tengah masyarakatnya. Hal ini dapat dibuktikan pada masyarakat Bali, siapa yang merasa dari kalangan kasta yang lebih tinggi maka dia akan merasa keberadaannya lebih tinggi dari yang lain. Kondisi ini pula yang mendorong gerakan pembaharuan yang berusaha menghapuskan sistem kasta yang dinilai merupakan sistem faham yang bersifat diskriminatif dan merendahkan martabat manusia.

---

<sup>50</sup>Ketut Wiana, *Kasta* ..... hal. 33-60

Awalnya gerakan pembaharuan di Bali muncul karena adanya ketidaksamaan hak atas umat Hindu di dalam mempelajari agama Hindu, dimana hal itu terjadi sebagai konsekuensi dari sistem kasta. Menurut I Gusti Ngurah Gorda<sup>51</sup> bahwa munculnya gerakan pembaharuan yang dimulai pada tahun 1921 di Singaraja muncul gerakan yang didorong adanya keinginan dalam tubuh sebagian umat Hindu untuk menghapuskan dua sistem dalam agama tersebut yang dipandang merugikan, yaitu *ajawero* dan kasta. Sistem *ajawero* menetapkan bahwa yang boleh melakukan kajian terhadap Veda hanyalah Wangsa Brahmana dan Wangsa Ksatria. Ketetapan ini, dalam rumusan negatif berarti bahwa Wangsa Sudra/Jaba tidak akan pernah menikmati peluang untuk mengenal agama Hindu secara mendalam lewat sumbernya (kitab sucinya). Hal mana disusul dengan berdirinya pekumpulan *Soeita Gama Tirta*<sup>52</sup> sebagai wadah gerakan pembaharuan yang didirikan oleh I Gusti Putu Jelantik dengan sasaran menghapuskan sistem *ajawero* sehingga kesempatan untuk mempelajari dan memahami agama menjadi terbuka bagi semua orang. Gerakan pembaharuan lainnya muncul untuk menindaklanjutinya yaitu tahun 1923 dengan berdirinya perkumpulan *Shanti Andnyana* yang beranggotakan semua wangsa yang ada di Bali. Tokoh dari gerakan ini adalah I Gusti Putu Cakratenaya. Kemudian disusul dengan gerakan-gerakan lainnya seperti

---

<sup>51</sup> I Gusti Ngurah Gorda, *Nilai* ..... Hal.81

<sup>52</sup> Ketut Wiana, *Kasta* ..... hal. 109.

Gerakan *Surya Kanta* tahun 1927 sampai 1933, Gerakan *Pasek* (Bali asli) tahun 1966.

Dari keseluruhan gerakan tersebut di atas tujuannya adalah agar jangan ada lagi golongan masyarakat yang memperoleh perlakuan tidak adil, hal mana sesuai dengan nilai-nilai *tat twam asi*, semua manusia sebenarnya mempunyai derajat yang sama. Lebih jauh ditegaskan lebih lanjut oleh Nyoman Oka yang disadur oleh Masyhuri<sup>53</sup> bahwa ajaran *Tat twam Asi* tercakup dalam ajaran *Trikaya*, yakni perilaku *manah* (pikiran), *raos* (perkataan), dan *laksana* (tingkah laku yang benar). Ditambahkannya untuk mencapai tingkatan yang sempurna, seorang dituntut membersihkan *Trikaya*-nya. Atas dasar ini, mereka harus mengembangkan sikap kebersamaan diantara sesama. Apabila *manah* sudah bersih dengan sendirinya *raos* dan *laksana* akan bersih pula, demikian sebaliknya. Manusia yang *Trikaya*-nya sudah bersih tidak akan menyakiti siapa pun juga, sekalipun terhadap musuhnya. Ini berarti bahwa doktrin *Trikaya* secara normatif dapat melampaui batas-batas yang ditimbulkan dalam kasta.

Dari uraian mengenai berbagai gerakan yang menghendaki pembaharuan mengenai kedudukan dan peran warga kasta tidak dibedakan karena perbedaannya dalam kasta, yang apabila ditinjau akan pengaruh sejarah yang lalu tidak terlepas dari pengaruh peodalisme Belanda yang

---

<sup>53</sup> Masyhuri, *Dinamika* ..... hal. 14

selanjutnya dimanfaatkan oleh Jepang, di mana mereka pernah memanfaatkan sistem kasta ini untuk kepentingan eksistensinya. Sehingga untuk sebagian masyarakat Bali yang nilai kedudukan dan perannya sangat dipengaruhi oleh sistem kasta, dengan sendirinya akan bertahan dengan status quonya untuk tetap berkehendak bahwa kedudukannya tersebut merupakan suatu kondisi yang tidak dapat diganggu gugat, dan menuntut masyarakat kasta yang berada dibawahnya untuk tetap menghargainya sebagaimana berlaku sejak dahulu.

Dengan kondisi tersebut tidak ayal lagi bahwa kedudukan yang menghubungkan kasta dengan kelas pada masyarakat Bali adalah suatu kondisi yang menempatkan kasta lain lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan lainnya. Sehingga tidak jarang timbul konflik antar kasta yang berlatar belakang ketidak puasan kasta yang rendah dalam hal ini kasta Sudra/Jaba terhadap kasta Triwangsa, padahal masyarakat Bali mayoritas adalah berkasta Sudara/Jaba. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa perbedaan kasta bagi warga yang ada di lingkungan banjar atau desa sudah menempatkan warga yang berbeda kasta pada nilai profesi masing-masing sesuai dengan tuntutan jaman. Namun demikian kedudukan dan peran masing-masing kasta dari pandangan adat isitadat yang berlaku, masih tetap menempatkan kasta sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi* ..... Hal 286

dengan memberikan pengertian kelas berkaitan dengan kasta yang terdapat pada masyarakat adalah merupakan kedudukan yang menentukan, walau demikian menurut para ahli lain dilihatnya dari pandangan ekonomi, kasta tidak secara absolut menentukan kelas seseorang, karena pandangan ini lebih berorientasi pada nilai pemilikan (kekayaan, kebendaan). Demikian juga yang berlaku di masyarakat Bali saat ini, kedudukan atau kelas seseorang di tengah masyarakatnya tidak lagi hanya dilihat dari kasta mana dia lahir, lebih dari itu penilaian lebih ditentukan oleh nilai ekonomi (kekayaan) yang dia miliki dan kedudukan sebagai apa dia di lingkungan masyarakatnya. Ini sejalan dengan penegasan Weber yang mengadakan pembedaan antara kelas dan kedudukan, dimana dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial. Hal mana ditambahkan oleh Kurt B. Mayer bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang bersandarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan (*status group*).<sup>55</sup>

Kedudukan kasta pada masyarakat Bali, walaupun telah mengalami perkembangan yang menuntut keberadaannya harus disesuaikan dengan keadaan jaman. Akan tetapi eksistensi peran dan kedudukan yang dimiliki oleh kasta dari kalangan wangsa Triwangsa masih tetap berlangsung sebagaimana telah dijelaskan pada bagian lain bahwa

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi* ..... Hal. 285-286.

kondisi tersebut terjadi karena memang tuntutan adat menghendaki demikian, dan hal tersebut juga disadari oleh warga kasta Sudra/Jaba yang menilai kedudukan tersebut tidak mungkin digantikan oleh kasta lainnya selain dari Triwangsa. Dengan demikian, kedudukan dan peran yang menempatkan kasta dan kelas di dalam masyarakat Bali tidak dapat dilihat dari kaca mata adat (tradisional), namun harus dilihat dari kaca mata non-adat. Dalam hal ini, pandangan ekonomi menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat sekaligus kelas sosialnya, walau hal tersebut terjadi pada masyarakat Bali dengan kasta-kasta yang membedakan seseorang dalam kedudukan tertentu.

## **E. Pola Perilaku Warga Kasta Berbeda pada Banjar Adat dan Banjar Dinas**

### **1. Pada Banjar Adat**

Masyarakat Bali yang ada dalam lingkungan banjar lebih merasakan nilai reaksi antara sesama anggota/krama satu dengan yang lainnya. Namun demikian, diantara gesekan-gesekan yang terjadi diantara sesama anggota/krama banjar tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku pada masing-masing kalangan yang dalam hal ini kedudukan kasta yang satu dengan kasta yang lain akan memberikan warna lain di dalam berbagai pergaulan atau hubungannya dengan selain dari kalangannya sendiri. Dengan demikian akan terjadi pola-pola di dalam berhubungan antara satu warga dengan warga yang lain, karena mereka terdiri dari berbeda kasta.

Di dalam pola interelasi antar warga kasta yang berbeda di lingkungan banjar adat akan mempunyai warna tersendiri, karena di dalam konteks ini akan lebih dilatar belakangi oleh nilai adat dan agama Hindu yang berlaku di mana penempatan kasta akan menentukan kedudukan seseorang dimana dan berperan apa. Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa kedudukan seseorang akan berlainan dengan melihat apa kastanya, seperti kedudukan Brahmana akan dengan sendirinya menempatkan dirinya sebagai warga yang berkedudukan sebagai pendeta atau pedanda, demikian juga kasta Ksatria dan Waisya kedudukannya akan berlainan dengan yang dialami oleh Sudra/Jaba. Terlepas dari itu, seluruh kalangan yang ada di Banjar adat tidak bisa berjalan dengan sendirinya, diantara kalangan akan sangat memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Mereka akan sangat merasa tidak berguna apabila tidak ada yang lain.

Pola hubungan yang terjadi antara warga kasta berbeda di lingkungan banjar adat sangat dipengaruhi oleh nilai adat dan agama karena keberadaannya, namun demikian diantara mereka tercipta pola hubungan yang diwarnai oleh nilai yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai manusia biasa, mereka terikat oleh konsidi saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, walau dalam pandangan adat mereka memiliki kedudukan berbeda. Sebagai warga yang lahir dari kalangan berbeda mereka harus mengikuti aturan main yang telah diatur oleh adat yang menempatkan antara satu warga satu dengan yang lain

berbeda. Namun, karena kehidupan pada masyarakat secara umum tidak harus selalu terikat oleh ketentuan yang ada dan memerlukan satu sikap bernilai kebersamaan, karenanya perbedaan itu hanya terjadi manakala menempatkan posisi tersebut sebagai ketentuan saja.

Pola hubungan warga kasta berbeda yang terjadi di lingkungan banjar adat dipengaruhi oleh beberapa ketentuan, pertama oleh ketentuan adat Hindu yang masih melekat pada kehidupan masyarakat Bali, di mana ada beberapa ketentuan yang tidak memperbolehkan kasta lain selain Triwangsa mendudukinya seperti moncol misalnya. Kemudian yang kedua perilaku warga kasta Sudra/Jaba yang secara turun temurun juga menyadari kedudukannya membuat kondisi tersebut berlangsung seakan saling menyadari siapa mereka.

Pola hubungan warga kasta berbeda pada lingkungan banjar adat bersifat lebih tertutup, artinya tidak ada pengaruh dari luar. Hal ini dimungkinkan karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya lebih dipengaruhi oleh eksistensi adat dan agama yang membingkai kondisi tersebut. Di dalam tradisi adat, khususnya yang berlaku di banjar yang dalam hal ini juga merupakan gambaran umum warna kehidupan masyarakat Hindu di Bali, bahwa nilai-nilai adat yang juga tidak terlepas dari nilai agama Hindu adalah merupakan garis linier yang menjadi jalur hidup bagi masyarakat secara turun temurun. Untuk itu apapun yang menjadi tatanan didalam peraturan bermasyarakat dan berprilaku bagi masyarakat Bali khususnya umat Hindu sudah merupakan keharusan

yang mesti dijalani. Termasuk didalamnya dengan perbedaan kasta yang memisahkan antara kehidupan individu satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut tersirat di dalam berbagai aktifitas kehidupan, dimana karena tugas dan kewajiban masing-masing kasta secara adat dan tuntutan agama membuat warna perbedaan tersebut semakin menguatkan kedudukan masing-masing. Dan hal tersebut selain dilegitimasi oleh kedua unsur penting yakni adat dan agama, juga dikuatkan oleh nilai "status quo" baik dari kalangan yang memilikinya maupun oleh sebahagian besar pengakuan dari kalangan Sudra/Jaba itu sendiri.

Dengan demikian banjar adat yang merupakan sub komunitas dari desa adat adalah merupakan wahana kehidupan yang secara mikro memberikan gambaran umum (general) warna kehidupan tradisional yang berlaku di masyarakat adat dengan heterogenitas kastanya. Untuk itu, menyadari perbedaan yang terjadi, warga/krama yang menjadi anggota dari banjar adat tersebut tidak terlepas dari kondisi yang mengharuskan mereka saling menyadari kedudukan masing-masing dengan kedudukan yang disandangnya. Interelasi antar warga kasta berangkat dari saling menyadari kedudukan masing-masing, hal demikian sangat melatar belakangi nilai interaksi masing-masing kalangan, dimana mereka sadar betul bahwa kedudukan mereka dengan kasta yang berbeda adalah juga tuntutan di dalam berbagai sikap dan perilaku yang harus menggambarkan sesuai dengan kedudukannya. Namun demikian, masing-masing kalangan kasta yang ada di lingkungan banjar adat juga menyadari bahwa mereka saling

membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Terlepas dari perlu atau tidak perlu secara langsung atau tidak langsung, keberadaan mereka saling menguatkan berlangsungnya ritus adat dan agama.

Di balik perbedaan yang ada kedudukan warga kasta berbeda tersebut, memberikan gambaran bahwa nilai-nilai yang berlaku tidak berjalan secara apa adanya, akan tetapi berjalan secara tertata sesuai aturan main yang berlaku secara tradisional menurut tuntutan adat dan agama. Gambaran tersebut tampak pada perilaku dan sikap warga Sudra/Jaba terhadap Triwangsa, juga sebaliknya. Hal tersebut berlangsung dengan penuh kesadaran dari masing-masing kalangan. Kasta Sudra/Jaba didalam menjalankan kehidupannya juga secara adat sangat membutuhkan kalangan Triwangsa untuk memimpin sembahyangnya, karena menurut kepercayaan hanya dari kalangan Triwangsalah yang dapat menjadi "Sang Surya" yaitu suatu kedudukan yang dapat memberikan jalan ke "alam" kehidupan lain setelah kematian. Dan pemimpin yang berkedudukan sebagai "Sang Surya" tersebut biasa disebut sebagai Moncol, yang dalam berbagai hal juga, dapat memberikan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan permasalahan adat. Di samping itu kekuasaan Moncol dengan "Air Sucinya" (tirta suci) adalah merupakan inti kekuasaan secara adat yang tidak dapat dipegang oleh kalangan lain selain dari Triwangsa (Brahmana). Untuk itu secara tradisional kedudukan

Triwangsa dan Sudra/Jaba masih tercipta sistem pola "*Pasiwaan*"<sup>56</sup> yaitu sistem hubungan antara *Siwa* dan *Sisia*, di mana hubungan orang dari kasta Brahmana sebagai pemimpin upacara di sini sebagai pendeta (pedanda) dengan kasta-kasta lainnya sebagai *Sisia*, yaitu orang-orang yang patut dipimpin upacaranya. Dengan demikian, hubungan tersebut juga merupakan hubungan "*patronase*" yang berlangsung secara turun temurun diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sebagai warga/krama banjar adat yang dibedakan oleh kasta-kasta yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, kondisi yang bersifat "*patronase*" antara kasta yang memimpin dan kasta yang dipimpin tidaklah merupakan sesuatu hal yang menjauhkan jarak diantara keduanya, justeru keberadaan tersebut mengukuhkan bahwa nilai adat yang berlangsung sudah berjalan sebagaimana adanya. Di sini nilai kesadaran dari khususnya kalangan Sudra/Jaba adalah sangat tinggi, bahkan diungkapkan dari kalangan Sudra/Jaba bahwa nilai penghargaan mereka terhadap kedudukan sang Moncol atau pemimpin adat tersebut sangat tinggi melebihi nilai penghargaan terhadap pemimpin lainnya, bahkan sekilas pemimpin tersebut disimbolkan sebagai "raja" yang memberikan pengayoman dari kehidupan mereka, baik di dunia maupun nanti di alam sesudah mati.

Gambaran tentang interelasi warga kasta berbeda di lingkungan banjar adat adalah gambaran tentang pola hubungan antara warga kasta

---

<sup>56</sup> I Gusti Bagus Ngurah, *Hubungan* ..... hal. 518.

berbeda, yang di dalam prakteknya masih sangat kental dengan berbagai nilai-nilai adat yang berlaku, di samping kondisi yang menuntut dari berbagai pihak/kalangan (kasta) bahwa nilai adat dan agama Hindu telah menggariskan nilai keharmonisan di dalam bersikap dan berperilaku, walau sekalipun di dalam pelaksanaannya ada nilai perbedaan yang bersifat prinsip, yakni membedakan kedudukan yang satu dengan yang lain lebih tinggi dan lebih rendah. Namun demikian, kondisi tersebut tidak merubah keadaan dan cara mereka di dalam menjalankan berbagai ritual keadatan dan keagamaan sekaligus menjalankan nilai-nilai kehidupan yang harus diperaktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga panorama yang dapat dilihat di dalam kehidupan masyarakat Bali, khususnya warga kasta berbeda di lingkungan banjar adat tercipta pola interelasi yang dilatar belakangi oleh nilai adat dan agama Hindu yang memperlihatkan saling menghargai kedudukan masing-masing kasta, walau dalam hal ini telah tercipta nilai hubungan yang bersifat hubungan "Pasiwaan". Namun demikian menurut pandangan adat dan agama Hindu itu adalah gambaran yang memiliki nilai "harmoni".

## **2. Pada Banjar Dinas**

Kedudukan banjar dinas adalah merupakan sub komunitas dari desa dinas, dimana kedudukan tersebut merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan negara yang dalam hal ini menempatkan warganya adalah sebagai warga negara republik Indonesia yang mempunyai

kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama, tidak dibedakan akan keberadaan warga baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok.

Sebagai warga negara yang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, tentunya didalam prakteknya dihadapkan pada persoalan siapa dan apa warga tersebut dihadapan negara. Khususnya bagi warga masyarakat Bali adalah tidak jauh berbeda dengan warga negara lainnya di tempat lain, yakni harus tunduk dan patuh pada peraturan pemerintah dengan tidak harus melihat siapa dirinya. Di dalam hal ini, pengaruh external lebih dominan menempatkan warga/krama dari anggota banjar dinas yang dengan demikian warga kasta berbeda lebih membuka diri dari tuntutan kondisi yang tidak lagi harus melihat kepentingan individu atau golongan di dalam rangka melaksanakan kepentingan bersama yang diarahkan oleh negara untuk nilai-nilai yang bersifat pembangunan secara keseluruhan.

Interelasi warga kasta berbeda yang terjadi di lingkungan banjar dinas adalah interelasi yang bermuatan politik, di mana sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan tuntutan yang harus dilaksanakan sebagai warga negara seperti membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), memiliki kartu keluarga dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang menjadi suatu keharusan untuk dimiliki oleh seluruh warga tidak terkecuali siapapun dia. Demikian juga dengan hak-hak lain sebagai warga negara yang berdaulat, dimana pada setiap diadakannya

pemilihan umum akan diberikan hak memilih kepada semua warga untuk memilih wakilnya.

Kondisi kewargaan yang ada di lingkungan banjar maupun desa tidak terlepas dari kemampuan dan perhatian dari klian banjar dinasnya di dalam menjalankan berbagai aktifitas menyangkut tugas, kewajiban serta tanggung jawab terhadap warga yang ada di lingkungan wilayahnya. Karena bagaimanapun keberadaan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab tersebut berbeda dengan apa yang terjadi pada banjar adat. Di sini yang menjadi penanganannya bukan saja warga yang sudah terikat oleh nilai-nilai adat dan agama Hindu, namun lebih dari itu di dalamnya terdapat warga yang non-Hindu yang tentunya dalam berbagai pelayanan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga tidak terikat oleh nilai-nilai yang ada tersebut. Dengan demikian, ada kemungkinan di dalam berinterelasi antar warga yang ada tidak hanya melibatkan warga yang berbeda kasta, namun juga warga yang berada di luar ikatan kewangsaan atau kasta tersebut.

Di samping kondisi tersebut di atas pola interelasi warga kasta yang terjadi pada banjar dinas lebih difokuskan pada nilai-nilai dan ketentuan yang menyangkut hubungan masyarakat dan negara. Dalam hal ini, kewajiban sebagai warga negara dituntut untuk patuh pada apa yang menjadi ketentuan negara dalam hal ini pemerintah. Sebagaimana

fungsinya, menurut Miriam Budiardjo<sup>57</sup> bahwa salah satu fungsinya negara adalah melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Di sini negara dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai "Stabilisator", di samping itu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dengan demikian, peran dan fungsi banjar dinas maupun desa dinas pun adalah tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo tersebut.

Sebagai warga banjar dinas, ketentuan yang dihadapi adalah merupakan orientasi warga negara di dalam konteks kepentingan negara untuk mengehawatirkan pembangunan di dalam berbagai bidang. Untuk itu, warga negara yang ada di lingkungan desa atau banjar adalah juga merupakan unsur-unsur penting yang menjadi ujung tombak dari pembangunan yang diselenggarakan negara tersebut. Dengan demikian, interelasi warga kasta berbeda pada banjar dinas dituntut untuk turut serta melaksanakan tujuan negara atau pemerintah tersebut dengan tidak mempermasalahkan perbedaan faham yang terdapat di kalangan tersebut.

Dari tuntutan yang ditujukan kepada warga kasta berbeda yang ada di lingkungan banjar dalam hal ini banjar dinas, maka interelasi yang terjadi pada warga kasta berbeda untuk melaksanakan berbagai kepentingan yang telah menjadi garis kebijaksanaan negara yang secara

---

<sup>57</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hal. 46.

vertikal ke bawah adalah merupakan instruksi, haruslah mengedepankan kepentingan tersebut. Dan dalam hal ini interelasi warga kasta berbeda dalam lingkungan banjar dinas harus lebih mengutamakan kebersamaan, dalam arti tidak memanfaatkan latar belakang yang berkaitan dengan sistem faham yang berlaku pada banjar adat. Bahkan peranan warga kasta yang berkaitan dengan permasalahan administratif lebih didominasi oleh kemampuan intelektual individu dan kedudukannya sebagai warga yang telah mencapai tingkat kedudukan tertentu di tempat dimana mereka bekerja atau berkarya. Dengan demikian pengaruh dari kedudukan dan kemampuan tersebut, tentunya warga kasta Sudra/Jaba akan lebih banyak berperan, karena secara kuantitas kalangan ini selain menjadi mayoritas dari penduduk Bali pada umumnya juga saat ini mereka lebih banyak mencapai keberhasilan di bidang pendidikan dan pemerintahan. Untuk itu secara langsung atau tidak langsung di luar acara ritual adat dan agama kedudukan mereka secara kuantitas di dalam bidang-bidang tertentu lebih tinggi dengan kedudukan dari kalangan Triwangsa. Dan kondisi seperti ini tentunya akan sangat mempengaruhi peran mereka di lingkungan di mana mereka berada. Dari inti nilai fungsi vertikal dan horizontal di dalam kedinasan tidak dipengaruhi oleh nilai kedudukan dan kewangsaan yang ada, namun akan lebih dipengaruhi oleh nilai kedudukan dan peran serta kemampuan intelektualitas individu di dalam masyarakatnya. Sehingga interelasi warga kasta di dalam lingkungan banjar dinas ini lebih

berorientasi pada kemampuan individu di dalam melakukan kerjasama dengan sesama warga yang berada di lingkungan komunitas tersebut.

Kedudukan dan peran di luar sistem nilai adat, tidak lagi berpengaruh secara prinsip di dalam melakukan interelasi untuk memutuskan berbagai keputusan yang berkaitan dengan kepentingan yang dituntut oleh pemerintah. Pertanyaannya sekarang adalah dalam permasalahan atau persoalan apa warga melibatkan semua kalangan dari kasta berbeda di dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu yang dalam hal ini menjadi satu kewargaan yaitu warga banjar. Tentunya berbagai permasalahan yang terjadi adalah merupakan tanggung jawab bersama warga yang pada gilirannya harus mengambil sikap untuk menentukan keputusan apa yang harus diambil dengan tidak melihat perbedaan paham yang ada, selama hal itu tidak ada kaitannya dengan permasalahan atau mengganggu kepentingan adat. Dan tentunya di dalam hal ini saling menghargai dan menghormati atas sesama warga individu atau krama banjar dinas dengan tidak melihat perbedaan kasta, selama keputusan yang diambil tersebut menyangkut kepentingan bersama dan nilai konsekuensinya juga dipertanggungjawabkan bersama.

Berangkat dari kepentingan bersama tersebut di atas, interelasi warga kasta berbeda yang berlaku di lingkungan banjar dinas adalah menuntut nilai kebersamaan dengan tidak mengedepankan persoalan kewangsaan. Karena dalam melakukan atau melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagai warga negara tidak dituntut atas dasar tugas dan

kewajiban yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai dan ikatan-ikatan adat, namun tuntutan akan lebih berorientasi pada nilai tanggungjawab warga atas kedudukannya sebagai warga yang berkewajiban untuk turut serta membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan mewujudkan berbagai pembangunan di segala bidang baik fisik maupun non-fisik demi peningkatan kesejahteraan yang dicita-citakan bersama.

Gambaran pelaksanaan interelasi warga kasta berbeda pada lingkungan banjar dinas di dalam melakukan sesuatu keputusan, yaitu warga melakukan musyawarah bersama dengan tujuan untuk menentukan sikap di dalam memutuskan sesuatu atas dasar ketentuan yang berlaku dan atas kesadaran warga. Dengan diawali bahwa konteks permasalahan adalah kepentingan yang secara vertikal ke bawah datangnya dari negara/pemerintah yang ditujukan kepada warga negara yang ada di lingkungan banjar dinas yang merupakan unit terkecil di dalam pemerintahan. Kemudian secara fungsional warga yang ada di lingkungan banjar tersebut diwajibkan untuk ikut mewujudkan berbagai permasalahan yang telah dijabarkan sebagai program-program yang harus dilaksanakan. Untuk itu, keberadaan warga sangat menentukan lancarnya program-program tersebut, karena bagaimanapun di dalam pemerintahan berlaku nilai "keberhasilan" yang harus dicapai oleh lembaga di bawahnya. Dengan demikian, tidak terkecuali tuntutan tersebut adalah juga ditujukan kepada warga yang dalam hal ini merupakan unsur penentu berhasil tidaknya pelaksanaan program tersebut.

Interelasi yang melibatkan warga kasta berbeda di lingkungan banjar dinas keterkaitannya dengan kepentingan negara di atas adalah interelasi yang berangkat dari pandangan kesetaraan (egaliter), di mana warga tidak dilihat sebagai kelompok-kelompok yang terpisah antara satu dengan yang lain. Namun, dilihat sebagai warga negara yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Untuk itu, pelaksanaan dari interelasi tersebut mempunyai pola yang berlainan dengan pola interelasi yang berlaku pada banjar adat, yang nuansa kebersamaannya walau berkesan "dipaksakan" masih tetap melahirkan partisipasi yang diharapkan.

Di samping itu, di dalam interelasi warga kasta berbeda pada lingkungan banjar dinas, peran pemimpin atau yang dianggap tokoh adat keterlibatannya adalah untuk ikut menyadarkan atau mungkin menyakinkan kalangan-kalangan kasta tertentu yang partisipasinya masih setengah hati. Namun secara keseluruhan keberadaan pemimpin atau tokoh adat tidak ikut menentukan keputusan sebagaimana hal tersebut berlaku pada banjar adat, di sini peran atau kedudukannya tidak lebih hanya sebagai penasehat yang dimanfaatkan untuk konsultasi.

#### **F. Kepemimpinan dan Sistem Pemilihan Klian pada Banjar**

Bagi masyarakat Bali keberadaan banjar sebagai lembaga adat sekaligus lembaga dinas yang mengatur berbagai hal menyangkut permasalahan kemasyarakatan dan administrasi dari pemerintahan. Hal ini

dibutuhkan struktur kepemimpinan yang mampu mengadaptasi kepada kondisi yang saling berkepentingan antara satu dan lainnya.

Banjar yang dalam hal ini bedimensi ganda memiliki pola kepemimpinan yang berbeda. *Pertama*, dengan dimensi adat dihadapkan pada permasalahan yang menuntut kepemimpinan yang harus memenuhi berbagai syarat berkaitan tidak saja memiliki kemampuan menjalankan segala permasalahan yang berkaitan dengan adat itu sendiri, namun lebih dari itu harus memiliki kemampuan dalam persoalan keagamaan. *Kedua*, pengertian yang berbeda tetapi membutuhkan pemahaman yang menyatu. Pada masyarakat Bali, nilai sikap dan perilaku tidak terpisahkan dari agama dan adat, dimana adat dijalankan disitu pula agama dilaksanakan. Hal tersebut merupakan konsep dasar tri hita karana yang selalu melatarbelakangi berbagai sikap dan perilaku masyarakat Bali di dalam kehidupannya. Dengan demikian kepemimpinan yang pada lingkup dan ruang yang bedimensi seperti digambarkan di atas tidaklah mudah, karena khususnya dalam kepemimpinan adat baik itu pada desa adat maupun banjar adat sama-sama diperlukan kemampuan yang telah disebutkan di atas. Hal ini penting karena disitulah tuntutan masyarakat yang lebih dominan.

Kepemimpinan adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain bisa bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpinnya. Kadangkala kepemimpinan dibedakan atas kepemimpinan sebagai kedudukan dan

kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Pada masyarakat Bali masalah kepemimpinan tidak terlepas dari ruang yang melingkupinya yakni berkaitan dengan adat dan agama Hindu, hal mana tidak dapat dibantah lagi karena bagi umat Hindu khususnya masyarakat Bali, agama Hindu merupakan hukum atau aturan yang membimbing umat dalam usahanya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan bathin. Dengan demikian azas kepemimpinan dalam Hindu mengharuskan seorang pemimpin harus betul-betul rela berkorban demi kepentingan masyarakat dan dunia (bersifat universal). Disinilah tugas berat seorang pemimpin, tidak hanya menjadikan dirinya saja yang melakukan dharma tetapi juga seluruh rakyatnya.

Konsep kepemimpinan selain yang terurai tersebut di atas, masyarakat Hindu di Bali memiliki konsep lain yaitu kepemimpinan Astabrata.<sup>58</sup> Konsep ini diambil dari kakawih Ramayana yang tercermin dalam nasehat Sang Rama kepada adiknya Sang Barata, menurut ajaran Astabrata ini sifatseorang pemimpin semestinya memnuhi delapan syarat, atau delapan kewajiban atau pedoman yang meliputi : (1) *Surya Brata*, yaitu melenyapkan segala kegelapan, memperhatikan rakyatnya secara

---

<sup>58</sup> G.K. Adia Wiratmadja, "Kepemimpinan Hindu". (Denpasar : Yayasan Dharma Naradha, 1995), hal. 39-51

aman dan sentosa, (2) *Chandra Brata*, sifat rembulan selalu memberikan penerangan (kesenangan) kepada siapa saja yang melihatnya, demikian hendaknya bagi seorang pemimpin selalu dapat menarik rakyatnya dalam memberikan nasehat ataupun perintah dengan kata-kata manis dan senyum, (3) *Bayu Brata*, sifat ini seperti angin, seorang pemimpin diharapkan selalu mengetahui segala tingkah laku dan pemikiran rakyatnya tanpa diberitahu dan dapat menenangkan ketegangan atau kerusuhan, (4) *Dhana Brata* atau *Kuwera Brata*, merupakan dewa kekayaan atau kemakmuran. Ajaran yang terkandung dalam *Kuwera Brata* ini adalah agar si pemimpin dapat memberikan contoh bagaimana bertingkah laku yang baik, menjadi suri tauladan dalam ketrampilan; (5) *Paca Brata* adalah dewa laut baruna yang mempunyai senjata yang berbisa, disini merupakan lambang ilmu pengetahuan, sehingga seorang pemimpin yang berpengalaman luas akan dapat memberikan buah pikiran bagi bawahannya. Dengan ilmu pengetahuan orang lebih bijaksana; (6) *Agni Brata*, seperti sifat dewa Agni adalah selalu membakar musuh. Dalam hal ini seorang pemimpin diharapkan mempunyai semangat yang besar dalam membangun negara; (7) *Indra Brata*, seperti dewa Indra yaitu sebagai dewa air yang mempunyai tugas untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat; (8) *Yama Brata*, dewa *Yama* adalah dewa penegak hukum dan keadilan. Sesuai dengan hukum karma-pala, perbuatan yang baik akan mendapat hukuman yang setimpal pula.

Di dalam agama Hindu masih banyak didapatkan pedoman maupun aturan-aturan yang patut dilaksanakan oleh seorang pemimpin, salah satu ajaran tersebut adalah apa yang disebut catur *H* yaitu : *Hening*, *heneng*, *heling*, dan *hawas*. *Hening* artinya selalu mengutamakan kesucian, bekerja atas kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa. Manusia harus selalu ingat sifat aslinya. *Heneng*, artinya berusaha untuk mendapatkan keterangan lahir dan bathin, sebab dengan ketenanganitu orang dapat bekerja dengan lebih sempurna. *Heling*, artinya selalu ingat kepada orang tua, ingat akan rakyat dan ingat tugas kewajiban yang dibebankan di atas pundak. *Hawas*, artinya waspada terhadap datangnya segala kemungkinan, percaya pada diri sendiri. Konsep kepemimpinan tersebut menunjukkan bahwa pemimpin harus agamis, yaitu menjalankan, mengamalkan, dan mengamankan ajaran agama, dan hal ini terutama lebih berlaku pada pola kepemimpinan banjar adat dan desa adat.

Pada banjar berlaku selain kepemimpinan masa kini (formal) yang dalam hal ini berhubungan dengan masalah kedinasan atau administratif juga berlaku pola kepemimpinan yang bersifat tradisional formal. Yang dimaksud dengan kepemimpinan tradisional yang formal adalah mencakup pimpinan keadatan, baik dalam desa maupun banjar. Pimpinan ini secara resmi ada dan diakui kedudukannya dan mempunyai peranan yang cukup besar dalam kepemimpinannya. Warga komunitas atau warga masyarakat memandang pimpinan ini sebagai orang-orang yang mengetahui persoalan-persoalan adat dan agama. Dan karena

itu merupakan tempat untuk bertanya atau meminta bantuan bila para warga menghadapi persoalan tersebut. Pimpinan tradisional ini secara struktural maupun fungsional mempunyai peranan yang demikian besar dalam menanta kehidupan warga banjar atau desa sebagai bentuk suatu komunitas.

Dalam masalah agama para pimpinan tradisional yang formal ini diharuskan menguasai beberapa hal yang berhubungan dengan masalah agama yang dianut oleh warga masyarakat (dalam hal ini agama Hindu). Untuk itu para pimpinan ini setidaknya-tidaknya dapat menguasai sistem filsafat dari agama yang ada dianut. Hubungan dengan hal itu para pimpinan ini tidak jarang harus bertindak cepat dan ikut menangani apabila pada suatu upacara agama yang sedang berlangsung terjadi masalah. Karena itulah pimpinan seperti ini, disamping harus mengetahui berbagai berkaitan dengan pengetahuan agama dan adat, juga dituntut untuk berperan secara aktif dalam setiap kesempatan yang memerlukan tenaga dan pikiran mereka. Selain itu beberapa kewajiban penting dari para pimpinan ini antara lain berkisar pada kewajiban adat adalah ; menyelesaikan perselisihan adat, menjadi saksi dalam suatu penyelesaian adat, memimpin pelaksanaan suatu upacara adat, dan memelihara ketentraman banjar.

Pada beberapa banjar, sebagai motivator dalam melaksanakan berbagai kegiatan adalah pimpinan yang mempunyai wewenang dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tugas utama sebagai pengorganisasian

kegiatan adalah memimpin segenap warga banjar, yang meliputi tugas-tugas administrasi, penyelesaian perselisihan, membina kelompok yang ada di banjar, mengembangkan ide-ide untuk kesatuan dan persatuan yang saling memberi fungsi atas sistem agama secara keseluruhan. Upacara atau acara ritual sebagai salah satu kerangka dasar dalam agama Hindu tersebut merupakan rangkaian kegiatan umat dalam upaya berkomunikasi dengan Tuhan-nya (*Sang Hyang Widhi Wasa*), *Atman*, *Leluhur*, *Rsi* atau *Guru*, Manusia, dan Alam sekitar. Upacara keagamaan diwujudkan dalam bentuk persembahan atau korbam suci (*Yadnya*), dan dihayati sebagai manifestasi konkret agama.

Sementara itu sistem pemilihan pemimpin banjar yang disebut Klian Banjar, baik untuk Klian Adat ataupun Klian Dinas berlangsung secara demokrasi. Namun demikian ada persyaratan tertentu khususnya Klian Adat, dimana diharuskan orang yang dipandang cukup mampu menguasai pengetahuan tentang acara-acara ritual keadatan dan keagamaan yang berlaku, selain itu orang tersebut haruslah dari kalangan keluarga yang dinilai memiliki kelebihan di lingkungannya. Dari apa yang dipersyaratkan tersebut, tidaklah berlaku untuk Klian Dinas, karena khusus untuk Klian Dinas ini tidak berlaku ketentuan yang terlalu berat.

Pemilihan Klian Adat dimulai dengan peninjauan warga anggota banjar terhadap orang-orang yang diperkirakan mampu, cocok, dan menyenggupi untuk menduduki jabatan klian Adat. Dalam kondisi seperti ini, peranan Pinisepuh (tokoh tua) sangat besar untuk menentukan siapa

yang akan dipilih. Apabila didalam pemilihan tersebut terdapat lebih dari satu calon, maka peranan majelis banjar mengadakan pemungutan suara secara demokratis untuk menentukan siapa yang akan menjabat Klian Adat tersebut. Apabila di dalam pelaksanaan pemilihan tersebut telah ditentukan siapa yang dipilih atau terpilih, maka yang terpilih tersebut berhak untuk menunjuk aparatnya yang dapat membantu tugasnya di dalam menjalankan pelayanannya kepada warga. Jabatan Klian Adat per periodiknya adalah selama lima tahun. Seperti diketahui, bahwa didalam memilih untuk dijadikan Klian Adat ini penjangakan dilakukan dalam kurun waktu tidak sebentar, artinya warga/krama banjar telah memperhatikan dan menyimak seseorang didalam berbagai kesempatan terutama dalam pelaksanaan acara-acara pada upacara yang dilakukan baik oleh banjar itu sendiri maupun oleh desa adat.

### **BAB III**

#### **PERUBAHAN SIMBOL-SIMBOL PERILAKU PADA WARGA KASTA BERBEDA DI DALAM MELAKUKAN INTERELASI P DI LINGKUNGAN BANJAR ADAT DAN BANJAR DINAS**

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran perubahan simbol-simbol yang ada dalam perilaku warga kasta berbeda di dalam melakukan interelasi diantara mereka yang terjadi di lingkungan banjar adat dan banjar dinas dengan terlebih dahulu melihat berbagai interelasi warga kasta berbeda di luar lingkup banjar yang dapat mempengaruhi seperti interelasi pada lingkungan pekerjaan, interelasi pada lingkungan sekolahan / Kampus, dan interelasi pada lingkungan organisasi.

#### **A. INTERELASI WARGA KASTA BERBEDA DI LUAR LINGKUNGAN BANJAR**

Sebagaimana telah disinggung pada bab I bahwa kedudukan kasta pada masyarakat Bali telah mengalami perkembangan yang sangat berarti, artinya secara praktek sosial pemberlakuan yang menempatkan kasta yang lain dalam hal ini kasta Sudra/Jaba pada kedudukan yang lebih rendah, ini tidak berlaku lagi, kendatipun hal tersebut tidak berlaku pada praktek adat. Namun demikian, kesadaran masyarakat umat Hindu di Bali secara keseluruhan telah menerima batasan-batasan yang membedakan antara individu atau kelompok dalam peran dan fungsi dimana aturan mainnya berlainan.

Pada perkembangannya saat ini, warga kasta berbeda ditempatkan pada dua konteks yang berbeda, pertama dalam konteks adat, dimana aturan-aturan yang berlaku di dalamnya menempatkan warga kasta berbeda dalam kedudukan yang berbeda sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Sementara konteks yang kedua adalah konteks dinas/negara, dimana warga kasta berbeda ditempatkan pada kedudukan yang sama. Apabila secara adat dan keagamaan menurut Hindu masyarakat Bali dari kalangan Sudra/Jaba telah sangat menyadari akan fungsi dan perannya, maka pembedaan yang diberlakukan lebih dikarenakan kedudukan yang sama-sama saling bergantung antara satu dan lainnya. Untuk itu, tidak ada istilah "kecemburuan" didalamnya. Namun apabila perbedaan itu diberlakukan pada kehidupan secara nyata dalam bermasyarakat, hampir seluruh masyarakat khususnya dari kalangan Sudra/Jaba tidak dapat menerimanya. Hal ini karena disebabkan bahwa praktek kekastaan yang demikian itu tidak lagi sesuai dengan pandangan kesetaraan yang berperinsip nilai-nilai bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama. Nilai kesetaraan adalah inti dari nilai kebersamaan dan kebebasan dari kehidupan masyarakat yang demokratis. Dengan demikian penyalahgunaan arti dari pembedaan yang diberlakukan adat dan keagamaan, tidak lagi sah apabila diberlakukan pada nilai-nilai hidup dalam masyarakat di luar tuntutan adat dan keagamaan sekalipun itu pada adat dan agama Hindu.

Untuk menjaga berlangsungnya hubungan antar warga kasta berbeda, maka semua pihak baik itu kasta Sudra/Jaba maupun Triwangsa masing-masing memanfaatkan ruang dan waktu, kapan, dengan siapa, dan bagaimana mereka berinterelasi. Dalam kondisi tuntutan adat yang selama ini tidak pernah ada permasalahan karena kesadaran terlahir dalam suasana kesefahaman. Sementara tuntutan perkembangan sosial, dimana hubungan antar warga telah menemui titik perubahan yang menempatkan kedudukan bersifat tradisional tertutup dan kolektif itu tidak lagi berlaku pada hubungan yang bersifat dinas atau negara, karena dalam pandangan dinas atau negara ini kedudukan bersifat terbuka (publik). Dengan demikian, interelasi di dalam konteks yang bersifat terbuka tidak terikat lagi oleh aturan-aturan yang berlaku pada konteks adat.

Untuk lebih jelasnya gambaran tentang interelasi antar warga kasta berbeda yang terjadi pada lingkungan banjar adat dan banjar dinas, terlebih dahulu kita melihat gambaran interelasi warga kasta berbeda pada tempat dan kondisi yang berbeda. Karena dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pada kenyataannya akan terlihat perubahan simbol-simbol warga kasta berbeda di dalam melakukan interelasi diantara tuntutan adat dan tuntutan dinas. Untuk itu yang akan kita lihat adalah perubahan simbol-simbol pada warga kasta berbeda di dalam melakukan interelasi yang terjadi pada lingkungan tempat pekerjaan, pada lingkungan sekolahan/kampus, dan pada lingkungan organisasi.

### **Interelasi pada Lingkungan Pekerjaan**

Di dalam berinterelasi antara warga kasta berbeda dalam berbagai lingkungan nampak warga masing-masing kasta memanfaatkan kesempatan untuk mengekspresikan kewangsaannya dalam bentuk-bentuk berlainan. Di sisi lain warga kasta Sudra/Jaba dalam tuntutan adat sudah tidak mungkin melakukan ekspresi yang berlawanan, akan tetapi di dalam kesempatan lain peluang untuk berekspresi memberikan tempat pada kalangan kasta ini seperti bersaing dalam mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di dunia pekerjaan baik itu dalam instansi pemerintahan maupun swasta. Menyadari persoalan kasta sulit untuk dapat berubah atau dirubah sesuai dengan tuntutan jaman, sementara kalangan yang merasakan keberadaannya "direndahkan" oleh kondisi tersebut telah merasa bahwa perubahan harus dilakukan oleh kalangan yang rendah itu sendiri dengan berbagai cara dan jalan yang memungkinkan.

Dengan berlatar belakang bahwa perbedaan pandangan dari kedudukan kasta yang satu lebih rendah dari yang lainnya hanya berlaku pada lingkup adat, maka bagi kalangan Sudra/Jaba merasa tidak ada salahnya untuk menjalankan cara yang strategis memperkokoh kondisi mereka di dalam menguasai dunia pendidikan dan pengetahuan, karena kemampuan tersebut dapat memberikan nilai yang akan mengangkat harkat martabat. Sebagaimana diketahui bahwa sejak berkembangnya dunia intelektual di kalangan kasta Sudra/Jaba membuat kalangan ini banyak

mengadakan gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan dalam hal membedakan tinggi dan rendahnya antara satu kasta dengan kasta yang lain di dalam kehidupan sosial. Sehingga dengan penguasaan dan kesempatan yang dimasa lalu hanya dapat dimanfaatkan oleh kalangan Triwangsa, kini dapat diraih oleh kalangan Sudra/Jaba. Dan hal tersebut telah banyak dibuktikan dimana tidak sedikit kedudukan yang bersifat terbalik contohnya sudah banyak kalangan Sudra/Jaba yang menjadi tokoh-tokoh elit dalam pemerintahan, baik di provinsi Daerah Tingkat I Bali maupun di Daerah Tingkat II. Walaupun masih ada beberapa orang dari kalangan Triwangsa yang masih merasa apabila kedudukan Sudra/Jaba dalam pekerjaan adalah sebagai atasannya akan menimbulkan terjadinya suasana yang riskan pada kedua belah pihak baik sang atasan maupun bawahannya untuk melakukan hubungan kerja sebagaimana telah menjadi tuntutan tugasnya. Karena kondisi tersebut sering menempatkan posisi Sudra/Jaba pada perasaan yang serba salah karena disisi lain ia harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi disisi lain pihak Triwangsa merasa tidak menerima. Mengapa demikian, lebih jauh hal tersebut dikemukakan oleh seorang subyek penelitian :

.....Dengan telah banyaknya warga kasta Sudra/Jaba yang berhasil meraih pendidikan yang lebih tinggi membuat keberadaannya mampu menduduki berbagai kedudukan di instansi pemerintah maupun swasta yang dengan kondisi tersebut menempatkan mereka dalam kedudukan yang terhormat dan berhak mendapatkan kehormatan atas kedudukannya tersebut dari semua anggotanya yang berada di bawah wewenangnya termasuk tentunya dari kalangan Triwangsa. Di dalam lingkungan pekerjaan simbol-simbol yang

terdapat pada tatanan adat sudah tidak berlaku sebagaimana lazimnya adanya, karena yang berlaku adalah aturan publik atau negara, siapa yang kedudukannya tinggi dia yang memimpin. Jadi apabila anggota dari kalangan Triwangsa di dalam kepentingan adat di panggil "ratu" di sini mendapat panggilan yang seragam yakni "bapak". Namun demikian, tidak sedikit mereka dari warga Triwangsa yang tidak dapat "menerima" kenyataan tersebut sehingga banyak menciptakan hubungan yang kurang serasi baik itu di tempat bekerja maupun di lingkungan mereka tinggal. Hal ini terjadi karena tidak sedikit pula kaum Sudra yang telah berhasil menjadi seorang atasan pada suatu instansi atau perusahaan swasta sering bersikap "over acting" kepada bawahannya yang kebetulan kaum Triwangsa, sehingga membuat tidak terimanya perlakuan tersebut .....<sup>59</sup>

Fenomena di atas seiring dengan apa yang dialami oleh Klian Banjar Belong yang sehari-harinya sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas di kantor Dinas Peternakan Kotamadya Badung, iapun mengalami hal serupa berkenaan dengan persoalan yang menyangkut hubungan dengan bawahannya yang kebetulan dari kalangan Triwangsa, selain itu merekapun tinggal dalam satu daerah, yaitu di banjar Belong, persoalan timbul sebagaimana dikemukakannya :

.....Pada salah satu bagian dimana saya menjadi atasan dari beberapa orang pegawai yang ada. Salah seorang dari mereka adalah Triwangsa, yang kebetulan tempat tinggalnyapun satu banjar. Hubungan kami semula cukup akrab baik di kantor maupun di banjar, namun setelah saya menjadi atasannya terjadi perubahan yang kurang mengenakan. Awalnya saya menyadari betapa kondisi seperti saat ini memang membuat saya agak risih karena bagaimanapun tugas kantor adalah tugas tim yang segala sesuatunya harus dikerjakan bersama. Dan yang lebih tidak enak lagi hubungan dalam aktivitas banjar menjadi kurang serasi, walau saya dan istri sudah berusaha bersikap biasa saja, mereka lebih banyak menghindar apabila diajak rembukan, padahal sebelumnya

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Komang Widiada, pada tanggal 16 Agustus 1998

selalu berkumpul bersama. Di sini mungkin perasaan masih belum dapat menerima kalau saya yang dari Sudra/Jaba menjadi atasannya. Padahal, apabila pengertian antara peran dan fungsi difahami oleh warga kasta berbeda bahwa kedudukannya sebagai warga yang memiliki peran dan fungsi tetap dalam lingkungan adat, maka tidak ada alasan untuk berpikiran direndahkan oleh warga yang lebih rendah, dan hal ini telah saya buktikan dengan tetap memperlakukan mereka sebagaimana aturan main yang berlaku pada adat .....<sup>60</sup>

Lain lagi dengan yang dialami oleh salah seorang karyawan pada lingkungan Pabrik Textil di kawasan Denpasar, dia mendapat kesulitan di dalam berinterelasi dengan rekan-rekan sekerjanya yang berkasta Triwangsa kebetulan menjadi salah seorang bawahannya. Bahkan sikap demikian itupun diperlihatkan oleh Triwangsa tersebut kepada atasannya (Kepala Bagiannya) yang kebetulan bukan orang Bali, lebih jauh pengalaman ini dikemukakan sebagai berikut :

.....Kesulitan saya di dalam berkomunikasi dalam kaitannya dengan pekerjaan, karena salah seorang rekan yang kebetulan dibawah wewenang saya adalah seorang Triwangsa (Ide Bagus), persoalannya hanya karena dia tidak pernah mau mengerti bahwa antara pekerjaan dan kedudukannya dalam adat harus dipisahkan, untuk itu tidak ada alasan apabila segala tugas yang dilimpahkan harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku karena menurut saya bekerja disini sama-sama mencari nafkah dan bukan bekerja di tempat miliknya nenek moyang sendiri. Karena apabila dimintakan padanya untuk melakukan pekerjaan sesuai kondisi tersebut dia sering tidak memperhatikan petunjuk yang diberikan khususnya dari saya walau disampaikan dengan tutur kata yang menurut saya sudah baik sebagaimana lazimnya yang berlaku pada adat, dan inipun telah menjadi permasalahan sendiri bagi kepala bagian kami. Penilaian kami adalah bahwa kondisi tersebut dikarenakan tidak menerimanya dia apabila mendapat tugas dan petunjuk dari saya lebih disebabkan karena perbedaan kasta. Sebetulnya masalah ini sudah saya rasakan semenjak lima tahun lalu, sejak

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Klian Banjar Belong pada tanggal 18 Agustus 1998

saya di tempatkan pada bagian yang sama. Hanya yang menjadi heran sampai sekarang mengapa dia tidak di tempatkan pada bagian lain yang sekiranya orang yang menjadi atasannya berkasta setara, atau karena kondisi tersebut tidak dianggap merugikan perusahaan.....<sup>61</sup>

Kondisi seperti disampaikan di atas adalah fenomena yang sebetulnya sudah biasa terjadi pada masyarakat Bali khususnya warga kasta berbeda yang tidak mengerti tatanan yang berlaku yang semestinya baik pada lingkungan adat maupun di luar lingkungan adat. Karena tidak semua warga kasta berbeda yang berada di Bali mengetahui dan mempraktekkannya, hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa masih ada sebagian kalangan Triwangsa yang masih tidak menerima perbedaan simbol-simbol perilaku yang diberlakukan di luar tatanan adat. Hanya persoalannya, apabila kondisi tersebut terus-menerus menjadi sentimen kasta, akan mengakibatkan rusaknya interelasi antara warga kasta itu sendiri.

### **Interelasi pada Lingkungan Sekolah/Kampus**

Faktor pendidikan merupakan sarana yang dapat menciptakan kondisi yang menyeimbangkan antara kedudukan warga kasta yang kedudukannya berada pada "posisi" yang rendah dengan yang tinggi. Komunikasi antar warga kasta berbeda akan sangat berbeda apabila warga kasta Sudra/Jaba berlatarbelakang pendidikan yang baik dengan warga Sudra/Jaba yang tidak berpendidikan, mereka akan sangat "terlihat" rendah

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Gde Antara pada tanggal 12 Juli 1997

dihadapan kasta Triwangsa. Hal mana seorang subyek penelitian mengemukakan lebih lanjut sebagai berikut :

.....Walaupun di dalam perkembangannya bahwa lewat kemajuan pendidikan yang telah lebih dari setengah abad di Indonesia dengan jargon bertujuan menciptakan manusia yang cerdas. Namun bagi masyarakat Bali khususnya sebagian kalangan kasta Sudra/Jaba masih menghadapi kesulitan di dalam melepaskan diri dari ikatan sistem kasta yang diperaktekan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena pengaruh yang belum pupus dari kenyataan yang ada bahwa kalangan kasta Sudra/Jaba sebagian besar masih harus menerima kenyataan terhadap eksistensi kasta Triwangsa dalam berbagai hal. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena sampai saat ini masih banyak kalangan warga kasta Sudra/Jaba yang masih berpendidikan kurang terutama yang bertempat tinggal di pedalaman sehingga membuat mereka tetap merasa kedudukannya masih lebih rendah dari kasta Triwangsa di dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat modern seperti dewasa ini, karenanya menyebabkan mereka terkesan sungkan mengadakan komunikasi dengan Triwangsa tersebut .....<sup>62</sup>

Kondisi tersebut masih nampak jelas terlihat salah satunya di Sekolah dan PerguruanTinggi bahwa warga kasta berbeda dalam hal ini para pelajar atau mahasiswa akan mengadakan komunikasi yang seimbang apabila antara satu dengan lainnya menyadari posisinya masing-masing, komunikasi antar pelajar/mahasiswa berbeda kasta tersebut dihadapkan kepada siapa dan bagaimana lawan bicara bagi kalangan Triwangsa, apabila lawannya sesama Triwangsa akan terjadi komunikasi yang datar-datar saja, lain halnya antar kasta yang berbeda dilihat dulu apa dan siapa

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Wayan Yuda Yasa, pada tanggal 16 Agustus 1998

yang berkepentingan komunikasi akan berbeda. Seorang subyek penelitian mengemukakan :

..... Sebagai sesama pelajar kita tidak pernah merasa ada perbedaan, baik di dalam berhubungan antar teman maupun dengan guru. Bahkan tidak sedikit hubungan antar pelajar berbeda kasta yang ada, berlanjut pada hubungan yang lebih intim, bagi pelajar laki-laki yang mendapatkan pelajar wanita yang menjadi teman dekatnya adalah merupakan hal yang biasa, demikian juga sebaliknya. Namun demikian yang membedakan keberadaan kami di sekolah adalah pada panggilan atau saat sapa-menyapa. Kepada sesama kasta sapaan biasa-biasa saja, bahkan sering dengan panggilan yang seenaknya, tetapi apabila pada Triwangsa kami akan menyapa nama mereka dengan baik atau panggilan nama depan dari kastanya seperti Gus, Gung, Dayu, dan lain dari itu di dalam bertutur kami bertutur dengan santun, dan lain sebagainya.....<sup>63</sup>

Lebih lanjut interelasi diantara pelajar dan pengajar (Guru) berbeda kasta, berlaku simbol-simbol perilaku di luar tatanan adat. Seorang murid akan memanggil Bapak atau Ibu Guru kepada gurunya, dan sebaliknya gurunya akan memanggil nama kepada muridnya sesuai dengan nama yang dimilikinya. Hal mana dikemukakan oleh subyek penelitian sebagai berikut :

..... Dalam berbagai kegiatan sekolah, baik kegiatan belajar di kelas maupun praktekum dan olah raga, sikap kami terhadap sesama pelajar tidak terikat oleh sistem adat yang berlaku, hanya mungkin untuk memanggil nama, kami sering memanggil nama depannya agar enak saja. Begitupun dengan gurunya, kami tidak memanggil Gusti Aji, Gusti Ayu, Gung Aji, dan lain sebagainya, namun cukup dengan memanggil Ibu atau bapak guru saja. Namun, perlakuan murid terhadap guru baik dari kalangan Triwangsa maupun dari Sudra/Jaba sangat hormat dan patuh sebagaimana harusnya. Di dalam persainganpun

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ketut Suarhana seorang pelajar SMU di wilayah Denpasar tanggal 19 September 1997 dan 12 September 1998.

berlaku persaingan yang tidak mengkaitkan dengan keberadaan kasta, hal ini terbukti sudah seringkali yang menjadi bintang pelajar di sekolah kami selalu dari kalangan Sudra/Jaba dan mereka dari kalangan Triwangsa tidak pernah ada yang tersinggung atau cemburu dengan kondisi tersebut .....<sup>64</sup>

Kondisi di atas menggambarkan pemberlakuan simbol-simbol adat dalam lingkungan sekolah tidak berlaku, karena simbol-simbol perilaku yang terjadi di lingkungan sekolah ini berlaku simbol-simbol kesetaraan atau publik. Tampaknya kedudukan seorang guru adalah sangat tinggi dalam kehidupan manusia termasuk di kalangan warga kasta berbeda. Karenanya sipapun dia baik dari Triwangsa ataupun dari Sudra/Jaba tidak ada perbedaan bagi muridnya. Prinsip kepatuhan kepada guru di dalam penyelenggaraan pelajaran berlaku bagi semua murid/pelajar, yang tentunya dalam hal ini tidak terbatas oleh dimensi adat. Untuk itu salah seorang pelajar dari kalangan Triwangsa yang duduk di kelas dua salah satu Sekolah Menengah Umum Denpasar mengemukakan

.....Bahwa hubungan antara guru dan murid bagi saya adalah hubungan antara murid yang menuntut ilmu dari gurunya dengan guru yang dituntutnya. Tidak pernah terpikirkan oleh saya hal-hal berkaitan dengan kedudukan dan peran dalam sistem kasta. Bahkan saya harus tunduk dan patuh pada peraturan sekolah dan terutama pada guru. Karena saya yakin nama saya yang bergelar Triwangsa tidak akan membuat nilai baik tanpa mau belajar dengan baik, saya dan kalangan Triwangsa lainnya tidak pernah mendapatkan perlakuan yang istimewa dari guru yang Sudra/Jaba. Demikian juga dengan para murid lainnya yang dari kalangan Sudra/Jaba tidak pernah terlihat melebihi rasa hormat kepada gurunya yang Triwangsa hanya dikarenakan kedudukannya di dalam kasta lebih tinggi, malah kami justru akan sangat lebih hormat

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Wayan Suwendra tanggal 19 September 1997 dan 12 September 1998.

kepada guru yang cara mengajar dan membimbingnya enak dan bijaksana serta tidak mentang-mentang.....<sup>65</sup>

Lain lagi dengan lingkungan kemahasiswaan, karena nuansa wawasan yang lebih luas dan kemampuan berfikir yang lebih kritis, interelasi antara warga kasta berbeda yang terjadi di lingkungan kemahasiswaan jauh lebih "merdeka", bahkan mereka lebih banyak bersikap memberontak dengan keadaan yang dilihatnya masih dipertahankan. Dari dunia ini muncul berbagai ide untuk mengembangkan cara baru di dalam berinterelasi antara warga yang berlainan kasta baik itu terjadi interaksi diantara mahasiswa itu sendiri, maupun antara mahasiswa dengan para dosennya.

Interelasi antara warga kasta berbeda pada mahasiswa dengan mahasiswa berproses pada situasi yang melahirkan "warga baru" yang terlepas dari ikatan nilai-nilai yang melatarbelakangi kehidupan masing-masing manusia, artinya tuntutan yang ada memaksa mereka harus sadar terhadap suatu situasi yang sedang dihadapi. Sebagai seorang mahasiswa. Dengan demikian baik mahasiswa dari kalangan Triwangsa maupun dari kalangan Sudra/Jaba sama-sama menempatkan dirinya pada posisi yang sama dalam kepentingan yang sama pula. Bahkan dari perkembangan yang ada tidak jarang hal-hal yang selama ini dianggap oleh kalangan Triwangsa sebagai suatu "pelencengan" yaitu hubungan yang banyak mengakibatkan

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Anak Agung Hendarta pada tanggal 20 September 1998

terjadinya "perjodohan" antara warga kasta berbeda tumbuh subur di arena kampus. Ini sebagai akibat dari proses kesadaran bahwa kesetaraan berlaku menyeluruh tidak terkecuali, walau tentunya dibalik penyelesaiannya berakibat lain karena harus berhadapan dengan sistem adat yang berlaku. Hal mana lebih jelasnya dikemukakan oleh salah seorang subyek penelitian :

.....Di dalam berhubungan dengan sesama mahasiswa kami tidak berangkat dari perbedaan kasta, tetapi berangkat dari kepentingan bersama yaitu menuntut ilmu. Disamping itu di kampus kami tidak hanya orang Bali saja yang kuliah, kemungkinan hampir dari seluruh Indonesia. Praktek kekastaan lebih bersifat ingin lebih dihargai saja, selain itu apabila dari kalangan warga Bali terlihat lebih ingin dihargai oleh yang lainnya karena dia Triwangsa, dianggap dia ketinggalan jaman. Namun demikian banyak diantara teman saya para mahasiswa dan mahasiswi berbeda kasta yang sampai sekarang masih berhubungan erat (berpacaran), kebanyakan dari mereka wanitanya dari kalangan Triwangsa. Dan seakan tidak mempersoalkan dengan sistem kekastaan yang selama ini menjadi momok pada sebagian orang Bali (Hindu), disamping itu hampir tidak ada kesan jelek dari kalangan mahasiswa Triwangsa lainnya. Hanya salah satu yang pernah saya tahu adalah masih ada dari mereka yang tidak mendapat "restu" orang tuanya, kembali ini permasalahan klasik, yakni menyangkut adat .....<sup>66</sup>

Nampak dari apa yang disampaikan di atas, bahwa kampus telah menciptakan suasana lain yang seakan tidak terganggu oleh nilai-nilai yang berlaku di sekitar mereka. Terlepas dari berkembangnya kondisi tersebut bukan berarti sistem nilai tersebut hilang sama sekali, karena apabila diperhatikan masih ada satu kondisi bahwa sistem kasta masih

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Made Budiarsa Mahasiswa Fakultas Hukum salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Denpasar tanggal 20 Aeptember 1998

melekat pada seseorang dengan jelas, salah seorang subyek penelitian mengemukakan :

.....Pada salah satu acara perkenalan mahasiswa baru di kampus ada satu kegiatan yang mengharuskan semua mahasiswa baru berbaris sebagai persyaratan kerapihan. Kebetulan saat itu yang menjadi ketua pada kelompok saya adalah saya sendiri, karena mendapatkan kesulitan di dalam merapihkan barisan membuat saya mendatangi satu persatu anggota untuk dimasukkan dalam barisan, dan salah seorang dari mereka yang kebetulan Triwangsa bukan saja susah untuk diatur juga menghardik dengan memperhatikan nama pada kertas nama yang saya tempelkan di dada. Hal ini terjadi karena rasa tidak terima apabila yang mengatur itu seorang Sudra.....<sup>67</sup>

Sementara situasi hubungan antara mahasiswa dengan para dosennya juga berpulang kepada kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan akademik, bahwa salah satu wewenang dosen adalah menentukan "nasib" mahasiswanya. Demikian juga kondisi interelasi antara dosen dan mahasiswanya dalam pigura kekastaan yang terjadi di lingkungan kampus tidak mengakibatkan segalanya berbeda, hal mana disampaikan oleh salah seorang dosen Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Universitas Udayana :

.....Bahwa pada posisi yang membedakan di Kampus adalah siapa dosen atau pembina/pengasuh sekaligus pembimbing dan siapa mahasiswa. Sekalipun praktek kekastaan pada sebagian manusia Hindu Bali masih terjadi, namun khususnya di lingkungan kampus tidak begitu nampak, banyak diantara para mahasiswa saya berkasta Triwangsa, akan tetapi tidak pernah terjadi khususnya terhadap saya situasi yang memisahkan antara siapa Sudra dan siapa Triwangsa. Karena bagaimanapun nilai "guru" adalah salah satu unsur yang

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ketut Hartawan Mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi swasta di Denpasar pada tanggal 19 Juli 1997.

harus dihargai dan dihormati di dalam kehidupan beragama Hindu. Untuk itu tidak salah apabila seorang Triwangsa sangat menghormati dosennya sekalipun dari kalangan Sudra seperti salah seorang mahasiswa yang menjadi bimbingan saya Anak Agung Paramartha, saya bahkan merasa tidak merasa dia seorang Triwangsa karena dalam jalinan yang ada tidak pernah tercipta situasi yang berlatar kekastaan, demikian juga dengan Triwangsa lainnya. Hanya mungkin karena sudah terbiasa berbicara halus dan santun terhadap kalangan Triwangsa saya gunakan itu apabila harus berbicara dalam bahasa daerah Bali dan itupun karena mereka yang Triwangsa juga sangat santun dalam berbicara daerah terhadap saya.....<sup>68</sup>

Dari gambaran di atas bahwa interelasi antar warga kasta berbeda diantara mahasiswa Triwangsa dan Dosen yang Sudra/Jaba tidak terjadi praktek kekastaan dalam bentuk saling memanfaatkan situasi karena perbedaan peran masing-masing yang ada. Namun demikian situasi masih menampilkan terjadinya perbedaan adalah dalam hal bertutur kata antara keduanya. Sementara dalam kedudukan sang dosen yang Triwangsa sebagaimana disampaikan oleh salah seorang dosen fakultas Ekonomi salah satu perguruan tinggi swasta di Denpasar yang menjadi salah seorang subyek penelitian mengemukakan :

.....Tidak pernah ada konsep perbedaan itu diperdebatkan dalam bentuk praktek kekastaan di lingkungan kampus, paling tidak di kampus saya. Karena kami melihat bahwa mahasiswa siapapun dia sama-sama mempunyai kepentingan yang lebih besar dari sekedar mempermasalahkan sistem kasta yang justru akan memperuncing permasalahan itu sendiri. Tentunya nilai-nilai etika berlaku bagi siapapun tak terkecuali di dalam berinterelasi antara mahasiswa dan dosennya. Bagi saya siapa Triwangsa dan siapa Sudra/Jaba tidak ada bedanya di mata akademik, karena dalam lingkungan ini berlaku kondisi kesetaraan atau publik. Hanya mungkin akan lain lagi apabila

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Wayan Susila, MSc tanggal 16 Oktober 1997 dan 20 September 1998

hubungan antara mahasiswa dan dosen pada suatu acara ritual berkaitan dengan adat dan keagamaan, tentunya akan kembali kepada siapa Sudra/Jaba dan siapa Triwangsa .....<sup>69</sup>

Dari kondisi tersebut di atas nampak jelas bahwa praktek kekastaan dalam tatanan simbol-simbol adat tidak berlaku dalam interelasi pada warga kasta berbeda di antara mahasiswa dan dosennya di dalam lingkungan kampus, karena interelasi diantara keduanya berlaku nilai-nilai kesetaraan. Hal tersebut terjadi karena kemungkinan sikap keterbukaan dan kritis sudah sangat merasuk pada kehidupan sekalipun itu dilakukan di luar kampus.

Apabila diperhatikan, nampak bahwa masyarakat Hindu di Bali masih beragam di dalam menyadari nilai-nilai yang berlaku akan peran dan fungsi kasta. Hal ini dapat dilihat ada beberapa warga Triwangsa yang masih bisa belum membedakan bagaimana peran dan fungsi kasta baik dalam "ruang dan waktu bernuansa" adat dengan peran dan fungsi sebaliknya di luar adat. Sehingga, kondisi demikian menimbulkan sentimen-sentimen yang tidak pada tempatnya. Namun demikian, bagi mereka yang sudah dapat menerima konteks adat secara terbuka tidak lagi menimbulkan pertentangan. Sekalipun di dalam mereka mengadakan interelasi akan sangat berlainan sikap dan perilaku, diantara kedua warga berbeda kasta tersebut akan menggunakan simbol-simbol berbeda apabila mengadakan

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Anak Agung Oka Widyana, SE, MBA. Tanggal 20 September 1998.

interelasi pada ruang dan waktu yang terpisahkan antara adat dan dinas/negara.

### **Interelasi pada Lingkungan Organisasi Kemasyarakatan**

Menyimak aturan yang berlaku pada semua kelembagaan yang bertujuan menyatukan misi dan visi tidak melibatkan jenis dan warna seseorang yang ada di dalamnya sewaktu mengadakan interelasi antara anggotanya. Demikian juga dengan apa yang terjadi pada salah satu organisasi sosial politik yang mengikuti pemilihan umum tahun 1997 yang lalu yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam organisasi ini anggotanya tercakup dari berbagai golongan dan etnis termasuk di dalamnya warga kasta berbeda. Karena dalam hal ini ada kepentingan yang sama, maka menuntut adanya kerjasama antara anggota yang tidak membedakan kedudukan dan peranannya yang berlaku dalam adat yang berlaku pada sekitar kehidupan mereka. Hal mana dikemukakan oleh salah seorang anggota senior pada kepengurusan PDI Perjuangan (Megawati) di Singaraja yang menjadi salah seorang subyek penelitian

.....Hubungan yang terjadi antara anggota di dalam organisasi ini, misinya hanya satu yaitu bagaimana organisasi dapat mencapai sukses dalam mencapai tujuan. Dengan demikian tidak ada lagi urusan para anggota selain urusan organisasi. Namun demikian kita bukan tidak memperhatikan antara anggota satu dengan lainnya, termasuk anggota yang terdiri dari warga kasta yang berbeda. Di dalam keanggotaan yang mendapat prioritas untuk lebih diperhatikan adalah loyalitas dan aktifitas terhadap organisasi. Kita tidak akan melihat Triwangsa dan Sudra/Jaba dari sisi adatnya, lebih dari

itu yang akan diperhatikan adalah dari segi loyal dan pengabdianya terhadap organisasi.....<sup>70</sup>

Melihat dari apa yang disampaikan oleh salah seorang anggota senior tersebut nampak jelas bahwa kedudukan dan peran kasta di dalam lingkungan kegiatan organisasi telah dikaburkan oleh dimensi kepentingan bersama, sehingga apa yang menjadi tugas anggota tidak diharapkan lagi ada benturan-benturan yang berlatar belakang sentimen adat. Karena interelasi yang terjadi antara anggota lebih berorientasi pada kepentingan bersama, berbagai kebijakan diputusan setelah melalui musyawarah bersama, dan hal tersebut telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian mengapa tidak terjadi sentimen kasta, bagaimana sikap Triwangsa terhadap Sudra/Jaba yang dalam hal ini kedudukannya lebih baik darinya. Subyek penelitian mengemukakan :

.....Walaupun disini ada warga kasta berbeda, dan saya selalu berkumpul hampir setiap saat dengan mereka dari kalangan Triwangsa. Di dalam menjalankan kegiatan organisasi, kami tidak pernah terhalangi oleh tatanan adat yang membedakan kedudukan kami, disamping disibukan oleh kegiatan organisasi, rupanya teman dari Triwangsa tersebut juga tidak membuat jarak, seakan hal-hal yang berkaitan dengan peran dan kedudukan dalam adat tidak pernah mempengaruhi hubungan kami di dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi masalah organisasi. Hubungan itu terjadi apa karena kami yang berkumpul dan menjadi satu kesatuan justeru menjadi pembaharu di dalam menjalin hubungan yang selama ini selalu berjarak antara warga kasta berbeda, atau mungkin karena di daerah Singaraja ini persoalan kasta itu hampir tidak pernah menjadi momok seperti di tempat lain di Bali Selatan sana. Jadi apabila ada kesalahan atau perlu koreksi terhadap anggota yang berkasta Triwangsa,

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Putu Suwardika pada tanggal 22 September 1997

kami dengan tidak segan-segan untuk menegur dan meluruskannya sesuai aturan main organisasi. Bahkan terhadap rekan-rekan di tingkat I (Denpasar). Dan hal ini sering terjadi karena akhir-akhir ini volume kegiatan kami sangat padat, apalagi tahun ini kongres partai kami akan diselenggarakan di Bali, karenanya kami terus-menerus disibukkan oleh persiapan itu.....<sup>71</sup>

Memperhatikan interelasi yang terjadi antara warga kasta di dalam lingkungan organisasi yang terjadi pada salah satu partai itu, dapat difahami bahwa interelasi itu tidak saja dipengaruhi oleh suatu kondisi hubungan yang bersifat heterogen, karena selain warga kasta berbeda, juga terdapat warga lain yang bukan etnis Bali. Disamping daya dukung lingkungan yang sudah demokratis, karenanya nuansa adat yang berkaitan dengan sistem kasta sudah tidak ada lagi. Hal tersebut ditegaskan oleh salah seorang subyek penelitian yang juga anggota dari organisasi partai serupa yang berstatus Triwangsa

.....Di dalam organisasi yang mempunyai visi jauh ke depan, kami sudah tidak mempermasalahkan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi kehidupan, selama ini saya tidak merasakan perbedaan "posisi" dengan Bapak Putu Suwardika misalnya atau dengan yang lainnya, karena saya dan mereka tidak mempunyai kepentingan berkaitan dengan permasalahan adat, walaupun selama ini ada penilaian bahwa sistem kasta yang beriak di sini (Bali) menciptakan jarak, bagi saya semua itu tidak benar, contohnya, saya malah sering meminta advis kepada bapak Suwardika dan beliau dengan senang hati memberi apa yang kami minta tersebut.....<sup>72</sup>

Gambaran dari interelasi antara warga kasta berbeda pada lingkungan organisasi tersebut di atas, nampak profesionalisme dari dua

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Putu Suwardika,..... ibid.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Gusti Putu Budiarsa pada tanggal 20 September 1998.

belah pihak antara warga kasta berbeda jauh lebih mengedepan dibanding dengan ikatan-ikatan adat yang berlaku. Karenanya berbagai kepentingan organisasi dapat dilakukan bersama dengan baik.

## **B. INTERELASI WARGA KASTA BERBEDA DI LINGKUNGAN BANJAR ADAT DAN BANJAR DINAS**

Dari berbagai praktek kekastaan yang terjadi di dalam ruang dan situasi berbeda, nampaknya interelasi antar warga kasta berbeda dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, kekayaan, dan juga kepentingan. Sehingga suasana daripada kondisi interelasi warga kasta berbeda akan memberikan warna lain. Dari perkembangan yang ada, faktor-faktor tersebut sangat mewarnai dari sikap dan perilaku warga kasta berbeda di dalam berinterelasi satu sama lainnya.

Interelasi antar warga kasta berbeda di lingkungan banjar adat dan banjar dinas tentunya tidak terlepas juga dari pengaruh faktor-faktor tersebut di atas. Dengan berbagai kemampuan yang memungkinkan seseorang memiliki kekuatan (*bargiming power*) seperti halnya dengan faktor kekayaan, mungkin permasalahannya adalah bahwa seseorang akan berpengaruh dengan kekayaannya tidak hanya berlaku pada masyarakat Bali saja, tetapi ini berlaku universal, karena dengan kekayaannya dia akan memiliki "*bargiming power*". Persoalannya di sini adalah bagaimana orang Sudra/Jaba yang kaya tersebut dapat memanfaatkan kekayaannya dengan menikmati kesetaraan sebagai warga yang tidak di "rendahkan" lagi oleh kalangan Triwangsa, artinya dia telah mendapatkan "pengakuan" yang

"resmi" dari kalangan Triwangsa sebagai warga yang terhormat. Dengan demikian terlepas dari peraturan adat yang berlaku tetap tidak akan mengubah kedudukannya, namun secara "de facto" mereka telah mendapatkan kedudukan yang semestinya di dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya di lingkungan komunitas seperti pada banjar karena bagaimanapun menurut pendapat mereka bahwa kondisi sebagai warga yang setara adalah hak semua orang dengan tidak harus dibedakan kepada tinggi rendahnya kedudukan mereka seperti yang berlaku pada nilai-nilai adat Bali. Karena adanya kenyataan yang demikian, banyak dari kalangan Triwangsa menyadari bahwa faham "status quo" yang berlaku bagi kalangannya sudah harus mencari jalan agar tidak berlarut dalam satu kondisi yang membuat kalangan Triwangsa lebih kehilangan muka dihadapan Sudra/Jaba. Dengan demikian mereka mau tidak mau di dalam berinterelasi harus menjalankan peranan yang sesuai dengan tuntutan mereka yang selama ini di "rendahkan" nya.

Di dalam masyarakat Hindu khususnya warga kasta berbeda yang ada dalam lingkungan banjar dan desa sering kali persoalan kasta ini menjadi momok karena pada sisi tertentu kemungkinan-kemungkinan yang mengarah kepada konflik antar kasta akan sering terjadi sebagai suatu akibat dari ketidak puasan kalangan tertentu dalam hal ini kalangan Sudra/Jaba, walau tidak muncul kepermukaan kondisi tersebut akan terus terjadi apabila tidak ada kesepakatan antara warga kasta berbeda untuk melepaskan diri dari sistem ikatan tradisional yang tercipta dari "inherited

status", yaitu interelasi yang berdasarkan kasta dimana hubungan diantara warga kasta berbeda dihadapkan pada pengaruh dan kepatuhan. Sementara jaman menghendaki perubahan atau pembaharuan yang berbentuk "achived status" yakni interelasi yang berdasarkan prestasi pada profesinya, sehingga keadaan ini tidak akan membatasi eksistensi warga secara keseluruhan. Setidaknya faktor-faktor yang mempengaruhi interelasi warga kasta berbeda di lingkungan banjar akan dilihat dari dua dimensi, yaitu pertama dari kedudukan warga kasta berbeda sebagai warga adat, dan kedua dari kedudukan warga kasta berbeda sebagai warga negara.

#### **Interelasi Dalam Kedudukan Sebagai Warga Adat (Banjar Adat)**

Sebagaimana disampaikan Weber yang mengadakan pembedaan antara kelas dan kedudukan, dimana dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial dinyatakan bahwa kedudukan seseorang di dalam masyarakat ditentukan oleh faktor kekayaan (material) dan berperan sebagai apa dia di lingkungan masyarakatnya. Kondisi demikian sangat disadari terutama oleh kalangan Sudra, yang mana apabila dilihat dari nilai-nilai kewangsaan (secara teori) bahwa kedudukan seseorang di dalam sistem kastanya akan dilihat dari apa yang didapatkan, yakni apabila seseorang berhasil dengan profesinya maka dia akan menduduki kasta yang lebih baik, sehingga sistem vertikal terbuka berlangsung sebagaimana lazimnya. Namun itu hanya berlaku secara sepihak, artinya kondisi tersebut tidak mendapat pengakuan pihak-pihak yang ada dalam

lingkungan/kalangan kasta Triwangsa. Sebagai misal pada lokasi penelitian banyak sekali warga dari kalangan Sudra/Jaba menduduki jabatan yang tinggi pada instansi pemerintah termasuk di dalamnya yang menjadi klian adat banjar sekarang sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya. Dengan keberadaannya yang demikian sudah mengangkat dirinya pada kedudukan yang lebih tinggi apabila dinilai dari sistem warna yang berlaku pada sistem kewangsaan. Namun karena peranannya dalam adat yang menuntut kaum Sudra/Jaba harus menerima kondisi tersebut sebagai suatu dharma umat manusia kepada Sang Penciptanya membuatnya tidak mempunyai kedudukan yang setara dengan kedudukan Triwangsa seperti tersurat dalam nilai-nilai kewangsaan. Untuk itu didalam berinterelasi warga kasta berbeda sangat ditentukan oleh ruang dan waktu, dimana dan kapan mereka berperan sebagai warga yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, kapan menempatkan diri sebagai warga yang mempunyai kedudukan yang "rendah" dalam masyarakat adat. Sebagaimana dikemukakan oleh subyek penelitian :

.....Sebagaimana adanya bahwa dalam tatanan adat berlaku hukum kelas yang disebut dengan kasta. Sekalipun kedudukan seorang Sudra/Jaba di dalam lingkungan masyarakat dan juga dalam pekerjaannya adalah seorang atasan dari kalangan kasta Triwangsa, namun di dalam adat ia harus menerima peraturan yang berlaku, seperti apabila pada pelaksanaan upacara pada pura, ia harus bisa menerima apabila usai upacara tersebut harus duduk pada tempat yang lebih rendah sesuai dengan kedudukannya pada sistem kasta. Secara simbolis akan terlihat perilaku yang menyiratkan bagaimana warga Sudra/Jaba harus bersikap hormat kepada Triwangsa, baik itu dalam berucap maupun dalam pergerakan tubuh (bahasa tubuh), seperti apabila berucap harus santun

sesuai dengan aturan yang berlaku pada nilai-nilai adat misalnya dengan memanggil ratu kepada Triwangsa dan lain sebagainya. Kondisi tersebut akan terlihat pada berbagai acara atau upacara yang berkaitan dengan adat, padahal kita tahu bahwa acara-acara bernuansa adat di Bali hampir setiap saat. Untuk itu pada Pura Besakih yang menjadi pusat persembahyangan umat Hindu tampak lokasi-lokasi khusus yang membedakan tempat dimana kalangan Triwangsa dan dimana kalangan Sudra/Jaba, kalau tempat sembahyangnya Triwangsa agak lebih di atas dari tempatnya Sudra/Jaba. Hal ini menggambarkan secara simbolis kedudukan masing-masing kasta tersebut mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih tinggi .....<sup>73</sup>

Dari ungkapan di atas, nampak bahwa warga kasta sudah menjadi warga adat secara keseluruhan, bentuk interelasi antar kedua kalangan kasta tersebut dituntut patuh pada peraturan yang berlaku. Pola-pola tingkah laku atau perilaku yang dilakukan akan sangat kontras, terlihat jelas batasan antara siapa yang berkasta Sudra/Jaba atau siapa Triwangsa. Dari gerak tubuhnya dan ucapannya sudah menggambarkan bahwa mereka bertalian kasta. Sebagaimana diketahui bahwa peran dan kedudukan seseorang pada adat Hindu tidak hanya dilihat dari lintas kekayaan dan pangkat atau jabatannya, namun lebih dari itu adalah berkaitan dengan konteks sistem yang masih melekat pada masyarakat yang masih kental yaitu sistem kasta. Seorang subyek penelitian mengungkapkan :

.....Bahwa terhormatnya seseorang di lingkungan masyarakatnya sekarang ini khususnya pada komunitas banjar dan desa apabila dilihat dari konteks adat tidak lagi hanya dilihat dari tingkat pendidikan, pangkat dan kekayaan yang dia

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Komang Widiada, tanggal 16 Agustus 1998

miliki, namun yang paling menentukan adalah kedudukan dia di dalam sistem kasta yang berlaku pada adat tersebut. Karenanya betapapun Sudra/Jaba memiliki kedudukan yang terhormat dalam jabatan, pendidikan yang tinggi, dan kekayaan yang melimpah tidak akan dapat menembus peraturan adat yang memang sudah demikian adanya. Untuk itu, dengan kedudukan yang telah digariskan secara adat tidak mengubah peranannya sebagai manusia yang memiliki batasan yang telah tersurat tersebut.....<sup>74</sup>

Dengan kedudukan yang demikian, seorang Sudra/Jaba sangat menyadari bahwa aturan yang ada tersebut tidak dapat melepaskan mereka dari ikatan kekastaan yang berlaku pada lingkup adat yang telah mengikatnya secara turun temurun. Terlepas dari kondisi tersebut, permasalahan sering timbul justru bukan karena keterkaitannya dengan adat dan agama, melainkan oleh praktek kekastaan yang dilakukan oleh kalangan Triwangsa di luar adat. Sebagai umat yang harus patuh pada kepercayaan yang dianutnya kalangan Sudra/Jaba sebagaimana layaknya umat Hindu lainnya sangat adaptif terhadap tuntutan dan penyesuaian yang diatur oleh agamanya. Namun demikian sebagai manusia yang berkembang dan melihat tuntutan jaman yang kian berorientasi kepada nilai-nilai profesionalisme menjadikan interelasi warga kasta berbeda yang berlaku di kalangan masyarakat Hindu Bali menuntut pada tanggung jawab dan kepentingan warganya terhadap nilai-nilai yang berlaku.

Sementara itu apabila mengikuti aturan adat yang menyusun masyarakat dalam satu konsep piramida, dimana yang duduk dipucuk piramida tersebut adalah pemimpin adat yang disebut "Moncol". Di dalam

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Brandi pada tanggal 16 Agustus 1998

kenyataannya khususnya pada lokasi penelitian kedudukan dan peranan moncol ini masih sangat mengakar, karenanya nilai pengaruhnya terhadap warga banjar sangat besar. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa kedudukan dan peran moncol masih menjadi panutan dan bahkan dianggap sebagai pengayon bagi warga secara keseluruhan yang ada di lingkungan banjar adat atau desa adat. Eksistensi moncol sangat mempengaruhi pada interelasi antara warga kasta berbeda, satu sisi warga diikat oleh satu sistem yang berbentuk hubungan patronase yang dalam istilah adat Hindu Bali disebut hubungan Siwa dan Sisia yang menggambarkan hubungan hirarkhis antara pemimpin adat dengan pengikutnya. Dari kondisi tersebut membuat warga kasta berbeda terikat oleh satu sistem yang membuat dia harus patuh dan taat pada keputusan moncol, keberadaannya khususnya bagi lingkungan banjar adat Belong dan desa adat Sanur Kaja dilatarbelakangi oleh nilai historis yang menjadikan warga desa Sanur Kaja merasa berhutang budi kepada moncol, sehingga sampai sekarang pengaruh yang bersifat tradisional tersebut masih mengakar, karena disamping kedudukan yang memang demikian, juga peranan yang paling hakiki terhadap warga pengikutnya adalah sebagai Sang "Surya" yang dianggap oleh warga sebagai "penyambung" jalan ke alam kemudian.

Interelasi antara warga kasta berbeda dalam kondisi pengaruh adanya kewenangan moncol adalah warna tersendiri yang masih menjadi ciri khas yang ada pada masyarakat Hindu pada masyarakat Bali,

khususnya untuk Bali Selatan karena untuk daerah lain seperti di Kabupaten Buleleng atau Singaraja kedudukan moncol sudah tidak lagi sepopuler Bali Selatan. Salah seorang subyek penelitian mengemukakan :

.....Bahwa peranan moncol sangat mempengaruhi warga di dalam berinterelasi, hal ini dapat dilihat di dalam berbagai keputusan menyangkut adat dan agama, sekalipun sudah menjadi keputusan banjar/desa (adat), namun apabila sang moncol berkehendak atau memberikan keputusan lain, maka keputusan moncol itulah yang dilaksanakan.....<sup>75</sup>

Sedemikian besar pamor moncol yang menjadikan berbagai keputusan adat bermuara pada keputusannya, sehingga kedudukannya bukan saja sebatas kepentingan yang berkaitan dengan adat, lebih jauh dari itu banyak warga yang ada di lingkungan banjar dan desanya banyak bekerja sebagai karyawan dan karyawati di hotelnya, dengan demikian kedudukannya menjadi lebih sangat dihormati karena warga yang menjadi pegawai sekaligus pengikutnya tersebut merasa berhutang budi. Kondisi ini menciptakan "status quo" terhadap eksistensinya di lingkungan banjar/desa (adat).

Dari kedudukan dan peranan moncol yang telah dikemukakan di atas kaitannya dengan pengaruhnya terhadap warga kasta berbeda lainnya di dalam mengadakan interelasi adalah semakin memperkokoh eksistensi warga Triwangsa di dalam mengedepankan kastanya. Kondisi ini dikemukakan oleh salah seorang subyek penelitian :

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Klian Adat Banjar Belong pada tanggal 18 Agustus 1998.

.....Karena begitu besar pamor moncol yang ada di lingkungan banjar Belong yang juga merupakan moncol desa Sanur Kaja, sehingga warga Triwangsa di dalam berbagai kesempatan rapat banjar selalu mengusulkan untuk tidak diikuti sertakan didalam kegiatan yang bersifat fisik seperti menjaga barang peralatan upacara yang ada di pura kedewatan atau sejenisnya yang di Bali disebut *mekemit* dan *megebag* atau kegiatan kerja bakti. Walaupun diselingi oleh protes yang bersifat diam-diam dari pihak Sudra/Jaba, usulan tersebut selalu mendapat persetujuan untuk dibebaskan dari segala kewajiban yang diberlakukan banjar, lagi-lagi hal ini karena melihat sang moncol .....<sup>76</sup>

Walaupun disisi lain ingin ada satu kondisi pembaharuan dari kalangan Sudra/Jaba untuk tidak terjadi deskriminatif antara warga kasta berbeda, namun karena adanya nilai-nilai tradisional yang harus dipatuhi oleh warga adat, maka kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk dirubah, apalagi hubungan antara sang moncol dengan warganya dihiasi oleh nilai-nilai emosional yang mendalam yang menjadikan sang moncol sebagai figur yang harus dihormati, sehingga apabila melihat Triwangsa dari kalangan kasta Brahmana menjadikan interelasi antar warga kasta berbeda mengacu pada kedudukan dan peran kasta yang bersifat *inherited status*. Dengan demikian, tidak salah apabila di lokasi penelitian ini sering dijumpai praktek kekastaan yang jelas seperti yang diungkap salah seorang subyek penelitian :

.....Bagaimanapun kita sudah berupaya untuk merubah pola-pola yang berlaku di dalam sistem kekastaan, namun praktek kekastaan seperti pada suatu acara adat yang diadakan oleh salah seorang warga Triwangsa di banjar Balong, tamu yang diterima ditempatkan pada ruang berbeda. Sudra/Jaba ditempatkan tersendiri demikian pula dengan Triwangsa.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Klian Adat Banjar Belong pada tanggal 25 Mei 1997.

Kalaupun saat itu acaranya dihadiri pula oleh Walikota Denpasar yang karena kedudukan atau jabatannya seorang Sudra/Jaba seperti Walikota Denpasar tersebut yang pada saat tulisan ini sedang disusun masih Bapak Ketut Suita diterima atau diajak di tempat para Triwangsa berkumpul. Namun nampak jelas bahwa secara simbolis kedudukan kasta masih menempatkan posisi tinggi dan rendah .....<sup>77</sup>

Melihat fenomena di atas terlihat bahwa harga kasta pada acara-acara adat masih mengedepan dan seakan praktek kekastaan begitu diskriminatif, apalagi kondisi tersebut lebih diperjelas dengan perilaku simbol-simbol yang berbeda pula. Sehingga perbedaan antar warga kasta semakin nampak jelas. Sebagai warga yang patuh pada sistem adat kondisi tersebut dianggap hanya sebagai ketentuan yang memang harus diterima oleh kaum Sudra/Jaba yang tidak memiliki kedudukan yang setara menurut pandangan kalangan Triwangsa.

### **Interelasi dalam Kedudukan Sebagai Warga Negara (Banjar Dinas)**

Pandangan negara terhadap warga berbeda kasta di lingkungan banjar lebih menitikberatkan pada nilai kepentingan. Dalam hal ini negara tidak pernah terlalu mempermasalahkan konsep warga berbeda, yang dibedakan oleh sistem nilai yang berlaku pada masyarakat yaitu dengan kastanya. Kepentingan negara dalam hal ini adalah bagaimana mengentaskan program-program pembangunan yang harus dilaksanakan bersama masyarakat, hal mana disampaikan oleh Klian Dinas Banjar belong yang mengemukakan bahwa :

<sup>77</sup> Ibid, ..... pada tanggal 18 Agustus 1998.

.....Pemerintah di dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan urusan negara tidak pernah mempersoalkan hal-hal yang telah menjadi kesepakatan warga di dalam mengkonsepsikan adatnya dengan nilai - nilai kepercayaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Bali yang beragama Hindu. Kepentingan negara adalah menuntut warga masyarakat khususnya warga banjar, desa, maupun kecamatan untuk saling bahu-membahu melaksanakan pembangunan di segala bidang menurut tingkat kemampuannya masing-masing sehingga apa yang menjadi cita-cita dapat segera direalisasikan .....<sup>78</sup>

Peranan warga banjar di dalam pembangunan menurut pandangan pemerintah atau negara dilihat sebagai suatu yang integral, dalam hal ini tidak memandang apa itu warga banjar adat maupun banjar dinas. Karena bagi warga negara yang akan menjadi perhatian adalah hasil akhirnya. Untuk itu seorang subyek penelitian mengemukakan bahwa:

.....Di dalam keberadaan warga pada lembaga yang membedakan fungsi tersebut telah menciptakan tatanan yang bertalian arah yang membawa warga negara yang ada di lingkungan banjar tidak dibedakan oleh tingkatan-tingkatan tertentu yang menggolongkan antara satu warga dengan warga lainnya berbeda di dalam peran dan kedudukannya, sebagaimana terjadi pada banjar adat., dimana pengaruh sistem kasta telah membedakan antara warga satu dengan warga lainnya dalam kapasitas peran dan kedudukannya sebagai warga adat yang berlaku. Sementara di dalam mengentaskan tugas kedinasan yang dilimpahkan pada lembaga banjar dalam hal ini banjar dinas, dimana berlaku tatanan atau pola kedinasan atau negara yang tidak lagi mempergunakan simbol-simbol yang berlaku pada tatanan adat melainkan simbol-simbol yang berlaku pada tatanan kedinasan atau negara .....<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Klian Dinas Banjar Belong pada tanggal 18 Oktober 1997.

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Ketut Kartama pada tanggal 18 Oktober 1997.

Interelasi yang melibatkan warga kasta berbeda di lingkungan banjar dinas keterkaitannya dengan kepentingan negara adalah interelasi yang berangkat dari pandangan kesetaraan (egaliter), dimana warga tidak dilihat sebagai kelompok-kelompok yang terpisah antara satu dengan lainnya. Tetapi dilihat sebagai warga negara yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Untuk itu pelaksanaan dari interelasi tersebut mempunyai pola yang berlainan dengan pola interelasi yang berlaku pada banjar adat, yang nuansa kebersamaannya walau berkesan "dipaksakan" masih tetap melahirkan partisipasi yang diharapkan. Hal mana dikemukakan oleh salah seorang subyek penelitian dari teruna Banjar Belong :

.....Warga dalam kapasitas bagian integral dari pembangunan negara di dalam berinterelasi tidak dibatasi oleh nilai-nilai atau ikatan-ikatan tradisional yang berlaku. Hal demikian juga telah dengan sadar diberlakukan dengan baik di banjar-banjar yang ada di lingkungan desa adat/dinas Sanur Kaja, bahwa warga berbeda kasta yang terdapat pada banjar-banjar tersebut telah dengan sadar dan mengerti akan tugas dan kewajibannya, baik sebagai warga banjar adat maupun sebagai warga banjar dinas. Secara keseluruhan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab warga banjar yang dikaitkan dengan kepentingan negara telah terlaksana sebagaimana mestinya, dengan tidak pernah menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berarti.....<sup>80</sup>

Ditambahkan oleh subyek penelitian lain bahwa :

.....Hubungan warga kasta berbeda pada banjar dinas dilatarbelakangi oleh kepentingan politik pemerintah/negara. Sebagai warga negara yang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, tentunya di dalam prakteknya dihadapkan pada

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Dewa Sarjana, anggota Teruna pada Banjar Anggar Kasih tanggal 18 Oktober 1997.

persoalan siapa dan apa warga tersebut dihadapan negara. Khususnya bagi masyarakat Bali adalah tidak jauh berbeda dengan warga negara lainnya di tempat lain, yakni harus tunduk dan patuh pada peraturan pemerintah dengan tidak harus melihat siapa dirinya. Untuk itu, di dalam praktek-praktek pelaksanaannya akan lebih menggambarkan peranan warga dalam kedudukannya sebagai warga negara. Namun demikian, pengaruh sistem kasta yang membedakan warna warga dari satu dengan lainnya tidak hilang begitu saja, bahkan pada sisi lain perbedaan kasta memacu semangat seseorang untuk memperlihatkan nilai kepatuhan dan sekaligus menunjukkan bahwa atribut atau kedudukan kastanya bisa berbuat lebih baik. Kondisi tersebut selintas akan memberikan makna yang bersifat persaingan diantara warga berbeda kasta yang ada di lingkungan banjar dinas.....<sup>81</sup>

Sementara di dalam berinterelasi antara warga kasta berberda di lingkungan banjar dinas tampak simbol-simbol perilaku yang bersifat egalitarian, dimana tidak lagi menempatkan sistem kasta secara dominan. Hak semua warga sama tidak pandang bulu, seperti halnya di dalam pelayanan melakukan pelayanan yang sudah secara rutin terjadi petugas administrasi dalam hal ini Klian Dinas tidak pernah membedakan atau "mengistimewakan" golongan tertentu atau dalam hal ini golongan Triwangsa apabila menyelesaikan kepentingan berkaitan dengan masalah administrasi kedinasan seperti menyelesaikan surat-surat keterangan, mengurus kartu penduduk (KTP) dan lain sebagainya. Lebih jelasnya Klian Dinas Banjar Belong mengungkapkan sebagai berikut :

.....Di dalam berbagai kepentingan administrasi kedinasan, tentunya siapa yang perlu dia yang mengurus dengan tidak ada perlakuan istimewa. Selama saya menjadi Klian Dinas tidak permasalahan di dalam memberikan pelayanan pada warga banjar, karena saya melihat warga

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Klian Dinas Banjar Belong tanggal 19 Oktober 1997.

sudah secara sadar melakukan kewajibannya dengan baik. Apabila warga banjar meminta penyelesaian surat-surat keterangan atau surat-surat lainnya berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, saya layani sebagaimana layaknya tidak lagi memandang dari mana dan siapa dia. Dari apa yang saya alami, mereka yang dari kalangan Triwangsa-pun tidak pernah meminta pelayanan yang istimewa. Demikian juga apabila kami mengadakan musyawarah banjar yang berkaitan dengan kemasyarakatan yang dikemas untuk kepentingan pemerintah seperti keperluan penyuluhan pendidikan dan keluarga berencana atau kesehatan atau untuk keperluan politik seperti pemilihan umum, semua warga banjar tidak terkecuali semua berlangsung dengan baik. Di dalam bersikappun mereka tidak macam-macam, perilaku mereka sebagaimana lazimnya orang kebanyakan, hanya mungkin karena sudah terbiasa betutur santun dan halus saya terhadap kalangan Triwangsa, jadi dalam hal ini tidak masalah, tetapi secara umum jelas ada perbedaan antara perlakuan yang bersifat adat dan perlakuan bersifat dinas, seperti penyebutan panggilan tidak lagi dengan panggilan "kebesaran" yang berlaku pada adat, namun cukup dengan panggilan Bapak, Ibu Adik, dan lain sebagainya. Demikian juga di dalam penggunaan bahasa pengantar pada acara rapat lebih didominasi oleh bahasa Indonesia, karena selain lebih jelas juga karena warga yang menjadi peserta rapat bersifat heterogen, ada yang berasal dari luar Bali. Sementara apabila hal tersebut dilaksanakan berdasarkan kepentingan adat, biasanya penggunaan bahasa lebih didominasi oleh bahasa Bali. Kemudian pada acara demikian warga akan duduk dalam koridor yang sama tidak lagi dibedakan atas perbedaan kasta artinya sama tinggi sama rendah .....<sup>82</sup>

Sikap dan perilaku warga yang berlaku pada banjar dinas sama sekali tidak mencerminkan adanya perbedaan kedudukan dalam kasta, hal ini dapat dilihat pada berbagai kesempatan dimana antara warga kasta berbeda yang ada dalam lingkungan banjar dinas melakukan berbagai aktivitas kemasyarakatan, sebagaimana lebih ditegaskan oleh seorang subyek penelitian sebagai berikut :

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Klian Dinas banjar Belong pada tanggal 18 Oktober 1997

..... Pada prinsipnya perbedaan antara Triwangsa dan Sudra/Jaba hanya dalam persoalan adat, sedangkan dalam kepentingan politik atau pemerintahan/negara hal tersebut sudah tidak berlaku lagi, semua warga yang ada di lingkungan banjar maupun desa sudah sangat menyadari akan hal tersebut, apabila masih ada seorang warga Triwangsa merasa tidak atau belum menerima itu karena keterbatasan pengetahuannya terhadap peran dan fungsi kasta yang disandangnya. Lagi pula kemajuan jaman sudah berubah dan menuntut semua komponen warga masyarakat di Republik ini berperan sama. Kemudian di dalam bersikappun, kami tidak lagi terikat oleh atribut-atribut kekastaan yang terbiasa berlaku pada kepentingan adat. Jadi semua pihak dalam hal ini warga kasta berbeda di banjar harus memahami kondisi tersebut, oleh karenanya sikap dan perilaku yang berlaku akan lain dengan sikap dan perilaku yang berlaku pada adat.<sup>83</sup>

Kemudian ditambahkannya bahwa perilaku yang lebih dominan di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di lingkungan banjar memang lebih pada perilaku adat, sehingga membias kepada perilaku sosial, mengapa demikian, lebih lanjut subyek penelitian mengemukakan sebagai berikut :

..... Perilaku warga kasta berbeda di dalam lingkungan banjar lebih banyak dipengaruhi oleh adat, sehingga membias pada perilaku sosial. Karenanya, tidak salah apabila kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada adat akan diteruskan pada kondisi di luar adat, seperti tutur kata yang halus, panggilan nama, lebih mendahulukan kepentingan kalangan Triwangsa, dan rasa hormat, terutama hal ini dilakukan oleh mereka yang pendidikannya rendah. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini hanya dapat diatasi oleh mereka yang sudah mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan mengerti dengan permasalahan yang menyangkut sistem kasta, baik itu dari kalangan Triwangsa maupun dari Sudra/Jaba. Sehingga simbol-simbol yang berlaku akan berlaku lain, hal ini karena tingkat kesadaran bermasyarakat secara umum telah mereka resapi tidak lagi berlaku kaku atau bahkan sepiantas akan kita lihat perbedaan kasta itu akan sangat tidak tampak, karena hubungan yang ada diantara sebagian mereka sudah pada tingkat pergaulan yang

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Dewa Arjawa Tokoh Masyarakat pada tanggal 19 Oktober 1997

demokratis dan melihat kaidah-kaidah yang berlaku pada hubungan individu sudah bersifat universal dan menganggap hal-hal yang berkaitan dengan adat akan dianggap sebagai acara ritual semata.<sup>84</sup>

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas bahwa kedudukan warga banjar yang berkasta-kasta tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama. Bagi negara berbagai bentuk pandangan yang membedakan antara satu dengan lainnya bukan merupakan halangan, yang penting apa yang menjadi program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Hal tersebut dipandang oleh negara jauh lebih penting, karena menurut negara perbedaan yang ada hanya dinilai sebagai kekayaan budaya dan berlaku pada lingkungan banjar adat atau desa adat. Dengan demikian diharapkan kepada warga kasta berbeda yang ada di lingkungan banjar atau desa untuk berperan dalam konteks kehidupan bernegara, yakni berwarga negara satu dimana fungsi warga negara adalah sadar akan peran dan kewajibannya dan merasa terpanggil untuk menunaikan kewajiban tersebut, dengan satu catatan bahwa apa yang menjadi tugas negara itu adalah demi kemajuan dan kepentingan bersama di dalam mensejahterakan kehidupan berbangsa.

Dengan demikian, dari berbagai pengungkapan di atas, mulai dari interelasi yang berlaku di luar banjar maupun di dalam lingkungan banjar berlaku simbol-simbol yang berbeda, yang terjadi kaitannya dengan

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Dewa Arjawa, tokoh masyarakat. Pada tanggal 19 Oktober 1997

kepentingan yang berbeda pula. Simbol-simbol yang berlaku pada kepentingan adat akan menempatkan sistem kasta bersifat "inherited status", Karenanya, Triwangsa yang memiliki kedudukan kasta yang tinggi akan selalu "dihormati" oleh kasta Sudra/Jaba di dalam berbagai kepentingan adat. Hal tersebut terjadi karena "harga" kehormatan yang ada lebih disebabkan oleh aturan adat yang berlaku. Sementara simbol-simbol yang berlaku pada kepentingan kedinasan atau negara menempatkan warga kasta berbeda berdasarkan pada "achieved status". karenanya "harga" kehormatan seseorang bukan lagi berdasarkan karena sistem kasta, melainkan karena nilai profesionalisasi yang dimiliki oleh seseorang baik sebagai pegawai negeri atau swasta dan atau pedagang dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit "harga" kehormatan itu bersifat terbalik, karena apabila diperhatikan khususnya di lokasi penelitian kalangan Sudra/Jaba lebih berhasil di banding dari kalangan Triwangsa baik keberhasilan dalam bidang pendidikan maupun bidang pekerjaan. Namun demikian, diakui bahwa perilaku yang berlaku pada adat memang sangat mendominasi kehidupan warga banjar di dalam bermasyarakat, sehingga membias pada perilaku sosial yang semestinya terlepas dari kaidah-kaidah adat. Untuk itu dapat dimengerti mengapa warga kasta berbeda yang hidup bermasyarakat di dalam lingkungan banjar tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai adat yang berlaku. Sehingga perubahan simbol-simbol perilaku yang terjadi pada warga kasta berbeda hanya terpisahkan oleh garis yang sangat tipis sekali, seakan tidak memberikan makna yang berarti terutama bagi

sebagian warga kasta berbeda yang masih berpikiran tradisional dan tingkat pendidikannya rendah. Namun demikian perbedaan yang terdapat pada pola-pola perilaku yang diekspresikan lewat simbol-simbol tertentu telah menyiratkan makna kepentingan dalam banjar adat dan banjar dinas berbeda.

## **BAB IV**

### **FAKTOR TERJADINYA PERUBAHAN SIMBOL-SIMBOL PADA WARGA KASTA BERBEDA DI DALAM MENGADAKAN INTERELASI PADA LINGKUNGAN BANJAR DI BALI**

Dalam bab ini akan disajikan faktor perubahan simbol-simbol pada warga kasta berbeda di dalam mengadakan interelasi di lingkungan banjar, sekaligus analisis. Sedangkan bahasan yang akan diurai adalah sebagai berikut : Nilai-nilai kepercayaan yang masih melekat pada masyarakat, Sistem kasta dan status quo, Kedudukan Lembaga adat yang otonomus. Patronase dan Kepemimpinan Adat.

#### **A. Nilai-Nilai Kepercayaan yang masih Melekat pada Masyarakat**

Masyarakat Bali sebagaimana telah dijelaskan pada bagian lain adalah masyarakat yang sosial religius dengan kepercayaan yang sangat meresap terhadap segi-segi kehidupan. Antara adat dan agama selintas tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Hindu Bali, walaupun keduanya mempunyai pengertian yang berbeda, namun bagi masyarakat Hindu Bali di dalam praktek kehidupan sehari-hari sulit untuk memisahkan keduanya.

Di dalam kehidupan masyarakat Bali tidak terlepas dari pengaruh agama Hindu. Agama Hindu memiliki tiga kerangka dasar yang menjadi pegangan bagi penganutnya sebagaimana di jelaskan oleh Abu

Rivai<sup>85</sup> yaitu : *tatwa* (filsafat keagamaan), *susila* (moral keagamaan) dan *upacara* (upacara keagamaan), memberikan corak khas bagi identitas masyarakat Bali. Ditambahkan pula bahwa selain hal pokok tersebut, agama Hindu juga memberikan pengaruh penting yang berkaitan dengan integrasi dan pengendalian masyarakat. Masih menurut Rivai, bahwa kepercayaan yang berkaitan dengan agama Hindu adalah kepercayaan dengan panca-cradha yakni : (1) Percaya akan adanya satu Tuhan, *Ida Sanghyang Widhi*, Tuhan Yang Mahaesa, dalam bentuk konsep *Trimurti*. Trimurti mempunyai tiga wujud atau manifestasi yaitu : Wujud Brahma, yang menciptakan; wujud Wisnu yang memelihara, dan melindungi; dan wujud Siwa yang melebur segala yang ada. (2) Percaya terhadap konsep *si atman* (roh abadi). (3) Percaya tentang *punarbhawa* (kelahiran dari jiwa). (4) Percaya terhadap hukum *karma pala* (adanya buah dari setiap perbuatan). (5) Percaya akan adanya *moksa* (kebebasan jiwa dari lingkaran kelahiran kembali).

Di dalam kehidupan masyarakat Bali dikenal ada istilah dengan sebutan *Desa*, *Kala* dan *Patra*, *Desa Mewecara*. Adat di Bali memiliki pola yang dikenal dengan "*Catur Dresta*"<sup>86</sup> yaitu : (1) *Sastra Dresta*, yang berupa aturan-aturan, ketentuan-ketentuan hidup yang tersurat dalam pustaka-pustaka suci, baik berupa Weda maupun lantar-lontar yang benar-benar dirasakan sebagai suatu yang patut dan menjamin ketertiban masyarakat

<sup>85</sup> Abu Rivai, "*Sistem* ..... hal. 41

<sup>86</sup> Anak Agung Ngurah Gde dan Ida Bagus Putu Purwita, *Pemantapan* ..... hal.5

lakhir bathin. Materi dari sastra dresta ini sangat luas, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan. (2) *Loka Dresta*, ketentuan-ketentuan yang berdasarkan keseluruhan yang dihasilkan dalam Pesamuhan (masyarakat para prajuru/ahli). (3) *Purwa Dresta*, ketentuan-ketentuan yang bersumber kepada pertimbangan-pertimbangan historis tradisional yang masih dipandang patut. (4) *Desa Dresta*, ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas kondisi suatu lingkungan wilayah (teritorial) karena kesadaran akan terjalannya hidup dan kehidupan manusia terhadap sesamanya.

Dengan memperhatikan apa yang terurai tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa adat itu merupakan suatu titian proses administrasi untuk menciptakan suatu kepatuhan di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, yang apabila dilanggar akan terkena kutukan (*ketulahan*), pantang, tabu, semuanya ini merupakan pagar bathin bagi terpeliharanya penerusan pewarisan amanat para leluhur yang sekaligus merupakan penghormatan kepadanya. Dan itu sangat menyentuh kehidupan yang sangat luas meliputi hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, dan hubungan dengan penciptanya. Lebih jauh dalam adat tersebut mengandung dinamika kehidupan yang berpangkal pada cara berpikir yang praktis, yaitu : (1) Menempatkan unsur keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tiap rumah ada sanggah/merajan, dalam banjar ada tempat pemujaan/Parahyangan, di daerah persawahan/Subak ada Bedugul, dalam pasar ada Melanting, juga terhadap manusia mati ada Prajapati. (2) Menempatkan unsur Bhuwana

Agung, sebagai unsur yang menghidupkan manusia. Dalam pengejawantahannya dalam desa adat ada Palemahan, dalam Subak ada Wilayah Subak. (3) Menempatkan unsur manusia sebagai unsur pelaksana yang disebut Krama/Kerama.<sup>87</sup>

Sementara berbicara tentang agama, orang tidak bisa mengabaikan peran lembaga agama yang merupakan wadah bagi sistem kepercayaan dan praktek yang penting, yang telah dirumuskan dan dibakukan, dianut secara luas dan diterima sebagai suatu sistem. Ada tiga subsistem yang terkait satu sama lain, yaitu : Pertama, doktrin. Ini mencakup keyakinan yang berasal dari teks lisan atau tulisan sakral yang diangkat dari kitab suci. Doktrin menetapkan sifat hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Kedua, etika, yang merupakan pedoman perilaku. Etika mempunyai sumber langsung atau tidak langsung pada doktrin. Sementara yang Ketiga, ritual, berfungsi untuk mengekspresikan doktrin dalam bentuk lambang-lambang dengan tujuan agar umat manusia selalu mengingatkannya. Berlandaskan ketiga subsistem tersebut, ajaran agama dipelajari, dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>88</sup>

Keterkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, yang menitik beratkan pada permasalahan kesadaran hubungan antara manusia dengan

---

<sup>87</sup> Anak Agung Ngurah Gde Agung, *Pedoman* ..... Hal. 6

<sup>88</sup> I Gusti Ngurah Gorda, *Nilai* ..... hal. 29

Tuhan, antara manusia dengan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara manusia dengan sesamanya, keselarasan cita-cita hidup secara fisik material dan mengejar kebahagiaan rohani, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah yang menjadi tujuan hidup manusia. Hal demikian erat hubungannya dengan masyarakat Bali yang sosial religius. Di mana kegiatan agama Hindu tertuang di dalam kegiatan lembaga adat yang telah ada sebagai wadah pelaksana kegiatannya. Dalam hal ini Durkheim dalam laporan studinya yang tertuang dalam bukunya berjudul "*Elementary Forms of Religious Life*"<sup>89</sup> menyimpulkan antara lain bahwa agama merupakan faktor esensial dalam pembentukan identitas masyarakat, yang sekaligus juga mempersatukannya. Dalam fungsi mempersatukan ini tampak dengan jelas bahwa simbol-simbol membuat masyarakat tetap bersatu dan tidak menyimpang dari tujuannya. Berbagai upacara keagamaan yang dilaksanakan secara bersama-sama, seperti pada peristiwa-peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian, serta perayaan musim tanam dan panen, berfungsi sebagai simbol-simbol untuk menumbuh-kembangkan rasa paguyuban (*sense of community*) dalam diri anggota masyarakat.

Bagi masyarakat Bali dirasakan betapa pentingnya peranan adat di dalam kehidupan, karena dengan adat tersebut kesatuan dan persatuan dapat diwujudkan dengan kokoh. Tata krama kehidupan masyarakat yang

---

<sup>89</sup> Paul B. Hortondan Chester L. Hunt, "*Sosilogi*", terjemahan Aminudin Ram dan Tita Sobari, Erlangga Pcers. Jakarta 1991, hal. 306.

telah berlangsung secara harmonis yang tercermin dalam sikap kehidupan toleran, tenggang rasa dan semangat gotong-royong dalam berbagai aspek kehidupan telah diakui kemanfaatannya dan secara terus menerus dibina, dipertahankan, dan dilestarikan serta disesuaikan dengan alam pikiran saat ini yang menghendaki peningkatan kemajuan. Dengan demikian, keterpaduan antara adat dan agama yang telah menyatu di dalam kehidupan masyarakat Bali dan telah mengikatnya sebagai krama-krama adat, baik banjar maupun desa.

Nilai-nilai kepercayaan yang melekat pada masyarakat Bali khususnya umat Hindu adalah tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai adat dan agama yang terintegrasikan di dalam berbagai upacara ritual baik di banjar-banjar adat maupun di desa adat. Dengan demikian, hal inipun sangat mempengaruhi pada hubungan antara warga kasta yang ada di dalam komunitas banjar dan desa. Berangkat dari kesadaran akan nilai-nilai yang ada dan berlaku, tentunya di dalam merealisasikan berbagai ketentuan adat dan agama masyarakat Bali dituntut untuk tunduk dan patuh dengan apa yang berlaku termasuk atas eksistensi sistem kasta dengan nilai tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing. Dan hal demikian itu adalah menjadi salah satu faktor yang menjadi batu sandungan mengapa pola interelasi antara warga kasta berbeda mengharuskan berlaku sedemikian "deskriminatif" yang apabila dipandang simbol-simbol perbedaan dikibarkan lewat nilai-nilai kepercayaan.

## B. Sistem kasta dan Status Quo

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian lain, bahwa status kasta yang tersandang pada masyarakat Hindu di Bali, tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh Clifford Geertz<sup>90</sup> dalam sebuah artikelnya bahwa orang Bali terikat kepada paling sedikit tujuh segi kehidupan sosial : (1) Kewajiban melakukan pemujaan terhadap pura tertentu; (2) Tempat tinggal; (3) Tanah pertanian dalam wilayah Subak tertentu; (4) Kasta/Wangsa; (5) Ikatan kerabat atas dasar hubungan darah; (6) Keanggotaan Seka tertentu, dan (7) Kesatuan administrasi. Sementara di bagian lain, masih menurut Geertz di dalam mendefinisikan masyarakat Bali yang dinilainya sebagai individu yang unik, dia memberikan label-label seperti : nama-nama pribadi, nama-nama urutan kelahiran, istilah-istilah kekerabatan, teknonim-teknonim, gelar-gelar status (biasanya disebut dengan nama kasta dalam kepustakaan tentang Bali, dan gelar-gelar publik, yang maksudnya gelar-gelar kuasi-konseptual yang dikenakan oleh para pemimpin, para penguasa, para pedanda, dan para dewa-dewa. Ditambahkannya, budi bahasa masyarakat Bali dikembangkan sangat tinggi dan secara ketat mengatur permukaan luar tingkah laku sosial sungguh melampaui seluruh bidang kehidupan sehari-hari.<sup>91</sup> Sementara Wayan Parthiana menyebutkan bahwa masyarakat Bali terikat dalam

---

<sup>90</sup> Clifford Geertz, "Form and Variation in Balinese Village Structure", *American Anthropologist*, vol. 6, Th. 1959.

<sup>91</sup> Clifford Geertz, *Tafsir* ..... hal. 156.

kerabat-kerabat atau klen (*clan*) yang disebut *dadia*. Di dalam *dadia* tersebut mereka merasakan bahwa mereka berasal dari satu asal-usul keturunan, dengan ditandai oleh adanya satu tempat pemujaan leluhur yang disebut *kawitan*, *sangah pemugeran* yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh anggota *dadia* tersebut.<sup>92</sup> Dalam hal ini Abu Rivai<sup>93</sup> menjelaskan peranan anggota klen (*clan*) : (1) mengaktifkan dan mengkonsepsikan upacara-upacara tertentu baik upacara daur hidup maupun upacara di pura *dadia*, (2) memelihara norma-norma dan adat yang bersifat turun temurun di lingkungan yang bersangkutan, dan (3) klen yang memiliki pusaka tertentu wajib memelihara dan melestarikan pusaka tersebut. Dengan demikian, dari apa yang disampaikan di atas bahwa masyarakat Bali di dalam kehidupan sosialnya terikat berbagai hal yang menyangkut persoalan adat yang melingkupinya.

Di dalam kehidupan masyarakat Bali yang masih diwarnai oleh sistem kasta tersebut, adalah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan antar warga kasta berbeda baik di lingkungan banjar dinas dan terutama di lingkungan banjar adat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa : *Pertama*, warga kasta berbeda yang ada sampai saat ini hidup dalam kondisi perbedaan konsep. Konsep dimaksud adalah tidak semua warga yang menamakan golongan kasta Triwangsa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Hindu, ini terbukti masih sangat tegas

---

<sup>92</sup> Wayan Parthiana. *Kepribadian* ..... hal. 238-239.

<sup>93</sup> Abu Rivai. *Sistem* ..... hal. 39.

bahwa perbedaan tersebut terlihat di dalam sikap dan perilaku, di mana satu kasta menganggap lebih tinggi kedudukannya dari kasta yang lain. *Kedua*, perbedaan kasta yang ada pada masyarakat komunitas desa dan banjar masih terlihat dengan jelas selain dari simbol kedudukan, namun juga di dalam prosesi-prosesi ritual keadatan dan keagamaan. *Ketiga*, warga Triwangsa selalu menjadi menduduki puncak kekuasaan di dalam lingkungan masyarakat adat yang bergelar "moncol", di mana hal tersebut tidak mungkin diduduki oleh warga kasta Sudra/Jaba. *Keempat*, warga kasta berbeda di dalam perkembangannya tidak pernah terlepas dari ikatan adat istiadat dan budaya yang mempengaruhi seluruh kehidupan, dengan tidak terlepas dari kekaburan makna dan nilai hubungan antara kasta-kasta yang ada. Sehingga memunculkan stratifikasi sosial berdasarkan golongan kasta. *Kelima*, segala keputusan adat yang ada pada banjar maupun desa selalu bermuara pada kekuasaan Triwangsa yang disebut moncol tersebut.

Banjar sebagai sub komunitas dari desa tidak terlepas dari kondisi yang melingkupi berbagai masalah berkaitan dengan warga kasta berbeda, karena banjar lebih sarat dengan muatan adat dan keagamaan sudah tentu tidak terlepas dari konsep hidup yang berlaku pada masyarakat Hindu. Dalam hal ini, kondisi perbedaan kasta pada warga atau krama adalah merupakan permasalahan klasik yang tidak atau belum sepenuhnya mengalami perubahan yang jelas. Menanggapi kondisi yang demikian itu I

Gusti Ngurah Bagus<sup>94</sup> mengatakan bahwa pada banjar paling sering terdapat konflik-konflik yang menyangkut tentang hubungan antar kasta, Untuk itu, tatanan yang menyangkut hubungan antar warga pada banjar atau desa haruslah melalui interelasi warga kasta berbeda yang ada pada komunitas tersebut.

Karena berbagai permasalahan yang menyangkut kasta berbeda lebih dapat difahami melalui interelasi didalam warga kasta berbeda di dalam kehidupan desa dan banjar, maka dengan demikian berbagai permasalahan yang berkaitan kasta pada warga dapat dilihat pada kehidupan komunitas tersebut baik itu terlihat melalui perilaku dan sikap keseharian maupun dalam pelaksanaan atau prosesi upacara-upacara yang bernuansa adat atau keagamaan. Akan memberikan gambaran bahwa interelasi yang terjadi pada warga kasta berbeda adalah merupakan faktor yang memberikan pengaruh terhadap pola interelasi yang terjadi antar warga kasta yang ada di lingkungan banjar baik banjar adat maupun banjar dinas.

Pola interelasi warga kasta berbeda pada banjar adat akan berlainan dengan yang terdapat pada banjar dinas. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi nilai-nilai yang berbeda, seperti pada banjar adat masih berlaku hubungan (relasi) yang bersifat ketergantungan (patronase) antara kasta Brahmana dengan kasta lainnya yang dikenal dengan sebutan

---

<sup>94</sup> I Gusti Ngurah Bagus. *Hubungan* ..... hal. 518.

hubungan *Pasiwaan*.<sup>95</sup> Dalam hal ini I Gusti Ngurah Bagus menjelaskan maksud hubungan tersebut, yaitu yang dimaksud dengan hubungan *Pasiwaan* adalah hubungan antara *Siwa* dan *Sisia*, di mana hubungan orang dari kasta Brahmana (*Siwa*) sebagai pemimpin upacara khususnya di sini sebagai pendeta (*pedanda*) dengan kasta-kasta lainnya sebagai *Sisia*, yaitu orang-orang yang patut dipimpin upacaranya. Dan hubungan tersebut masih terus bertahan secara turun temurun sampai ke generasi berikut, dengan tidak dapat tergantikan oleh kasta lainnya. Sementara pada banjar dinas pola interelasinya lebih bersifat demokratis dan terbuka, tidak dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang mengikat secara adat dan agama, namun demikian nilai kepentingannya didominasi oleh kepentingan negara.

Sistem kasta yang berlaku pada kehidupan masyarakat Bali yang digambarkan lewat praktek interelasi warga kasta pada lingkungan banjar, juga memberikan gambaran lain bahwa eksistensi kasta tersebut tidak terlepas dari sikap yang bersifat status quo dari para warga yang ingin mempertahankan kewangsaannya, karena menurut mereka kewangsaannya adalah merupakan hal yang didapat secara turun temurun yang tidak dapat diganggu gugat oleh kondisi apapun, sekalipun tuntutan jaman menghendaki lain. Dan pada kenyataannya, bertahannya sistem kasta pada masyarakat Bali adalah sangat mewarnai sikap dan perilaku warga masyarakat khususnya warga yang terdapat pada lingkungan banjar. Walaupun telah banyak terjadi gerakan-gerakan reformasi yang dilakukan

---

<sup>95</sup> I Gusti Ngurah Bagus, *Hubungan* ..... hal. 518.

sejak jaman penjajahan, namun inti tuntutan nya bukan pada penghapusan kasta, akan tetapi menuntut pada persamaan hak. Dengan demikian keberadaan kasta pada pokoknya adalah merupakan kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Bali yang menurut konsep Hindu adalah diharapkan kepada semua lapisan kasta atau warna/wangsa dapat saling menghargai antara satu dengan lainnya sesuai tugas dan kewajibannya. Walaupun dalam prakteknya telah dikaburkan nilai maknanya oleh masyarakat Hindu sebagaimana dijelaskan oleh Ketut Wiana<sup>96</sup> bahwa telah terjadi kekaburan di dalam memahami konsep akan warna atau wangsa yang kini dikenal dengan kasta pada masyarakat Hindu di Bali yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya.

### C. KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT YANG OTONOMUS

Aturan main diantara banjar adat dan banjar dinas perbedaannya cukup mencolok. Pertama dilihat dari tinjauan peran, bahwa banjar adat berperan sebagai banjar atau lembaga yang mengayomi masyarakatnya dengan berintikan adat dan istiadat yang berlaku. Sementara dalam bidang religi sebagaimana dijelaskan oleh Abu Rivai<sup>97</sup> bahwa peran banjar adat dalam bidang religi adalah sangat besar, yaitu ikut mengkonsepsikan dan melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan. Masyarakat dalam hal ini anggota atau krama dari suatu banjar dihadapkan

---

<sup>96</sup> Ketut Wiana, *Kasta* ..... hal. 33-60.

<sup>97</sup> Abu Rivai, *Sistem* ..... Hal. 59

pada peraturan serta aturan main yang berlaku secara turun temurun, dan bagi masyarakat Bali khususnya umat Hindu adalah sudah menjadi ketentuan bagi mereka untuk tunduk dan patuh pada peraturan yang diberlakukan oleh adat, bahkan lebih dari itu pelestarian mengenai berbagai hal yang menyangkut adat sangat diperhatikan. Adakalanya bagi sebagian masyarakat warga/krama adat akan lebih tunduk dan patuh pada apa yang dituangkan dalam peraturan-peraturan yang secara tertulis dikemas dalam awig-awig daripada peraturan lain yang bersifat konvensional yang datang dari luar adat. Mereka akan sangat terikat oleh nilai adat yang berlaku serta pengabdianya terhadap nilai tersebut datang dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan-paksaan. Hal tersebut terjadi karena perasaan mereka telah dilingkupi oleh rasa memiliki yang mendalam akan nilai-nilai yang bermuatan adat.

Sementara peran dari banjar dinas adalah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah (negara) yang pada intinya menuntut hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat sebagai warga negara. Hal lain yang membuat masyarakat dihadapkan pada apa yang menjadi kepentingan bersama, mereka menilai bahwa banjar adat lebih memberikan arti dan makna daripada banjar dinas. Walau demikian, dalam berbagai aktivitas masyarakat sering dihadapkan pada kerancuan bahwa yang dilakukan di lingkungan banjar sulit untuk membedakan kapan kapan kegiatan-kegiatan yang diadakan terlepas dari keduanya, karena di dalam berbagai ritual keagamaan akan muncul warna adat yang sangat melekat dengan

kehidupan yang berlaku pada masyarakat, dalam hal ini sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu bahwa antara ritualisasi adat dan keagamaan bagi masyarakat Bali pada umumnya memang tidak bisa dipisahkan.

Kedua, bahwa hubungan warga kasta berbeda pada lingkungan banjar adat dan dinas akan dibedakan oleh berbagai kepentingan yang berlainan. Kepentingan yang berkaitan dengan masalah adat dan keagamaan akan sangat kuat mendorong masyarakat untuk melakukan yang terbaik dengan penuh kesadaran dan bersifat kolektif, karena nilai-nilai yang terkandung didalamnya menjadikan mereka jauh lebih bergairah dan responsif tanpa reserve, hal mana menurut mereka bahwa apa yang dilakukan demi kepentingan adat akan memberikan dampak tidak saja di dunia, akan tetapi juga berdampak untuk nanti di alam yang fana.

Sementara interelasi warga kasta berbeda di lingkungan banjar dinas lebih dilatarbelakangi oleh nilai kepentingan negara dalam hal ini pemerintah, dimana peranan warga dituntut untuk patuh pada peraturan dan ketentuan secara administratif yang secara vertikal ke bawah oleh lembaga pemerintah di atasnya. Sebagai lembaga negara yang mewajibkan warganya untuk turut berperan serta di dalam pembangunan negara dan bangsanya, maka kondisi tersebut mewajibkan warga banjar dalam hal ini banjar dinas adalah merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan dari program-program yang harus dilaksanakan. Dengan

demikian, peranan warga banjar tersebut sangat menentukan lancar tidaknya pelaksanaan pembangunan yang digelas negara tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa banjar dinas yang merupakan sub komunitas dari desa dinas yang juga sebagai unit terkecil dari lembaga pemerintahan adalah berperan sebagai ujung tombak pembangunan yang turut menentukan keberhasilan pembangunan yang ada. Dalam hal ini dapat dicontohkan berbagai program seperti : keluarga berencana (KB), pendidikan, kesehatan, transmigrasi, dan lain sebagainya. Hal mana juga ditegaskan oleh Abu Rivai dalam menilai peranan banjar dinas bahwa banjar sebagai wadah pelaksanaan bermacam-macam kegiatan , baik yang beraspek ekonomi, kemasyarakatan, pembangunan umum, maupun pemerintahan.<sup>98</sup>

Keberadaan banjar dinas sebagai lembaga yang berperan dalam hal administratif sangat dipengaruhi oleh nilai eksternal. Dimana di dalam menyelenggarakan pemerintahannya berlaku atas pengaruh negara yang terjalin secara struktural, untuk itu warganya tidak memiliki otonomi dan harus tunduk pada apa yang diinstruksikan oleh negara. Sementara pada banjar adat sebagaimana desa adatnya, adalah suatu komunitas yang memiliki otonomi di dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan baik kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai adat ataupun keagamaan. Keduanya adalah merupakan hak otonomi warga adat yang telah

---

<sup>98</sup> Abu Rivai, Sistem ..... Hal. 58

dilegitimasi oleh negara, artinya desa adat yang membawahi banjar-banjar adat tidak terkait dalam jalinan struktural. Kondisi tersebut menurut Abu Rivai<sup>99</sup> adalah bahwa desa adat dengan banjarnya bersifat *otonomus* dan tidak tidak terkait secara struktural dengan sistem pemerintahan baik sejak jaman jajahan maupun pemerintah republik seperti sekarang ini. Dengan demikian, warna dari interelasi yang berlaku pada warga kasta berbeda akan jelas berbeda karena dengan nilai internal yang telah menguat pada kehidupan warga banjar adat tidak terpengaruh oleh nilai-nilai dari luar, bahkan adakalanya hal tersebut berlaku pada banjar adat dengan ketertutupannya.

#### D. PATRONASE DAN KEPEMIMPINAN ADAT

Berbagai permasalahan yang menyangkut kasta pada masyarakat Bali lebih dapat dipahami melalui hubungan antar golongan kasta yang ada pada banjar dan desa, baik itu terlihat melalui perilaku dan sikap keseharian maupun dalam pelaksanaan atau upacara keadatan dan keagamaan. Lebih jauh dari itu terdapat hubungan yang memperlihatkan hubungan antar kasta, seperti adanya hubungan yang bersifat ketergantungan/patronase antara kasta Brahmana dengan kasta lainnya yang dikenal dengan sebutan *Siwa* dan *Sisia (Pasiwaan)*<sup>100</sup> serta hubungan antara kasta Ksatria dengan kasta Sudra/Jaba yang dikenal dengan

---

<sup>99</sup> Abu Rivai, Sistem ..... hal.52

<sup>100</sup> I Gusti Ngurah Bagus, 1979, ..... hal. 518

sebutan hubungan *Gusti* dengan *Panjak IKaula (Pagustian)*. Lebih jelasnya I Gusti Ngurah Bagus menguraikan bahwa yang dimaksud dengan hubungan Siwa dengan Sisia adalah hubungan orang dari kasta Brahmana sebagai pemimpin upacara khususnya di sini sebagai Pendeta (Pedanda) dengan kasta-kasta lainnya sebagai Sisia, yaitu orang-orang yang patut dipimpin upacaranya. Sedangkan hubungan *Gusti* dengan *Panjak/Kaula* maksudnya adalah hubungan kasta yang umumnya dari kasta Satria/Ksatria (ada juga Waisya) sebagai penguasa/tuannya (ratu/prabu, moncol) dengan pengikut/pengiring (panjak, kaula). Hubungan patronase seperti tersebut biasanya bersifat turun-temurun diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Di dalam perkembangan bermasyarakat dewasa ini pada kehidupan beragama di Bali yang masih terbingkai erat dengan pola adat yang berlaku, alur hubungan yang bersifat "Pasiwaan" masih tetap berlanjut. Namun, hubungan "Pagustian" di dalam prakteknya sudah tidak ada lagi, walaupun ada hanya berlaku pada kalangan yang terbatas seperti pembantu yang berkasta Sudra/Jaba mengabdikan/bekerja pada tuannya yang berkasta Triwangsa. Hubungan pasywaan akan tetap berlanjut, karena ketergantungan warga masyarakat banjar/desa adat kepada "Moncol"<sup>101</sup> sangatlah tidak terlepas dari sisi kehidupan mereka sehari-hari dan

---

<sup>101</sup> I. Gusti Ngurah Bagus dalam tulisannya "Hubungan Patronase Dalam Masyarakat Bali Dewasa Ini" mengemukakan bahwa Moncol adalah Klen/Klan yang mempunyai kedudukan menonjol dalam adat yang menjadi pengayom bagi warga/krama desa/banjar.

pandangan umat Hindu yang meyakini bahwa keberadaan "Moncol" tersebut tidak saja memberi pengayoman dalam hidup di dunia akan tetapi juga memberi jalan "kelurusan" pada alam yang akan ditempuh setelah mati.

Tokoh yang disebut moncol tersebut adalah sebagai seorang yang dimunculkan pada posisi tertinggi, baik di lingkungan banjar adat ataupun desa adat, walau kedudukan moncol tersebut bukan dan tidak harus sebagai pedanda (pendeta). Ciri ini akan terlihat pada pola hubungan antara moncol dengan warga/krama adat banjar/desa. Para warga/krama banjar/desa adat akan sangat patuh dan taat pada petunjuk dan keputusan berkaitan dengan adat istiadat, pola hubungan demikian itu telah sangat mengakar sejak kedudukan dan peranannya menjadi orientasi warga/krama adat banjar/desa di dalam berbagai ritualisasi adat dan keagamaan.

Kedudukan dan peran moncol untuk berbagai hal berkaitan dengan keputusan adat sangat menonjol di kalangan warga/krama baik banjar adat maupun desa adat, hal tersebut tidak terlepas dari nilai kepemimpinannya yang kharismatik di tengah masyarakat adat. Sehingga dengan kemampuan yang dimilikinya ia memiliki otoritas yang kharismatik pula, artinya penilaian masyarakat didasarkan pada kemampuan khusus yang ada pada diri sang moncol yang dipercaya berasal dari anugerah Tuhan. Dan masyarakat banjar adat maupun desa adat mengakui adanya kemampuan itu berdasarkan kepercayaan, karena apa yang dilihatnya dari moncol tersebut adalah atas ukuran manusia normal, disamping tentunya karena dari kalangan mana moncol tersebut lahir.

Moncol adalah seorang pemimpin yang betul-betul merupakan pengayom bagi warganya (umat Hindu). Kepemimpinannya diidentikkan sebagai kepemimpinan tradisional, di Balihal tersebut dapat dilihat dari pola hubungan yang berlaku pada sistem Pasiwaan. Disamping hubungan itu senantiasa menunjukkan moncol dan warga adat menunjukkan ciri-ciri hubungan otoritas tradisional, yaitu adanya hubungan yang bersifat vertikal, sangat mempribadi, adanya kewajiban yang tidak terbatas dan semacamnya. Dan dalam hal ini pola hubungan tersebut sangat melembaga pada masyarakat adat. Moncol bukanlah seorang pedanda (pendeta), namun demikian segala nasehat dan arahnya selalu digugu dan ditiru.

## BAB V

### P E N U T U P

Studi perubahan simbol-simbol pada warga kasta berbeda di dalam mengadakan interelasi di lingkungan banjar di Bali, dengan mengambil kasus pada satu banjar sebagai penelaahan mikro dan satu desa dalam makronya, dalam hal ini tidaklah dimaksudkan untuk menarik generalisasi umum. Kesimpulan-kesimpulan yang diambil tetap berlaku bagi kasus banjar, baik secara terpisah, yaitu pada masing-masing banjar, maupun dalam konteks kesatuan secara agregat yang diperbandingkan satu sama lain. Namun demikian, dari studi ini diharapkan temuan-temuan yang diperoleh dapat berlaku bagi studi interelasi antara warga kasta berbeda lainnya pada komunitas yang memiliki karakteristik dan kondisi yang sama atau hampir sama. Dengan demikian, pada akhirnya semakin banyak studi kasus perubahan simbol-simbol pada warga kasta berbeda di dalam mengadakan interelasi di lingkungan banjar secara mendalam yang semakin memungkinkan membuat analisis perbandingan, yang pada gilirannya nanti memungkinkan pula menarik generalisasi umum menuju terciptanya teori-teori interelasi antara warga kasta berbeda yang lebih komprehensif. Studi-studi berskala mikro seperti ini pun tidak mustahil dan tidak jarang menciptakan teori-teori penting setelah temuan-temuannya disebarluaskan. Pada bab terakhir ini akan dikemukakan tentang kesimpulan hasil penelitian dan implikasi teorinya. Pembahasan

didalamnya meliputi : kesimpulan (beberapa temuan pokok) dan implikasi hasil penelitian.

Dalam masyarakat Bali, khususnya masyarakat yang beragama Hindu tidak dapat terlepas dari sistem sosial yang bersifat hirarkis berupa sistem kasta. Walaupun istilah kasta yang dimaksud tidak lagi seirama dengan pengertian yang harus dipahami sesuai dengan maksud dan tujuan agama Hindu. Dalam perkembangannya sistem kasta ini menciptakan perbedaan lapisan sosial pada masyarakat Bali. Kasta memiliki konsepsi dasar yang amat berbeda dengan warna. Kaburnya warna dan kasta terjadi karena perkembangan sedemikian rupa dalam masyarakat, terutama karena telah banyak dipergunjingkan masyarakat khususnya masyarakat non-Hindu. Di mana sistem warna dikaburkan dengan sistem kasta, mereka umumnya hanya melihat kenyataan-kenyataan pahit yang dialami oleh umat Hindu dalam sejarah sosialnya.

Banjar sebagai sub komunitas dari desa tidak terlepas dari kondisi yang melingkupi berbagai masalah berkaitan dengan warga berbeda kasta, karena banjar lebih sarat dengan muatan adat dan keagamaan sudah barang tentu tidak terlepas dari konsep hidup yang berlaku pada masyarakat Hindu. Dalam hal ini, kondisi perbedaan kasta pada warga atau krama adalah merupakan permasalahan klasik yang belum sepenuhnya mengalami perubahan yang jelas. Bahkan pada banjar paling sering terdapat konflik-konflik yang menyangkut hubungan antar kasta.

Dalam kondisi pemahaman kasta/warna/wamsa/wangsa seperti demikian, persoalan yang timbul sekarang ialah, apakah di dalam perkembangannya sekarang permasalahan kasta masih berpengaruh terhadap denyut kehidupan masyarakat Bali, khususnya kehidupan warga atau kerama desa/banjar umat Hindu yang tidak terlepas dengan masalah kasta ? Tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut tidaklah mudah, karenanya untuk menjawab hal yang dimaksud diperlukan satu penelitian yang cermat dan tersendiri, dengan membahas banyak faktor yang terkait agar bisa diperoleh jawaban yang memadai.

Beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

- (1) Perubahan simbol-simbol yang bagaimana terdapat pada warga kasta berbeda di dalam lingkungan Banjar Adat dan Banjar Dinas?
- (2) Mengapa perubahan itu terjadi?.

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa orang warga/krama banjar Belong desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, beberapa kesimpulan (temuan pokok) dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Perubahn simbol-simbol pada warga kasta berbeda di dalam melakukan Interelasi di lingkungan banjar, walaupun bertujuan untuk melaksanakan kepentingan bersama. Namun, mereka berangkat dari konsep yang berbeda, hal mana dapat dilihat pada penyelenggaraan upacara-upacara (ritual) yang berkaitan dengan

keadatan dan keagamaan, sementara pada masalah yang bersifat administratif telah mengalami revormasi sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pemerintah di dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat. *Kedua*, perubahan simbol-simbol pada warga kasta berbeda di dalam melakukan interelasi di lingkungan banjar dihadapkan pada konteks kepentingan berbeda boleh dikatakan tidak ada permasalahan, hal mana terjadi dikarenakan berbagai faktor yaitu :

- 1) Warga kasta yang berbeda pada banjar/desa sadar betul bahwa lembaga tempat mereka mengekspresikan nilai-nilai kehidupan sosial yang berbingkai adat dan agama tersebut, membutuhkan hubungan yang serasi dan selaras. Sehingga simbol-simbol yang berlaku pada kedua fungsi banjar tersebut disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda pula.
- 2) Partisipasi dan solidaritas sesama warga kasta sangat dijunjung tinggi dengan tidak melihat perbedaan yang ada, karena bagi seorang warga atau krama yang ada di dalam lingkungan banjar adat dan banjar dinas keberadaannya akan sangat ditentukan oleh nilai dharma pada sesama dan lingkungannya.
- 3) Kepatuhan warga/krama terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku sangat tinggi, sehingga tidak ada keberanian untuk melanggarnya.
- 4) Kepemimpinan adat dan dinas yang selalu bekerja sama secara selaras dan serasi untuk kepentingan bersama.

Perbedaan simbol-simbol yang terdapat pada warga kasta berbeda di dalam mengadakan interelasi di lingkungan banjar adat dan banjar dinas lebih disebabkan oleh dua faktor yakni : pertama aturan adat

yang sudah menjadi kesepakatan dan kedua aturan publik/negara yang menuntut nilai-nilai kesetaraan diantara sesama warga. Banjar adat dan banjar dinas sarat dengan muatan nilai-nilai adat yang berlaku berorientasi pada kepentingan-kepentingan warga pada permasalahan sosial religiusnya. Disamping secara administratif ada tuntutan dan penyesuaian dengan kebutuhan negara di dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang sarat dengan program-program pembangunan.

Simbol-simbol yang berlaku pada warga kasta berbeda di dalam mengadakan interelasi di lingkungan banjar adat dan banjar dinas lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : *Pertama*, karena masih berlakunya sistem kasta pada warga masyarakat banjar ataupun desa, di mana atribut kewangsaan masih dianggap sebagai gambaran tinggi rendahnya derajat antara kasta satu dengan lainnya, sehingga ada upaya bagi Triwangsa untuk mengadakan "status quo" bagi eksistensinya. *Kedua*, kemampuan seseorang dalam pendidikan dan pengetahuan, sehingga dengan kemampuannya tersebut melahirkan intelektual-intelektual yang dapat saling memahami secara lebih bijak akan keberadaan masing-masing. *Ketiga*, kedudukan seseorang di dalam pekerjaannya yang dalam hal ini memberikan pengaruh besar akan keberadaannya di lingkungan masyarakat dimana dia berada. *Keempat*, kekayaan seseorang di dalam lingkungan dimana dia berada. Dengan kekayaannya memungkinkan seseorang sekalipun dari kalangan Sudra/Jaba akan menjadikan dia sebagai orang yang memiliki "bargiming

power" yang tinggi. *Kelima*, ketergantungan kalangan kasta Sudra/Jaba terhadap Triwangsa akan nilai-nilai adat yang berlaku seperti adanya hubungan patronase dalam konsepsi kepemimpinan Hindu dalam berbagai ritualisasi keadatan dan keagamaan. Otoritas kepemimpinan adat yang merupakan salah satu ciri yang terpenting dari kegiatan adat pada masyarakat Hindu di Bali adalah menempatkan tokoh adat atau yang sering disebut dengan Moncol sebagai seseorang yang menempati posisi tertinggi di lingkungan warga/krama baik di banjar adat maupun di desa adat. Meskipun kedudukannya bukan dan tidak harus sebagai pedanda (pendeta), namun keberadaannya membuat warga/kerama akan mematuhi petunjuk dan keputusannya tanpa reserve. Hubungan yang terjadi telah mengakar sejak kedudukan dan peranannya menjadi orientasi warga/krama di dalam berbagai ritualitas adat dan keagamaan. Otoritas yang dimiliki Moncol ini bersifat tradisional, kedudukan dan peranannya tidak akan pernah tergeserkan oleh kelompok lain, dan karena keberadaannya tersebut membuat para warga/krama merasa terayomi, terutama apabila berkaitan dengan berbagai permasalahan kehidupan sosial-religiusnya.

Dari gambaran tentang perubahan simbol-simbol perilaku pada warga kasta berbeda di dalam mengadakan interelasi di lingkungan banjar adat dan banjar dinas di atas, nampak perbedaan mendasar yang dapat disimpulkan, yaitu : *Pertama*, lembaga banjar yang menjadi orientasi warga memiliki fungsi kepentingan yang berbeda, banjar adat

dan banjar dinas berfungsi sebagai wahana kepentingan dalam bidang adat dan sosial-religius, serta berbagai kepentingan lainnya yang bersifat administratif. *Kedua*, pada banjar adat dan banjar dinas masih terdapat nilai-nilai kepercayaan yang tetap melekat pada kehidupan warganya, di samping itu masih berlaku sistem kasta yang melatarbelakangi sikap dan perilaku warga kasta berbeda yang dalam hal ini atribut kewangsaan menandakan akan tinggi rendahnya seseorang di dalam masyarakatnya. Sehingga perilaku warga kasta berbeda di lingkungan banjar yang berlainan tugas dan fungsi tersebut menempatkan warga kasta berbeda menggunakan simbol-simbol yang berbeda.

## **B. Implikasi Teori**

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perubahan simbol-simbol perilaku pada warga kasta berbeda di dalam melakukan interelasi di lingkungan banjar begitu kompleks dan memerlukan pemahaman yang seksama, mengingat masyarakat Bali yang berada pada ikatan kokoh adat dan agama mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang. Sebagaimana disajikan pada bab terdahulu, Bali dengan terminologi tradisionalnya telah melewati perjalanan yang panjang. Sebagai sebuah dinasti kerajaan yang hidup dimulai dengan invasi kerajaan Jawa dengan "kekuasaan"-nya Sang Patih Gajah Mada pada tahun 803 S, sampai pada "pagelaran" raja-raja dengan nilai tradisionalnya yang berakhir pada abad pertengahan 19. Periode terakhir

dari "pagelaran" raja-raja di Bali berakhir bersamaan dengan revolusi atau bangkitnya nasionalisme kebangsaan pada republik ini. Sehingga pengaruh dari nilai-nilai tradisionalnya masih sangat melekat pada kehidupan sosialnya.

Hal mana sesuai dengan gambaran yang dikemukakan oleh I Gusti Ngurah Bagus pada Sebuah Catatan Kecilnya mengenai Hubungan Patronase Dalam Masyarakat Bali Dewasa Ini, yaitu masih berlaku hubungan ketergantungan/patronase antara hubungan kasta Brahmana dengan kasta lainnya yang dikenal dengan sebutan hubungan *Siwa* dengan *Sisia (Pasiwaan)* serta hubungan antara kasta Satria dengan kasta Sudra/Jaba yang dikenal dengan sebutan hubungan *Gusti* dengan *Panjak/Kaula (Pagustian)*. Max Weber melihat bahwa hubungan yang demikian adalah berkaitan dengan pola kepemimpinan yang bercorak otoritas tradisional, dan karena kelebihan yang dimiliki oleh pemimpinnya dapat pula bersifat kharismatik.

Dalam temuan lain tentang masalah kasta yang dalam penelitian ini dijadikan persoalan inti untuk melatarbelakangi hubungan yang berlaku diantara kondisi yang ada. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa perbedaan antar kasta masih mempengaruhi kehidupan sesama warga di dalam berinterelasi pada komunitas banjar mencakup berbagai kepentingan. Karenanya orientasi keputusan-keputusan di dalam menyelesaikan masalah yang ada, baik itu berkaitan dengan masalah adat, maupun masalah dinas/administrasi masih dihadapkan pada nilai-

nilai yang melatarinya. Hal demikian dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik yang tidak diinginkan. Menurut I Gusti Ngurah bahwa apabila dipelajari dari segi yang lebih mendalam adanya konflik antar-kasta terutama yang dipermasalahkannya itu adalah sistem nilai yang menjadi dasar pemisahan.<sup>102</sup> Masalah ini diungkapkan dalam pelbagai bentuk penuangan seperti yang tampak dalam berbagai bentuk sastra (dongeng, prasasti, mitologi), dan upacara. Umumnya protes-protes itu dilontarkan masih dalam bentuk tersembunyi dan sindiran. Kemudian pertentangan secara terbuka terjadi dalam dua puluhan setelah seluruh Bali dikalahkan Belanda. Walaupun pemerintah kolonial dalam melaksanakan politiknya terutama mengenai masalah adat berdasarkan hukum adat Bali, namun konflik mengenai masalah kasta yang berkaitan dengan sistem nilai yang melatarinya terus berlangsung.

Masalah kepemimpinan ini erat sekali dengan perkembangan yang terselenggara, baik itu pada desa/banjar adat maupun pada desa/banjar dinas/administrasi. Karena di dalam institusi keduanya memiliki warna kepemimpinan yang berbeda, dimana yang bermuatan adat akan berwajahkan tradisional, corak kepemimpinannya-pun akan berwajah tradisional. Sementara pada kepemimpinan yang bersifat kedinasan adalah merupakan perkembangan dari nilai-nilai tradisional adalah kepemimpinan yang berlaku saat ini. Di dalam kepemimpinan tradisional pada masyarakat Hindu di Bali tidak terlepas dari nilai-nilai

---

<sup>102</sup> I Gusti Ngurah Bagus. "*Hubungan* ..... hal. 521.

agama Hindu itu sendiri, dimana salah satu ciri terpenting dari kegiatan adat pada masyarakat Hindu adalah menempatkan tokoh adat atau sering disebut dengan moncol. Otoritas yang dimiliki Moncol ini bersifat tradisional, kedudukan dan peranannya tidak akan pernah dapat digeser oleh kelompok atau individu dari klen lain. Dan keberadaannya akan terus berlanjut secara terus menerus, dari generasi ke generasi turunannya.

Moncol yang berada pada tempat penelitian adalah dari kalangan kasta Brahmana dari klen *Kamiten*. Hal mana tidak menjadi kebiasaan bahwa yang biasa memiliki status Moncol adalah dari kalangan kasta Satria. Dari tulisannya I Gusti Ngurah Bagus di contohkan tentang keberadaan Moncol di Desa Batubulan, dimana yang berstatus Moncol adalah dari kalangan kasta Satria yang berklen *Satria Dalem*, dan bergelar *Cokorda*. Ditekankan dalam uraiannya, ternyata bahwa walaupun hubungan patronase tidak seperti waktu zaman kerajaan, namun masih tampak kelangsungannya hingga kini terutama berkisar pada masalah adat dan upacara agama. Untuk mempererat relasi patronase maka di samping memakai cara yang telah diwariskan (otoritas tradisional) juga dengan usaha sikap pribadi serta memakai faktor kekayaan dalam rangka memelihara, mempererat serta memperluas pengaruhnya.<sup>103</sup> Hal serupa terjadi seperti di lokasi penelitian bahwa upaya untuk memperluas pengaruh dalam rangka melestarikan hubungan patronase ini adalah dengan menempatkan sanak keluarganya di seluruh banjar yang berada di

---

<sup>103</sup> I Gusti Ngurah Bagus, "*Hubungan* ..... hal. 523-525.

lingkungan desa Sanur Kaja, di mana jumlah banjaranya ada delapan buah. Dan semua yang berstatus Moncol-nya adalah dari keturunan Moncol desa adat Sanur Kaja.

Pola kepemimpinan di tempat penelitian ini, apabila dilihat secara menyeluruh dapat dilihat bahwa hubungan patronase *Siwa-Sisia* (*Pasiwaan*) masih menunjukkan keadaan yang belum mengalami perubahan. Sementara pola kepemimpinan pada masalah *Gusti-Panjak* (*Pagustian*) memperlihatkan adanya perubahan, sehubungan dengan faktor perkembangan sejarah politik yang terjadi di seluruh Bali. Dari pandangan teori struktural fungsional yang melihat sistem fungsi dalam kepemimpinan pada masyarakat Bali, baik yang bersifat tradisional maupun yang telah mengalami perkembangan dan perubahan seperti saat ini tidak dapat dilepaskan begitu saja pemerintah-pun dalam hal ini negara tidak dapat dengan tegas mengadakan perubahan-perubahan demi kepentingan tertentu. Namun, harus disesuaikan dengan tuntutan sistem yang berlaku. Apabila melihat kondisi tersebut kita harus berangkat dari asumsi-asumsi yang mendasari teori ini yaitu : *Pertama*, masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung; *Kedua*, hubungan pengaruh-mempengaruhi tersebut bersifat timbal-balik; *Ketiga*, sekalipun integritas sosial tidak pernah tercapai secara sempurna, namun sistem akan senantiasa beproses ke arah itu; *Keempat*, perubahan dalam sistem sosial umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian-penyesuaian, dan tidak terjadi

secara revolusioner; *Kelima*, faktor terpenting yang mengintegrasikan masyarakat adalah adanya kesepakatan diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

Sementara konsep kasta yang masih menjadi momok pada masyarakat Bali yang ada dalam lingkaran kehidupan sosial-religiusnya sangat kuat. Di dalam penelitian ini ditemukan pada peran dan kedudukan yang mewarnai semua segmentasi yang mempengaruhi sistem nilai-nilai yang berlaku. Terlepas dari hitam dan putihnya pendapat dan gambaran tentang kasta yang ada di lingkungan kehidupan masyarakat Bali, namun harus diakui kalangan Sudra-pun tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan kalangan kasta-kasta di atasnya. Seperti telah digambarkan pada hasil penelitian yang didapat, bahwa keberadaan Moncol tidak mungkin lahir dan diduduki oleh kalangan/kaum kasta Sudra/Jaba, dan ini sangat disadari oleh kasta Sudra khususnya warga/kerama desa Sanur Kaja khususnya banjar Belong. Namun demikian, perkembangan yang terjadi telah mengarah pada perubahan, bahwa nilai-nilai pendidikan telah mensejajarkan kedudukan masyarakat dalam kedudukan sosialnya, walau terbatas dalam peranan dalam pandangan adat dan agama masih berlaku sistem nilai yang membedakan peran kasta tersebut. Dilihat dari teori strukturasi, mengikuti konsep Gidden yang bergantung pada ruang dan waktu. Apabila struktur yang ada pada sistem nilai yang berlaku pada masyarakat Bali memberikan peluang pada kasta Sudra sesuai dengan tuntutan yang berlaku dalam masyarakat

yang telah menerima berbagai ukuran mengenai demokrasi. Ditegaskan oleh Giddens bahwa struktur bukan obyektif yang tegap dan kukuh, tetapi struktur subyektif yang dibangun oleh aktor-aktor.<sup>104</sup> Ditambahkan bahwa individu, bukan pemegang peran yang patuh, tetapi juga bukan aktor yang bebas memproduksi, tetapi agen yang bisa memproduksi dan reproduksi, dan semua individu bergantung pada *time*, *space* dan *power*. Dimana ketika di dalam masyarakat Bali sedang beranjak ke dalam konsep kehidupan modern, dan meninggalkan atribut-atribut lama untuk menentukan kedudukan dalam birokrasi misalnya, maka seseorang akan mempunyai peluang untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dan tidak tergantung pada status *ascribe*. Sementara apabila melihat kenyataan yang ada, kasta merupakan realitas obyektif masyarakat Bali yang dari sejak lahir hingga mati seseorang selalu disosialisasikan dan diinternalisasi. Kenyataan-kenyataan tersebut baru diterima dan tidak dapat diingkari sebagai anggota masyarakat Bali. Realitas obyek lain adalah yang di bangun oleh negara republik Indonesia yang menganut sistem "demokrasi" adalah bahwa hak warga dimata negara adalah sama, hal mana dapat ditegaskan dalam teori egaliter, melalui peraturan-peraturan kepegawaian yang melihat kedudukan-kedudukan seseorang di dalam birokrasi ditentukan oleh jenjang pendidikan dan kemampuannya.

Dalam bagian akhir gambaran perubahan simbol-simbol pada warga kasta berbeda di dalam melakukan interelasi di lingkungan banjar di

---

<sup>104</sup> Anthony Giddens, *The Constitutions of ...* Hal. 38.

Bali, rupanya tidak terlepas dari tata nilai atau tatanan yang berlaku pada masyarakat yang berbingkai kepercayaan agama Hindu. Sementara perkembangan menyimpulkan bahwa di samping tatanan yang berlaku telah menjadi landasan tuntunan dan tuntutan warga masyarakat Bali khususnya dalam skope komunitas banjar, dimana di dalamnya telah terbentuk suatu pola hubungan antar individu yang bersifat timbal-balik yang kemudian berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan lainnya dalam kemasan khas solidaritas yang ada pada warna adat-istiadat. Sehingga apabila memperhatikan tesisnya Shepard bahwa dengan pola komunikasi dan interaksi antara sesama manusia yang bertujuan untuk meneruskan tata nilai, gagasan dan keyakinan, pengetahuan dan tradisi yang mereka miliki, maka kelompok sosial yang terbentuk itu dapat memberi ciri yang khas sebagai bentuk sosial yang nyata.<sup>105</sup> Sementara perubahan simbol-simbol pada warga kasta berbeda yang terjadi di lingkungan banjar di Bali mengandung perbedaan kepentingan, lain yang terjadi pada banjar adat maupun pada banjar dinas sebagaimana diungkapkan oleh Blumer dalam menggambarkan kandungan *root image* atau ide-ide dasarnya pada teori interasionisme simbolik, yaitu :

- .....1) Obyek-obyek mempunyai makna yang intrinsik : makna lebih merupakan produk interaksi simbolis. Obyek-obyek dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori : a. obyek fisik, b. obyek sosial, dan c. obyek abstrak seperti nilai-nilai dsb. 2) Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal. Mereka dapat melihat dirinya sebagai obyek. Pandangan terhadap diri sendiri ini lahir di saat proses interaksi simbolik. 3) Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat

<sup>105</sup> John M. Shepard. "Sociology ..... not page.

oleh manusia itu sendiri. 4) Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok; hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai : "organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan sebagai manusia". Tindakan berulang-ulang dan stabil, dan melahirkan apa yang disebut dengan kebudayaan dan aturan sosial.<sup>106</sup>

Perubahan simbol-simbol yang terjadi antara warga kasta yang berbeda dalam banjar pada obyek penelitian berdasar pada perilaku tindakan-tindakan yang berbeda baik sebagai warga adat maupun sebagai warga negara/dinas. Karenanya tidak memperlihatkan adanya benturan-benturan antara sumber fungsi satu dan yang lainnya. Hal ini terjadi lebih disebabkan para warga kasta yang berbeda sudah menyadari peran dan fungsinya, walau di dalam kegiatan-kegiatan tertentu ada saja prioritas yang berlaku bagi kalangan kasta Triwangsa namun hal itu justeru lahir dari kesadaran kaum Sudra. Dan hal ini pula yang memperlihatkan sisi lain bahwa peranan kasta masih mengakar pada kehidupan masyarakat Bali.

Kondisi lain yang dapat diungkapkan dari hasil penelitian ini adalah peranan banjar bagi masyarakat Bali. Secara singkat dapat dirumuskan bahwa fungsi daripada banjar adalah sebagai suatu lembaga sosial yang mengatur hubungan antara azas kebersamaan dan semangat kekeluargaan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan kewajiban dengan hak, hubungan jasa dengan sanksi sosial, hubungan belajar dengan mengajar dalam proses berlangsungnya pendidikan nonformal dan hubungan mental dengan perilaku. Kekuatan yang tercermin pada kesatuan sosial yang terdapat baik di desa adat maupun banjar adat dilihat oleh

---

<sup>106</sup> Margareth Poloma, Sosiologi ..... hal.269

Covarubias<sup>107</sup> yang terungkap pada tulisannya "Island of Bali" sebagai berikut:

..... Cooperative societies : of people bound to assist each other in marriages, home festivals, and especially during the expensive cremations. The various banjar of a village take part in the activities, assisting in the repair and improvement of the temples and contributing to the villages festivals .....

Yang dikemukakan oleh Covarubias di atas adalah menggambarkan fungsi banjar dalam hubungannya dengan desa, serta peranan para warga atau anggota banjar yang juga sebagai warga/anggota desa adat. Sementara Ketut Sudhana Astika dkk, dalam penelitiannya mengenai peranan banjar pada masyarakat Bali membedakan analisa pada banjar yang diambil dari jenis banjar tradisional dan perkotaan. Dalam analisisnya pada banjar yang masih bermasyarakat tradisional dimana dalam hal ini yang menjadi obyek penelitiannya adalah Desa adat Tenganan Pegriingsingan. Terlihat bahwa dari segi fungsi dan kedudukan banjar pada masyarakat memberikan kesan pada lemahnya fungsi banjar pada masyarakat jika dibandingkan dengan fungsi desa adat untuk tujuan yang sama. Sementara peranan banjar pada masyarakat perkotaan yang mengambil contoh pada banjar Kerta Pura (kota Denpasar), pada dasarnya terfokus pada masalah administrasi dan masalah adat terpecah-pecah ke desa asalnya. Dengan demikian terbukti bahwa hubungan antara banjar pengembangan dengan penduduk yang bersifat heterogen, lebih

---

<sup>107</sup> Miguel Covarubias, "Island of Bali". Singapore, Oxford University Press 1972, hal. 60.

berorientasi ke masalah administrasi. Sementara untuk orientasi pada kegiatan adat dan upacara anggota banjar tetap berorientasi ke desa asal semula.

Peranan banjar yang dicontohkan oleh Ketut Astika Sudhana dkk nampak tidak sama dengan peranan banjar yang dilihat pada obyek penelitian, hal ini kemungkinan dapat dilihat antara lain : *Pertama*, bahwa kondisi banjar yang pertama berkaitan dengan banjar yang masyarakatnya masih tradisional seperti warga desa adat Tenganan Pegringsingan, penyebabnya adalah selain jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, juga bersifat homogen. *Kedua*, kondisi banjar yang menjadi contoh di perkotaan dalam hal ini banjar Kerta Pura adalah selain penduduknya bersifat heterogen, juga merupakan penduduk pendatang yang tidak terikat oleh ikatan adat banjar setempat. Mereka hanya terikat secara administrasi, dengan demikian peranan banjar bagi mereka hanya bersifat administratif. Sementara *ketiga*, banjar Belong yang menjadi obyek penelitian ini adalah sebuah banjar yang berpenduduk lebih banyak yang asli (*ngarep*) dibanding dengan pendatang, sehingga peranan banjar pada masyarakatnya bersifat utuh baik secara adat maupun secara dinas/administratif.

Akhirnya, melalui tulisan ini dapat pula dikemukakan tentang tentang kelebihan dan kelemahan dari penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini telah memberikan suatu gambaran tentang perubahan simbol-simbol pada warga kasta berbeda di dalam melakukan interelasi di

lingkungan banjar di Bali. Namun disadari dari apa yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini masih banyak mengandung kelemahan. Sehubungan dengan itu, penelitian yang masih merupakan penelitian awal ini tentu saja belum mampu mengungkapkan banyak hal. Selain dari itu, penelitian ini dilaksanakan tidak dengan mempergunakan suatu kerangka teori tertentu secara utuh, tetapi analisisnya dengan mempergunakan beberapa teori walaupun penggunaannya tidak secara utuh. Namun demikian, peneliti yakin dan percaya bahwa hasil penelitian ini telah mampu memberikan kontribusi teoritik yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai perubahan simbol-simbol perilaku pada warga kasta berbeda di lingkungan banjar. Untuk itu, penelitian yang lebih akurat dan mendalam untuk kasus yang lebih luas perlu ditindak lanjuti. Di samping itu, hasil penelitian ini sebenarnya juga telah menyediakan pengetahuan yang berguna bagi landasan pengetahuan masyarakat di dalam hal interelasi pada banjar.

Sebagaimana lazimnya, penelitian ilmu-ilmu sosial pada akhirnya harus mampu mengajukan prediksi. Bagaimana perkembangan interelasi warga berbeda kasta dalam banjar di Bali? Walaupun nilai-nilai adat dan agama Hindu masih menunjukkan kekuatan tradisionalnya. Namun dengan perkembangan zaman serta faktor kemampuan masyarakat di dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan sedikit demi sedikit gesekan-gesekan modernisasi akan menggeser pola-pola lama, yang pada saatnya nanti tidak disangsikan akan ada perubahan walau tidak

menyeluruh, sekalipun perubahan-perubahan tersebut hanya berlaku pada permukaannya saja. Namun demikian, nuansa keharmonisan yang telah diciptakan oleh nilai-nilai adat patut dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Agung Ngurah Gde, 1986, *Pedoman Penyuratan Awig-Awig*. Majelis Pembinaan Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, Denpasar.
- ..... Dan Ida Bagus Putu Purwita, 1983/1984, *Pemantapan Adat Dalam Menunjang Usaha-Usaha Pembangunan*, MPLA Propinsi Bali.
- Agung, Anak Agung Ngurah dan Ida Bagus Putu Purwita, 1983/1984, *Pemantapan Adat Dalam Menunjang Usaha-Usaha Pembangunan*, MPLA : Propinsi Bali.
- Astika, Ketut Sudhana dkk, 1986, *Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta.
- ....., 1984, *Interaksi Sosial Dalam Arena Perkampungan di Daerah Bali : Kasus Banjar Adat Uma Anyar di Kabupaten Bandung*, Artikel dalam Majalah Analisis Kebudayaan Tahun IV/No. 3 1983/1984, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- ....., 1974, *Banjar Sebagai Suatu Komuniti Kecil di Bali*, Paper Antropologi Pembangunan, Jakarta : FS-UI.
- Abu, Rivai, 1981, *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ardhana, I Ketut, *Kerajaan Badung Dalam Konteks Kolonial Belanda, 1927-1906*, Denpasar, Universitas Udayana.
- Bagus, I Gusti Ngurah, 1975, *Surya Kanta : A Kawangaan Movement of The Jaba Caste in Bali*, Masyarakat Indonesia, vol.II No. 2, Jakarta, LIPI.
- ....., 1987, *Kebudayaan Bali Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Ed. Koentjaraningrat, Djambatan, Jakarta.
- ....., 1987, *Kebangkitan Arah Reformasi dan Kebudayaan di Indonesia*, Ed. Koentjaraningrat, Djambatan, Jakarta.

- ....., 1991, *Bali In The 1950s : Role The Pemuda Pejuang In Bali Political Process*, Dalam Hildred Geertz (Ed), *State and Society In Bali*, Leiden:KITL V Press.
- ....., *Bali di Persimpangan Jalan : Budaya Bali Dalam Pertemuan Dengan Budaya Luar*, NusaData IndoBudaya, Denpasar.
- ....., *Hubungan Patronase Dalam Masyarakat Bali Dewasa Ini*, Sebuah Catatan Kecil, Universitas Udayana, Denpasar.
- Barth, Fredrik, 1993, *Balinese Worlds*, Chicago and London : The University of Chicago Press.
- Blumer, H, 1969, *Symbolic Interaction*, Englewood Cliffs, Prentice - Hall
- Couteau, Jean, 1995, *Bali di Persimpangan Jalan : Transformasi Struktural Masyarakat Bali*, NusaData IndoBudaya, Denpasar.
- Craib, Ian, 1986, *Teori-Teori Sosial Modern : Dari Parson sampai Habermas*, Paul S. Baut dan T. Effendi (penterjemah), Rajawali, Jakarta.
- Covarrubias, Miguel, 1937, *Island of Bali*, New York : The Knopf.
- Djunawati, I G A., 1994, *Desa Adat Sebagai Lembaga Sosial Relegius*, Makalah pada Seminar Daerah F. H. Udayana Denpasar.
- Eiseman, Jr. Fred. B., 1990, *Bali Skala dan Niskala*, vol. II, Berkeley California : Periplus Edition.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Y A 3, Malang.
- Fredderich, R, 1959, *The Civilization and Cultural of Bali*, (Edited by Ernst R. Rost), Calcuta Susil Gupta.
- Geertz, Clifford, 1992, *Tafsir Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- ....., 1969, *Tihingan Sebuah Desa di Bali*, dalam Koentjaraningrat, (Ed). *Masyarakat Desa di Indonesia, Masa Kini*, Jakarta, Penerbit Djambatan.
- ....., 1959, *From and Variation in Balinese Villsge Sructure*, American Antropologist, vol. 61.

- Geertz, Hildred and Clifford Geertz, 1967, *Kinship in Bali*, Chicago The University of Chicago Press.
- Giddens, 1995, *The Contitution of Society Out Line of The Theory of Structuration*, Cambrige : Polity Press.
- Garna, Judistira K., 1993, *Tradisi Transformasi Modernisasi dan Tantangan Masa Depan di Nusantara*, PPS Unpad Bandung.
- Goris, 1974, *Sekte-Sekte di Bali*, Dalam Seri terjemahan Karangan-karangan Belanda, Jakarta, Bharata.
- Geriya, I Wayan, 1993, *Interaksi Desa Adat dan Pariwisata, Studi Kasus di Desa Adat Sangeh, Kabupaten Badung*, Laporan Penelitian, Denpasar : Pusat Penelitian Universitas Udayana.
- Griadhi, Wirtha I Ketut, 1980, *Otonomi Desa Adat dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia*. Dalam Bahan ceramah MPLA, Denpasar : MPLA Bali.
- Gorda, I Gusti Ngurah, 1995, *Nilai-Nilai Agama Hindu dan Etika Ekonomi Wirausahawan Bali*, Disertasi tidak dipublikasikan, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Horton, Paul B. dan Chester L Hunt, 1991, *Sosiologi*, terjemahan Aminudin Ram dan Tita Sobari, Erlangga Pers, Jakarta.
- Johanes Moleong, Lexy, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Kaler, IGK, 1988, *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali*, Denpasar - Bali Agung.
- Kilminster, Richard, 1991, *Structuration Theory as a World - View.*, dalam Bryant and Jary.
- Koentjaraningrat, 1985, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Kepala Inspektorat Bimas Hindu dan Buddha Propinsi Bali, *Desa Adat Bali Meenghadapi Kepariwisataaan*, Seksi Bimas Hindu Kantor Departemen Agama Kodya Denpasar.
- Masyhuri, 1992, *Journal Sejarah, Dinamika Masyarakat Pedesaan : Pejabaten Tahun 1950-1988*, Gramedia, Jakarta.

- M. Poloma, Margareth, 1992, *Sosiologi Kontemporer*, Terjemahan, Rajawali, Jakarta.
- Mabbeth, Hugh, 1989, *The Balinese*, January Books Ltd, m Wellington.
- Mantra, I.B., Penterjemah, 1988, *Bhagawadgita*, Pemda Tingkat I Bali, Proyek Penyuluhan dan Penerbitan Buku Agama 1988/1989, Denpasar.
- ....., 1992, *Tata Susila Hindu Dharma*, Upada Sastra, Denpasar.
- ....., 1993, *Bali Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi Upada Sastra*, Denpasar.
- Naya Sujana, Nyoman, 1995, *Bali di Persimpangan Jalan : Orang-orang Bali di luar Bali beserta Kebudayaan*, Nusa Data IndoBudaya, Denpasar.
- Parthiana, Wayan, 1984, dalam *Kepribadian dan Perubahannya : Beberapa Perubahan dan Pergeseran Nilai-nilai Sosial Budaya Dalam Masyarakat Bali*, Gramedia, Jakarta.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia*, Balai Pustaka, jakarta.
- Raka, I Gusti Gde, 1995, *Monografi Pulau Bali*, Pusat Jawatan Pertanian Rakyat, Jakarta.
- Shepard, John M., 1974, *Sociology, Structure, Interaction and Change*, Harper & Row Publiser.
- Sastrodiwiryono, Soegiarto , 1995, *Bali di Persimpangan Jalan : beberapa faktor Penting Dalam Hubungan Hindu- Islam di Bali*, NusaData IndoBudaya, Denpasar.
- Santeri, Raka, 1983, *Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad : Kesalahpahaman Kasta di Bali*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar.
- Suyatna, Gde, 1982, *Ciri-ciri Kedinamisan Kelompok Sosial Tradisional di Bali dan peranannya dalam Pembangunan*, Disertasi Doktor Fakultas Pascasarjana institut Pertanian Bogor, Proyek Pengadaan/Penerbitan Buku Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

- Swarsi, Si Luh, dkk, 1985, *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Bali*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta.
- ....., 1986, *Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Bali*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta.
- Surpha, I Wayan, 1991, *Eksistensi Desa Adat di Bali*, Upada Sastra Denpasar.
- Triguna, I. B. Gde Yudha, 1994, *Pergeseran dalam Pelaksanaan Agama : Menuju Tattwa*, B P Denpasar.
- Wiana, Ketut, 1994, *Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad : Catur Warna Dalam Agama Hindu*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar.
- Wiratmaja, G. K. Adia, 1995, *Kepemimpinan Hindu*, yayasan Dharma Nurada, Denpasar.
- Warren, Carol A., 1993, *Adat and Dinas : Village and State in Contemporary*, Disertasi yang tidak dipublikasikan, University of Western Australia.

**DAFTAR ISTILAH BALI**

Atma	: Jiwa, roh
Awig-awig	: Peraturan
Anglangkahi Karang Hulu	: Perkawinan, di mana si wanita berasal dari Triwangsa, sedangkan yang laki-laki dari kasta Sudra.
Banjar	: Kelompok terkecil dalam organisasi desa masyarakat Bali
Bendesa/ Kelian adat	: Kepala Adat
Brahmana	: Wangsa pertama dalam masyarakat Hindu
Buta Kala	: Makhluk halus yang jahat perwujudan Dewa yang bersifat merusak
Buta Yadnya	: Korban suci yang ditujukan untuk para Buta Kala agar alam ini dijaga dengan baik
Catur	: Empat
Catur Wangsa	: Empat pembagian golongan berdasarkan kelahiran
Catur Dresta	: Empat aturan hukum
Dewa	: Perwujudan Ida Sang Hyang Widi Wasa
Dewa Brahma	: Perwujudan Ida Sang Hyang Widi sebagai pencipta alam beserta isinya
Dewa Wisnu	: Perwujudan Ida Sang Hyang Widi Wasa sebagai Dewa Pemelihara
Dewa Siwa	: Perwujudan Ida Sang Hyang Widi Wasa sebagai Pelebur (Pemrelina), mengembalikan ke asal
Dewa Yadnya	: Korban suci yang dilakukan untuk para Dewa/ Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Kuasa)

- Desa Adat : Desa yang mempunyai kekuasaan mengatur administrasi/ Pemerintahan
- Desa, Kala, Patra : Menurut situasi dan kondisi
- Desa Dresta : Ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas kondisi suatu lingkungan wilayah (teritorial) karena kesadaran akan terjalannya hidup dan kehidupan manusia terhadap sesama.
- Darma : Kebenaran, kebajikan, agama
- Drati Krama : Perbuatan zinah yang dilakukan oleh seorang suami atau istri yang masih ada dalam ikatan perkawinan.
- Duluhan Desa : Dewan orang-orang tua pendamping Perbekel
- Galungan : Hari raya kemenangan dharma bagi umat Hindu
- Gamia-gamana : Perbuatan melakukan hubungan kelamin atau perkawinan dengan orang yang masih mempunyai hubungan darah dekat, baik dari garis lurus maupun garis ke samping (incest).
- Hyang Widi Wasa : Tuhan Yang Maha Kuasa
- Jaba : Kelompok penduduk Bali yang beragama Hindu yang berada di luar kelompok Triwangsa dan merupakan penduduk yang mayoritas
- Jagadhita : Tujuan agama Hindu yang sifatnya duniawi
- Kahyangan Tiga : Tiga pura yang biasanya ada di setiap desa di Bali (pura desa, pura paseh dan pura dalem)
- Kerama Banjar : Anggota/Warga Banjar
- Kerama Desa : Anggota/Warga Desa
- Kerama Seka Teruna : Anggota Perkumpulan Pemuda yang belum menikah

Ksatria	: Wangsa kedua dalam masyarakat Hindu
Kuningan	: Hari Raya 10 setelah Galungan
Kaja	: Selatan
Kauh	: Barat
Klian	: Ketua
Kulkul	: Kentongan sebagai alat komunikasi tradisional
Kuren	: (1) Keluarga Batih (2) Dapur
Kasinoman	: Juru arah.
Kerama	: Warga
Kamiten	: Salah satu klen/clan dari Brahmana
Kubayan, Bau, Singukan	: Petugas yang ditugaskan membantu pengurus desa
Lontar	: Daun lontar yang bertuliskan huruf Bali
Lokal Arsta	: Pandangan atau saran-saran dari anggota masyarakat adat yang harus diperhatikan di dalam pengambilan keputusan desa adat.
Lokika Sanggraha	: Hubungan kelamin berdasarkan suka sama suka dengan janji untuk kawin, tetapi setelah si wanita hamil, si pria tidak mau mengawininya.
Loka Dresta	: Ketentuan - ketentuan yang berdasarkan keseluruhan yang dihasilkan dalam pesamuhan (masyarakat para prajuru/ahli).
Madya	: Tengah
Madya Ning Madya	: Lebih menengah
Merajan	: Tempat suci keluarga untuk memuja Tuhan dan Roh leluhur yang telah di sucikan (untuk kelas bangsawan)
Merangkat	: Kawin lari berdasarkan azas cinta sama cinta

- Metetulung : Tolong-menolong antar sesama manusia
- Mamitra Ngalang : Hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, tetapi tanpa melalui pernikahan yang sah.
- Manak Salah : Suatu peristiwa kelahiran anak kembar-buncing (kembar berlainan kelamin), yang terjadi pada keluarga Jaba/Sudra. Hal mana dipercaya merupakan pertanda datangnya mala petaka, sehingga dinaggap kotor secara spiritual.
- Moncol : Orang yang mendapat status tertinggi di kalangan masyarakat adat.
- Nista : Kecil
- Nista Ning Nista : Lebih sederhana lagi
- Niskala : Tidak nyata
- Ngaben : Upacara pembakaran mayat untuk pensucian roh orang meninggal dan mengembalikan unsur-unsur badaniah ke asalnya
- Nyeburin : Salah satu bentuk perkawinan adat Bali dengan cara menarik mempelai laki-laki ke dalam keluarga mempelai wanita
- Ngerorod : Kawin lari berdasarkan azas cinta sama cinta (bandingkan dengan merangkat)
- Ngayah : Kerja bakti berupa tenaga pada saat pelaksanaan upacara keagamaan di pura dan pada saat pembangunan atau pemeliharaan, perawatan pura, ngayah adalah bahasa halus dari kata nguopin, yang dikenakan bagi seseorang yang memiliki status sosial terhormat.
- Ngarangin : Menempati pekarangan baru
- Nyekah : Upacara pensucian roh orang yang telah meninggal dunia. Upacara ini dilaksanakan setelah upacara pembakaran mayat (ngaben)

- Odalan : Perayaan setiap 210 hari (enam bulan Bali) di pura merajan, sanggah. Di beberapa tempat, perayaan ini mengikuti tahunsaka yaitu diadakan tiap-tiap 12 bulan (sasih)
- Palemahan : Pekarangan, wilayah teritorial
- Panca Nyadnya : Lima upacara keagamaan dalam agama Hindu
- Parahyangan : Hubungan manusia dengan Tuhan.
- Pasiwaan : Hubungan Siwa dan Sisia, yaitu hubungan kasta Brahmana dengan kasta lainnya.
- Pagustian : Hubungan Gusti dengan Kawula.
- Panjak : Kawula / wong cilik
- Pawongan : Hubungan manusia dengan manusia
- Pitra Nyadnya : Korban suci yang ditujukan untuk para leluhur atau upacara berkaitan dengan kematian seseorang
- Pura : Tempat suci umat Hindu
- Pura Desa : Sombol tempat pemujaan Brahma
- Pura Dalem : Simbol tempat pemujaan Wisnu
- Pura Paseh : Simbol tempat pemujaan Siwa
- Pura Kahyangan Tiga : Tiga unit pura yang dijunjung oleh warga desa adat yang terdiri dari pura desa, pura paseh dan pura dalem. Pura Kahyangan Tiga ini merupakan syarat mutlak bagi eksistensi desa adat.
- Pura Sad Kahyangan : Pura yang dimasyurkan oleh umat Hindu di Bali yang terdiri dari enam pura
- Purwa Dresta : Ketentuan-ketentuan yang bersumber kepada pertimbangan - pertimbangan historis tradisional yang masih dipandang patut.
- Pedanda : Pendeta Hindu

Pemangku	: Orang yang mengurus upacara agama di Pura.
Purusha	: Garis keturunan laki-laki
Pemarisuda Bumi	: Memberihkan bumi.
Penyarikan	: Juru tulis Klian Banjar.
Perbekel	: Kepala Desa/Lurah
Pesamuhan	: Rapat / diskusi
Rsi Yadnya	: Korban suci yang dilakukan untuk para Rsi
Rama Desa	: Warga desa yang cukup tua dan dipilih sebagai pengurus desa.
Sanggah	: Kuil keluarga
Sastra Dresta	: Ketentuan-ketentuan hidup yang tersurat dalam pustaka-pustaka suci.
Seka	: Organisasi tradisional desa di Bali
Sangkep	: Rapat/pertemuan
Santena Rajeg	: Anak perempuan yang diberi kedudukan sebagai anak laki-laki dalam sistem kekeluargaan Hindu di Bali
Salah Krama	: Perbuatan melakukan hubungan kelamin dengan binatang.
Sebel	: Kotor secara spiritual.
Sedahan Tembuku	: Suatu jabatan yang bertugas mengawasi pengaliran air ke sawah-sawah dan menerima pajak pemakaian air.
Sedahan Gede	: Pejabat yang menghubungkan raja dan masyarakat.
Sudra	: Wangsa keempat dalam masyarakat Hindu di Bali
Skala	: Nyata
Suaran Kulkul	: Bunyi kentungan

- Sukerta Tata Pawongan : Ketentuan atau peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya
- Sukerta Tata Parahyangan : Ketentuan atau peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan
- Tri Hita Karana : Ajaran Hindu tentang tiga penyebab kesejahteraan manusia dengan Tuhan, keselarasan hubungan antara manusia dan keselarasan hubungan antara manusia dengan sekitarnya.
- Tri Mandala : Pembagian pada wilayah tempat tinggal menjadi tiga tempat waktu : hulu, tengah dan belakang
- Tri Rna : Ajaran Hindu tentang tiga hutang yang terdiri dari hutang kepada Tuhan (Dewa Rna), hutang kepada leluhur (pitra Rna), dan hutang kepada Guru (Rsi Rna). Ketiga hutang ini tidak mungkin dapat dibayarsecara tuntas oleh manusia.
- Tribhuana : Rangkaian kedua dalam upacara di pura Besakih yang dilaksanakan seratus tahun sekali, bertujuan untuk keselamatan dunia atas, tengah dan bawah.
- Tunggal Dadia : Klen besar patrilineal
- Tunggal Kawitan : Klen besar patrilineal
- Tunggal Merajan : Klen kecil patrilineal
- Tunggal Sanggah : Klen kecil patrilineal
- Waysia : Wangsa ketiga dalam sistem kasta di Bali
- Wadah : Usungan jenazah berbentuk menara untuk membawa jenazah orang bukan bangsawan ke tempat pembakaran. Usungan jenazah orang\$bangsawan disebut bade. Setiba di tempat pembakaran (kuburan) jenazah dipindahkan dari wadah ke petulangan yang ditempatkan di bale pembasmian untuk selanjutnya di bakar, wadah atau base yang kosong itu kemudian di bakar juga.

- Wicana Lan Pamidanda : Ketentuan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran peran desa adat.
- Wak Parusya : Perbuatan menghina orang lain.

